



**HAK CIPTA DI INDONESIA  
(STUDI MENGENAI POLITIK HUKUM HAK CIPTA  
DI INDONESIA)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Airlangga Surya Nagara, S.H.**

**110101111400081**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Budi Santoso, SH., M.S.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2013**

**HAK CIPTA DI INDONESIA  
(STUDI MENGENAI POLITIK HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA)**

Disusun Oleh:

**Airlangga Surya Nagara, S.H.**  
NIM. 11010111400081

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal .....**

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui,  
Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**  
NIP. 19611005 198603 1 002

**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**  
NIP. 19560203 198103 1 002

## MOTTO

*"Dharma Eva Hato Hanti"*

-Bersatu Karena Kuat, Kuat Karena Bersatu-

*"Berikan aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut  
semeru dari akarnya, berikan aku satu pemuda, niscaya  
akan kuguncang dunia"*

-Bung Karno-

*"Aja Wedi, Aja Wani,  
Aja Kaget, Aja Gumun, Aja Dumeh"*

-Falsafah Jawa-

*"Ngluruk Tanpa Bala,  
Menang Tanpa Ngasorake Liyan"*

-Falsafah Jawa-

*"Bernegara Itu Tidak Mudah"*

-Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H. M.S.-

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan kepada Ibu Pertiwi  
&  
seluruh tumpah darah Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sembah sujud dan puji syukur hamba haturkan kepadamu karena atas berkat rahmat-Mu hamba dapat menempuh studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Hak Cipta "Hak Cipta di Indonesia (Studi Mengenai Politik Hukum Hak Cipta di Indonesia)".

Terima kasih dan hormat penulis haturkan kepada Eyang Kakung tercinta Almarhum Drs. R.M. Toeloes Herjadi Koesoemaboedaja (Soerjabrata) yang telah berpulang pada tanggal 4 November 1999. Terimakasih Eyang atas segala kasih sayang, perhatian, dan teladan yang kauberikan kepada penulis semasa penulis kanak-kanak hingga menjadikan penulis menjadi manusia yang kuat dan pantang menyerah. Terima kasih Eyang atas segala spirit Pancasila dan nasionalisme serta falsafah Jawa yang Eyang tanamkan pada diri penulis sejak masa kanak-kanak sehingga menjadi dasar yang kuat bagi penulis dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Terima kasih dan hormat penulis haturkan pula kepada Eyang Putri, R. Ay. Koentjarawati Toeloes Koesoemaboedaja yang dalam usia senjanya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga masih dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada penulis. Semangat Eyang yang luar biasa di usia senja ini menjadi teladan bagi penulis untuk selalu bersemangat menjalani kehidupan ini. Terima kasih dan hormat penulis haturkan pula kepada Almarhum Eyang Chairul Asikin dan Almarhumah Eyang R. Ay. Sri Renie Ambarlia atas segala kasih sayang, perhatian, dan teladan yang kauberikan kepada penulis semasa penulis kanak-kanak.

Terima kasih dan hormat penulis haturkan kepada Ayahanda tercinta, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dan Ibunda tercinta, Dr.

Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, teladan, dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis. Khususnya kepada Ibu, terima kasih atas curahan kasih sayangmu kepada anakmu ini yang bagaikan air mengalir yang tak pernah berhenti. Terima kasih Ayah dan Ibu telah memberikan motivasi kepada anakmu ini untuk terus menuntut ilmu dan mengejar cita-cita.

Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. K.H. Munif Muhammad Zuhri (Gus Munif), yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat, doa dan restu kepada penulis selama ini;
2. Almarhum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Begawan Ilmu Hukum Indonesia, yang telah menjadi teladan dan sumber inspirasi penulis selama menempuh pendidikan tinggi hukum;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang telah memberikan beasiswa unggulan sehingga penulis dapat menempuh studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
4. Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Sudarto P.H., MES. Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., (mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) dan mantan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Almarhum Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis dalam menempuh studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
6. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan

kepada penulis selama menempuh studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan menyelesaikan penulisan tesis ini;

7. Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S. dan Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., yang telah untuk menguji dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan tesis ini;
8. Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S., yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Beasiswa Unggulan, Kelas HET-HKI, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
9. Seluruh pengajar pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
10. Ibu Hj. Budi Gutami, S.H., M.H., dan Bapak Adam Sunarto, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat, doa dan restu kepada penulis selama ini;
11. Kakak penulis, Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H., dan Kurnia Sadewa, S.H. yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, bantuan, dan dukungan kepada penulis selama ini;
12. Wanita yang terkasih, Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan semangat kepada penulis selama ini serta mendampingi penulis melewati masa-masa sulit selama menempuh studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
13. Adik penulis, Maharsi Dewi Kusharyani, S.H., yang telah memberikan perhatian, bantuan, dan dukungan kepada penulis selama ini;
14. Sahabat penulis, Bambang Kismanto, S.H., dan Om Is, yang telah menjadi sahabat dan teman *nguda rasa* selama ini;
15. Rekan-rekan Beasiswa Unggulan, Kelas HET-HKI Angkatan 2011, khususnya Mas Lungid, Mbak Nung, Mbak Devica, Mbak Ria, Bang

Martin, yang telah menjadi rekan diskusi selama menempuh studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;

16. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro khususnya Pak Manto, Mbak Ika, dan Mas Aryo, yang telah bantuan dan dukungan kepada penulis selama menempuh studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
17. Rekan-rekan Satjipto Rahardjo Institute, yang telah memberikan dukungan dan menjadi kawan seperjuangan;
18. Rekan-rekan Ex Instruktur, khususnya Pak Krisno Arianto (Pak Bo), Pak Hadi, dan adik-adik, Sersan Mayor Taruna Febi Hantara, Bre Ika Jendra, Reangga Perkasa, Luthfan Prakoso, yang telah menjadi teman seperjuangan;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan bermanfaat pula bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Salam “Bernegara Itu Tidak Mudah”! Merdeka! Merdeka! Merdeka untuk selama-lamanya!

Wassalamulaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Semarang, Maret 2013

Penulis



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Airlangga Surya Nagara, S.H., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Maret 2013  
Penulis

**Airlangga Surya Nagara, S.H.**  
NIM. 11010111400081

## **ABSTRAK**

### **Hak Cipta di Indonesia (Studi Mengenai Politik Hukum Hak Cipta di Indonesia)**

Bidang Hak Cipta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dikarenakan substansi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional berkaitan langsung dengan kepentingan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan negara. Realitanya Undang-Undang Hak Cipta Nasional merupakan bentuk imlementasi ketentuan-ketentuan WTO/TRIPs *Agreement* serta instrumen-instrumen hukum internasional lainnya. Kondisi demikian mengakibatkan Hukum Hak Cipta Nasional tidak sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan nasional dan berpotensi menghambat terwujudnya tujuan negara.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis taraf sinkronisasi Politik Hukum Instrumental Hak Cipta dengan Politik Hukum Ideal dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Politik Hukum Ideal dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar? (2) Bagaimanakah perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional? (3) Bagaimanakah membangun Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada masa yang akan datang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif -yang bertumpu pada data sekunder- karena berupaya menemukan asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi Hukum Hak Cipta Nasional. Analisis terhadap temuan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan preskriptif ini dilakukan dengan menggunakan *Stufenbautheorie* dari Hans Kelsen dan *die thiorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* dari Hans Nawiasky.

Simpulan penelitian ini adalah: (1) Politik Hukum Ideal Hak Cipta sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar merupakan paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional yang harus diimplementasikan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional; (2) Perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika dalam pengimplementasian Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta ke dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional; (3) Pembangunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada masa yang akan datang harus dilakukan dengan berpedoman, bersumber, dan berdasar pada Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta sebagai paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional dan mengesampingkan ketentuan-ketentuan WTO/TRIPs *Agreement* serta instrumen-instrumen hukum internasional yang bertentangan dengan paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional.

**Kata Kunci:** Politik Hukum Hak Cipta di Indonesia

## **ABSTRACT**

### **COPYRIGHT IN INDONESIA**

#### ***(Studies on the Legal Policy of Copyright in Indonesia)***

The area of copyright has a very important position in the protection of Intellectual Property Rights in Indonesia due to the substance controlled under the National Copyright Act directly related to the national interest in order to realize the purposes of the state. Infact, the National Copyright Act is the implementation of the WTO / TRIPS Agreement provisions and other instruments of international law. These conditions resulted in the National Copyright Act does not fully serve the national interest and potentially inhibit the realization of the pusposes of the state.

This study focused on analyzing the level of synchronization between the Instrumental Legal Policy of Copyright, and the Ideal Legal Policy and the Basic Legal Policy of Copyright. Issues examined in this study are: (1) How does the Ideal Legal Policy and the Basic Legal Policy of Copyright contained in Pancasila and the Constitution? (2) How does the development of the Instrumental Legal Policy of Copyright contained in the National Copyright Act? (3) How to develop the National Copyright Act in the future?

This study uses the normative-legal research method -which is based on secondary data- for trying to find legal principles and the synchronization level of the National Copyright Law. The analysis of the findings of the study is descriptive analytical and prescriptive that is done using Stufenbautheorie of Hans Kelsen and die thiorie Stufenordnung vom der Rechtsnormen of Hans Nawiasky.

The conclusions of this research are: (1) The Ideal Legal Policy of Copyright as contained in Pancasila and the Basic Legal Policy of Copyright as contained in the Constitution is the paradigm of the Legal Policy of National Copyright which should be implemented in the National Copyright Act; (2) The development of the Instrumental Legal Policy of Copyright contained in the National Copyright Act indicates that there has been dynamics in the implementation of the Ideal and Basic Legal Policy of Copyright in the National Copyright Act; (3) The development of the National Copyright Act in the future should be done by referring, sourced, and based on the Ideal and Basic Legal Policy of Copyright as the paradigm of the Legal Policy of the National Copyright, and override the provisions of the WTO / TRIPS Agreement and the instruments of international law - as opposed to the paradigm of the Legal Policy of the National Copyright.

**Keywords:** the Legal Policy of Copyright in Indonesia.

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Alur Pemikiran .....	38
Bagan 3.1. Perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta..	256

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbandingan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta dalam UU Hak Cipta 1982 dan UU Hak Cipta 1987 .....	187
Tabel 3.2. Perbandingan Ancaman Sanksi Pidana Hak Cipta dalam UU Hak Cipta 1982 dan UU Hak Cipta 1987 .....	189
Tabel 3.3. Perbandingan Pasal 15 UU Hak Cipta 1982 dan Pasal 15 UU Hak Cipta 1987 .....	191
Tabel 3.4. Perbandingan Pasal 16 UU Hak Cipta 1982 dan Pasal 16 UU Hak Cipta 1987 .....	192
Tabel 3.5. Perbandingan Pasal 48 UU Hak Cipta 1982 dan Pasal 48 UU Hak Cipta 1987 .....	194
Tabel 3.6. Politik Hukum Instrumental Yang Terkandung Dalam UU Hak Cipta 1987 .....	201
Tabel 3.7. Politik Hukum Instrumental Yang Terkandung Dalam UU Hak Cipta 1997 .....	233
Tabel 3.8. Perbandingan Ancaman Sanksi Pidana Hak Cipta Dalam UU Hak Cipta 1982, UU Hak Cipta 1987, dan UU Hak Cipta 2002 .....	243
Tabel 3.9. Politik Hukum Instrumental Yang Terkandung Dalam UU Hak Cipta 2002 .....	254

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
 <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Permasalahan .....</b>	<b>16</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>E. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>17</b>
1. Kerangka Konseptual .....	17
a. Pengertian Hak Cipta .....	17
b. Pengertian Politik Hukum Hak Cipta .....	22
2. Kerangka Teori .....	26
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>39</b>
1. Metode Pendekatan .....	39
2. Spesifikasi Penelitian .....	41
3. Jenis Data .....	42
4. Metode Pengumpulan Data .....	43
5. Metode Analisis Data .....	44
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>45</b>
 <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>47</b>
<b>A. Hak Cipta .....</b>	<b>47</b>
1. Sejarah Lahirnya Perlindungan Hak Cipta .....	47
a. Tradisi <i>Common Law System</i> .....	49
b. Tradisi <i>Civil Law System</i> .....	55
2. Perlindungan Hak Cipta Dalam Berbagai	
Perjanjian Internasional .....	60
a. <i>Bern Convention for the Protection of Literary</i>	
<i>and Artistic Works</i> .....	61
b. <i>Universal Copyright Convention</i> .....	63
c. <i>The Rome Convention</i> .....	65
d. <i>The Geneva Phonogram Convention</i> .....	68

e. WTO/TRIPS Agreement.....	69
f. WIPO Copyright Treaty.....	73
g. WIPO Performances and Phonogram Treaty.....	75
3. Sejarah Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia .....	77
<b>B. Politik Hukum.....</b>	<b>82</b>
1. Paradigma Politik Hukum Nasional .....	83
2. Pengaruh Asing Terhadap Politik Hukum Nasional.....	93
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>105</b>
<b>A. Politik Hukum Ideal dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta .....</b>	<b>105</b>
1. Politik Hukum Ideal Hak Cipta .....	105
2. Politik Hukum Dasar Hak Cipta .....	133
a. Politik Hukum Dasar Hak Cipta Yang Terkandung Dalam UUD RI 1945 .....	134
b. Politik Hukum Dasar Hak Cipta Yang Terkandung Dalam Konstitusi RIS.....	141
c. Politik Hukum Dasar Hak Cipta Yang Terkandung Dalam UUDS 1950 .....	146
d. Politik Hukum Dasar Hak Cipta Yang Terkandung Dalam UUD NRI Tahun 1945 .....	150
<b>B. Perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta .....</b>	<b>155</b>
1. Politik Hukum Instrumental Hak Cipta Yang Terkandung Dalam <i>Auteurswet</i> 1912 atau Undang-Undang Hak Pengarang .....	156
2. Politik Hukum Instrumental Hak Cipta Yang Terkandung Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 .....	168
3. Politik Hukum Instrumental Hak Cipta Yang Terkandung Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 .....	234
<b>C. Pembangunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional Pada Masa Yang Akan Datang .....</b>	<b>257</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>270</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>270</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>274</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>276</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena “globalisasi”<sup>1</sup> yang telah dan tengah berlangsung saat ini, sekalipun identik dengan globalisasi ekonomi namun juga membawa pengaruh besar pada bidang-bidang lain diluar bidang ekonomi seperti politik, budaya, hukum, sampai pada ideologi suatu negara.<sup>2</sup> Dalam kaitannya Indonesia sebagai sebuah negara, globalisasi juga membawa pengaruh besar dalam tata kehidupan

---

<sup>1</sup> “Globalisasi” sebagai sebuah istilah, memiliki banyak definisi sesuai dengan cara pandang seseorang dalam mendefinisikan globalisasi tersebut. Dalam pandangan umum, John Byliss dan Steve Smith dalam bukunya yang berjudul *The Globalization of World Politics*, mendefinisikan globalisasi sebagai proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara mempengaruhi negara dan masyarakat lainnya. Lihat: Muhammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hal. 12.

Anthony Giddens mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya. Lihat: *Ibid*, hal. 14.

Dari definisi sebagaimana diuraikan di muka maka secara umum dapat dipahami bahwa globalisasi menunjuk kepada suatu era tanpa batas (*borderless*) dimana fenomena yang terjadi di suatu wilayah dunia mempengaruhi suatu wilayah di belahan dunia, sehingga mengijhlangkan adanya batas-batas fisik dan non-fisik yang ada.

Dalam kenyataannya globalisasi yang telah dan tengah berlangsung merupakan globalisasi ekonomi. Menurut IMF, globalisasi ekonomi merupakan proses pengintegrasian perekonomian antara bangsa-bangsa di dunia secara terus menerus melalui arus perdagangan dan keuangan. Sedangkan World Bank mendeskripsikan globalisasi ekonomi sebagai proses *sharing* kegiatan ekonomi dunia yang berjalan di seluruh masyarakat di berbagai negara melalui kegiatan perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan aliran pasar modal. Lihat: *Ibid.*, hal. 12-13. Lihat juga: Emil Salim, “Menanggapi Tantangan Global”, dalam Riant Nugroho dan Marco P. Sumampouw, Ed., *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1997), hal. 4-6.

<sup>2</sup> Arief Hidayat, “Prospek dan Tantangan Sistem Hukum Indonesia Pada Era Global”, Pidato disampaikan pada Dies Natalis ke 41 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998, hal.6.



negara Indonesia, salah satunya adalah pada sistem hukum nasional.

<sup>3</sup> Salah satu bidang hukum dalam sistem hukum nasional yang mendapat pengaruh besar dari berlangsungnya globalisasi adalah bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Sebagaimana diketahui bahwa bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dalam bahasa asing sering disebut dengan *Intellectual Property Rights* sebagai suatu konsep hak yang relatif telah lama ada, kini menjadi fokus perhatian bagi sebagian besar negara dunia, utamanya negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Hal tersebut bukanlah tanpa sebab, namun dikarenakan bidang Hak Kekayaan Intelektual yang ada kini masuk dan diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*<sup>4</sup> yang

---

<sup>3</sup> Sistem hukum nasional terdiri dari dua unsur utama yakni sistem dan hukum nasional. Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, Mahfud MD menyatakan bahwa sistem hukum nasional merupakan suatu kesatuan hukum yang meliputi semua unsur hukum baik substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Lihat: Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hal. 21.

Sejalan dengan hal tersebut, Sunaryati Hartono menyatakan bahwa setiap bidang hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional wajib bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Lihat: Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 64.

<sup>4</sup> Secara normatif tujuan TRIPs Agreement dalam Article 7 adalah untuk memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakan hukum dengan menerapkan tindakan-tindakan yang menciptakan perdagangan yang sehat, untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi serta penyebaran teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan, yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>4</sup> JICA dan DGIP RI, "Capacity Building Program on The Implementation of the WTO Agreement in Indonesia (TRIPs Component)", Makalah dalam Pelatihan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2003, hal. 10, sebagaimana dikutip dalam Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan*

merupakan bagian dari Agreement Establishing the World Trade Organization (*WTO Agreement*).<sup>5</sup> WTO merupakan satu dari tiga institusi pilar yang menopang lahirnya globalisasi sejak tahun 1980an disamping IMF (*International Monetary Fund*) dan *World Bank*.<sup>6</sup> WTO merupakan bentuk penguatan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang lahir bersama IMF, dan *World Bank* sebagai bentuk kuatnya keinginan negara-negara barat untuk memulihkan kembali perekonomian dunia yang hancur akibat Perang Dunia II melalui Konferensi di Bretton Woods, Juli 1944.

Penguatan yang dimaksud adalah adanya keinginan negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk meningkatkan *global free trade* dan perluasan pasar.<sup>7</sup> Dengan adanya WTO maka diharapkan akan tercipta situasi perdagangan internasional yang kondusif. Situasi kondusif tersebut tercipta melalui penghapusan praktik-praktik proteksionisme negara melalui hambatan tarif maupun non tarif yang pada intinya adalah menciptakan sistem ekonomi pasar bebas. Dengan terciptanya pasar bebas maka akan terwujud efisiensi ekonomi yang terwujud melalui kompetisi dan pembagian kerja. Pembagian kerja dan spesialisasi komoditas ekonomi akan membuat

---

*Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 8.

<sup>5</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, (Jakarta – Bandung: Badan Penerbit FH UI dan Penerbit Alumni, 2011), hal. 1.

<sup>6</sup> Muhammad Amien Rais, *op.cit.*, hal. 15.

<sup>7</sup> Lihat: *Loc.cit*, lihat juga: Rudi Rusdiah, *Diplomasi, Unilateralisme, Kompetisi Global: Studi Kasus USTR Special 301 – TRIPs Plus – WTO & Pasar HKI Software RI*, (Bandung: Alumni, 2011), hal. 1, dan Joko Priyono, *Hukum Perdagangan Barang Dalam GATT/WTO*, (Semarang: Penerbit Undip, 2011), hal. 3.

suatu negara terpusat perhatian dan pekerjaannya pada suatu bidang yang paling baik, cocok, dan efisien bagi dirinya sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi tidak hanya perekonomian bagi negara maju namun sama halnya juga pada negara berkembang.<sup>8</sup> Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan maka diharapkan pada akhirnya akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Terwujudnya kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita dan tujuan seluruh negara dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia secara tegas menyatakan tujuan dibentuknya Negara Indonesia atau tujuan negara pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945<sup>9</sup> yang meliputi (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itulah terlepas dari pro kontra keikutsertaan Indonesia dalam WTO, dengan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 demi mencapai tujuan negara, Indonesia ikut serta menjadi anggota WTO. Keikutsertaan Indonesia tersebut secara yuridis diwujudkan melalui ratifikasi *WTO Agreement* melalui

---

<sup>8</sup> Lihat: Mohammad Amien Rais, *op.cit.*, hal 13.

<sup>9</sup> Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, hingga pada saat karya tulis ini dibuat, telah berlaku tiga undang-undang dasar, yakni (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 disebut UUD RI 1945, berlaku pada 18 Agustus 1945-27 Desember 1949, kemudian melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlaku kembali hingga saat ini dengan mengalami perubahan sebanyak empat kali dalam kurun waktu tahun 1999, 2000, 2001, 2002, dan disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945; (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat disebut sebagai Konstitusi RIS, berlaku pada 27 Desember 1949-17 Agustus 1950; (3) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 disebut sebagai UUDS 1950, berlaku pada 17 Agustus 1950-5 Juli 1959.

Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Dengan meratifikasi WTO *Agreement* maka secara yuridis, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam WTO *Agreement* tak terkecuali TRIPs *Agreement*. Hal tersebut dikarenakan kedudukan yuridis TRIPs *Agreement* sebagai lampiran dari WTO *Agreement* memiliki arti bahwa WTO *Agreement* dan TRIPs *Agreement* merupakan satu kesatuan perjanjian yang tak terpisahkan. Oleh karenanya sebagai anggota WTO, reservasi terhadap TRIPs *Agreement* menjadi tidak dimungkinkan, kecuali atas persetujuan negara-negara anggota secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Sebagai bentuk implementasi aturan-aturan tersebut, maka pemerintah telah menyesuaikan produk-produk hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam TRIPs *Agreement*. Proses penyesuaian tersebut diawali pada tahun 1997 antara lain dengan menerbitkan: (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987; (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten; (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Pada tahun 2000

---

<sup>10</sup> Lihat: *Article XVI. 5 WTO Agreement Jo. Article 72 TRIPs Agreement*.

pemerintah kembali menerbitkan beberapa undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual, antara lain: (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Selanjutnya, pada tahun 2001, pemerintah kembali menerbitkan tiga undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk perbaikan atas undang-undang sebelumnya yang dirasa masih kurang sesuai dengan ketentuan TRIPs. Dua undang-undang tersebut adalah: (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terakhir pada tahun 2002, pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini disusun dan diterbitkan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan TRIPs dan *WIPO Copyright Treaty*. Dari ketujuh bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diuraikan di muka, bidang Hak Cipta menduduki posisi yang sangat penting dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Hak Cipta menjadi sangat penting dikarenakan substansi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta berkaitan langsung dengan kebudayaan nasional yang meliputi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kesusastraan, serta bentuk-bentuk kebudayaan

lainnya. Dapat dipahami bahwa bidang-bidang tersebut merupakan bidang yang sangat penting dan berpengaruh pada perjalanan kehidupan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan tidak dimungkinkannya reservasi terhadap *TRIPs Agreement* maka pemerintah mau tidak mau harus mengimplementasikan dan melakukan penyesuaian secara total ketentuan-ketentuan berkaitan dengan Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam *TRIPs Agreement* ke dalam sistem hukum nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Setidaknya pasca ratifikasi *WTO Agreement*, sebagaimana telah diuraikan dimuka, pemerintah telah dua kali menerbitkan Undang-Undang Hak Cipta. Pertama adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 yang masih merupakan perubahan atas undang-undang sebelumnya, yang kemudian digantikan oleh undang-undang Hak Cipta baru yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.

Yang menjadi pokok perhatian dan permasalahan adalah disisi substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah substansi yang sangat penting, namun disisi lain Undang-Undang Hak Cipta merupakan bentuk implementasi dari konvensi internasional yang substansinya belum tentu sejalan dengan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dikarenakan merupakan sebuah hasil adopsi dari suatu konvensi internasional yang sarat dengan tarik menarik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang, maka besar

kemungkinan Undang-Undang Hak Cipta yang ada saat ini tidak sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan nasional sekalipun dalam konsiderans undang-undang dinyatakan bahwa perlindungan Hak Cipta diperlukan guna memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia.

Tarik menarik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang nampak jelas saat negosiasi *TRIPs Agreement*. Negara maju berkeinginan agar pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dimasukkan ke dalam ketentuan GATT. Usulan tersebut pertama kali diajukan oleh Amerika Serikat yang kemudian didukung oleh negara-negara Eropa, Jepang, dan Kanada. Atas usulan tersebut negara berkembang berupaya mengajukan penolakan. Negara berkembang berargumen bahwa tidak terdapat korelasi antara Hak Kekayaan Intelektual dengan Perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat proteksionis akan merusak tercapainya sistem perdagangan bebas. Negara berkembang juga berargumen bahwa negara berkembang sebagai pihak yang tidak memiliki padanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang setara dengan negara maju akan dirugikan dengan masuknya Hak Kekayaan Intelektual dalam GATT

yang berakibat pada terhambatnya pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>11</sup>

Akan tetapi pada akhirnya upaya penolakan yang dilakukan negara berkembang kandas, hal tersebut dikarenakan lemahnya *bargaining position* dari negara berkembang. Bagaimana tidak, dengan menyatunya TRIPs *Agreement* kedalam WTO *Agreement* akan membuat setiap negara berkembang yang menolak TRIPs *Agreement* kehilangan tempatnya sebagai anggota WTO. Hal tersebut berarti negara berkembang secara ekonomi akan dirugikan karena akan kehilangan fasilitas-fasilitas perdagangan sebagai anggota WTO.<sup>12</sup> Dengan kandasnya upaya negara berkembang tersebut semakin jelas bahwa rumusan TRIPs *Agreement* sangatlah berpihak pada kepentingan negara maju. Sehingga dapat dipahami bahwa TRIPs *Agreement* seakan "*fait accompli*" bagi negara berkembang karena lahir dalam konstelasi politik internasional yang tidak berimbang.

Lebih lanjut, apabila menengok sejarah WTO sebagai salah satu dari tiga pilar penopang globalisasi maka dapat dipahami bahwa karakter WTO *Agreement* bercirikan liberalisme. Karakteristik sifat liberalistik yakni mengutamakan kepentingan sendiri (individual), kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, serta beraklak *economic animal*

---

<sup>11</sup> Nandang Sutrisno, "Implementasi Persetujuan TRIPs Dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia", <http://www.iprcentre.org/doc>, sebagaimana dikutip dalam Candra Irawan, *op.cit.*, hal. 6.

<sup>12</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal 11.



tulen yang berorientasi pada keuntungan pribadi sebesar-besarnya.<sup>13</sup> Diakui atau tidak ciri atau sifat bawaan tersebut akan melekat pula pada TRIPs *Agreement* sebagai “anak kandung” negara-negara maju “liberalis – kapitalis”. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan dasar falsafah negara Pancasila. Sifat liberalistik-individualistik yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual versi TRIPs *Agreement* tentu bertentangan dengan nilai kolektivisme bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Ciri monopoli dan *profit oriented* yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual versi TRIPs *Agreement* tentu tidaklah sesuai dengan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

Setidaknya kedua ciri tersebut nampak dalam Alinea ke IV Pembukaan TRIPs *Agreement* yang menyatakan bahwa negara anggota “*Recognizing that intellectual property rights are private rights*”. Pengkategorian Hak Kekayaan Intelektual sebagai *private rights* menjadi sangat menarik karena dapat memicu perdebatan. *Pertama*, karena pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual melayani kepentingan masyarakat.<sup>14</sup> *Kedua*, konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dibatasi oleh jangka waktu perlindungan, setelah jangka waktu perlindungan habis, kekayaan intelektual tersebut

---

<sup>13</sup> Sri Edi Swasono, “Mewaspadai Pasar Bebas Dalam Globalisasi”, dalam Riant nugroho dan Marco P. Sumampouw, *Ed., Manajemen Dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1997), hal. 29-30.

<sup>14</sup> Hector MacQueen, *et.al., Contemporary Intellectual Property: Law And Policy*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), page 10, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 26.

menjadi *public domain*. Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa ditetapkannya jangka waktu perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual adalah dalam rangka melindungi kepentingan publik dari monopoli pemilik hak. Namun demikian dalam kenyataannya, nuansa yang melekat bahwa *public domain* tidak lebih dari sekedar penampungan bagi kekayaan intelektual<sup>15</sup> yang sudah tidak dapat lagi “diperas sari-sari” keuntungannya atau kehilangan nilai ekonomi (*potential profit*) karena sudah *out of date*, sehingga yang tersisa hanyalah “ampas-ampas” kekayaan intelektual yang hanya perlu dilindungi secara moral saja.

Lebih lanjut, globalisasi yang telah dan tengah berlangsung saat ini dalam kenyataannya semakin menjauh dari apa yang negara maju katakan sebagai jalan menuju kesejahteraan. Jurang ketimpangan antara negara maju dan negara miskin semakin menganga lebar. Peraih Nobel Ekonomi tahun 2007, Eric Maskin secara tegas menyatakan bahwa globalisasi adalah salah satu penyebab terjadinya ketimpangan kesejahteraan, terutama terjadi di negara berkembang.<sup>16</sup> Sebagai contoh, dana untuk perbaikan pendidikan dasar di seluruh negara berkembang menghabiskan dana US\$ 6 milyar setahun merupakan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan dana US\$ 8 milyar yang dihabiskan penduduk Amerika Serikat untuk membeli kosmetik. Dana untuk kesehatan dasar dan nutrisi di seluruh negara

---

<sup>15</sup> Lihat: *loc. cit.*

<sup>16</sup> Ekonomi Pembangunan, “Pertumbuhan Ekonomi Tak Jamin Kesejahteraan”, *Kompas*, (Jakarta), 5 September 2012, hal. 1, kol. 1.

berkembang menghabiskan dana US\$ 13 milyar, sedangkan di Eropa dan Amerika Serikat US\$ 17 milyar dihabiskan hanya untuk membeli makanan untuk hewan peliharaan (anjing dan kucing). Sama halnya dengan konsumsi es krim di Eropa sebesar US\$ 11 milyar yang masih lebih besar US\$ 2 milyar dari pengeluaran untuk instalasi air dan sanitasi di seluruh negara berkembang.<sup>17</sup>

Masih dalam kaitannya dengan ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang sebuah data mengungkap bahwa pada akhir dekade 1990an, 20 persen penduduk dunia menikmati 86 persen penghasilan dunia. Penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang tinggal di negara maju. Berbanding terbalik dengan hal tersebut bahwa 20 persen penduduk yang terbawah yang sebagian besar tinggal di negara berkembang hanya mendapat 1 persen penghasilan dunia. Data juga mengungkap bahwa pada tahun 1960, sebanyak 20 persen penduduk paling atas berpenghasilan 30 kali lebih besar daripada 20 persen penduduk paling bawah. Rasio tersebut menjadi lebih besar 32 kali pada 1970, 45 kali pada 1980, 60 kali pada 1990, dan 75 kali pada akhir dekade 1990an. Masih pada akhir dekade 1990an terungkap pula bahwa 80 negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang lebih kecil dibanding pada akhir dekade 1980an.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> [http://faculty.virginia.edu/mesp/Fatton\\_Globalization\\_Terror.pdf](http://faculty.virginia.edu/mesp/Fatton_Globalization_Terror.pdf), sebagaimana dikutip dalam Muhammad Amien Rais, *op.cit.*, hal. 21-22.

<sup>18</sup> [http://Encarta.msn.com/text\\_1741588347\\_0/Globalization.html](http://Encarta.msn.com/text_1741588347_0/Globalization.html), sebagaimana dikutip dalam Muhammad Amien Rais, *op.cit.*, hal. 21.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, ketimpangan akibat globalisasi ditunjukkan melalui tingginya angka Rasio Gini<sup>19</sup>. Pada tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Rasio Gini menyentuh angka 0,41 yang termasuk dalam kategori ketimpangan menengah di Indonesia. Angka ini jauh meningkat jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni dibawah 0,4 yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Selama masa sebelum krisis ekonomi 1997/1998, Rasio Gini stabil di angka 0,32. Pada tahun 2003-2005 Rasio Gini naik menjadi 0,33 dan 0,34 pada 2006 serta melonjak menjadi 0,38 pada tahun 2007 hingga 2010.<sup>20</sup>

Untuk memperjelas bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar, pada tahun 2005 BPS melansir data bahwa 40 persen penduduk terendah masih mendapatkan 20,22 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi mendapatkan 41,09 persen PDB. Sedangkan pada tahun 2011, 40 persen penduduk terendah hanya mendapatkan 16,86 persen PDB, dan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi mendapatkan 48,41 persen PDB. Angka-angka tersebut cukup jelas menunjukkan ketimpangan akibat globalisasi dan menunjukkan pula

---

<sup>19</sup> Rasio Gini atau Koefisien Gini merupakan rasio yang dikembangkan oleh ahli statistik dan sosiolog Italia bernama Corrado Gini. Rasio gini bertujuan untuk mengukur ketimpangan distribusi frekuensi tertentu misalnya pendapatan dan kekayaan.

<sup>20</sup> Ahmad Erani Yustika, "Ongkos Globalisasi", dalam Opini, *Kompas*, (Jakarta), 12 September 2012, hal. 6, kol. 2.

kegagalan globalisasi dalam memenuhi janjinya yakni melakukan pemerataan kesejahteraan.<sup>21</sup>

Hal tersebut di muka menunjukkan bahwa globalisasi yang ditopang oleh IMF, World Bank, dan WTO beserta instrumen-instrumen konvensi dan kebijakannya sarat kepentingan negara maju yang bersifat eksploitatif terhadap negara-negara berkembang. Instrumen-instrumen tersebut, tak terkecuali *TRIPs Agreement* sejatinya mengarah pada konsep “*one size fits all golden strait jacket*” oleh Thomas L. Friedman yang berpandangan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikehendaki oleh negara maju berlaku pula untuk negara-negara lainnya tak peduli apakah negara tersebut besar atau kecil, negara maju atau berkembang.<sup>22</sup> Sebagai konsep yang liberalis dan pro pasar bebas, tentunya konsep tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial yang dikehendaki Pancasila. Menempatkan negara maju dan negara berkembang dalam suatu posisi yang sejajar dalam ekonomi pasar bebas adalah ibarat “mengadu petinju kelas berat dan kelas bulu”<sup>23</sup> merupakan sebuah ketidakadilan.

Sehubungan dengan mengemukanya permasalahan-permasalahan tersebut di muka sebagai akibat globalisasi maka dibutuhkan peranan politik hukum nasional sebagai pedoman penuntun atau paradigma pembangunan sistem hukum nasional yang

---

<sup>21</sup> *Loc.Cit.*

<sup>22</sup> Thomas L. Friedman, *The World is Flat*, (London: Penguin Books, 2006), sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal. 23.

<sup>23</sup> Istilah yang digunakan Amien Rais dalam menjelaskan globalisasi dan imperialisme ekonomi, lihat: *Loc.Cit.*

mengabdikan pada kepentingan nasional. Oleh karenanya dalam kaitannya dengan Hukum Hak Cipta Nasional, perlu digali baik Politik Hukum Ideal Hak Cipta yang bersumber pada Pancasila, maupun Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang bersumber pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai pedoman penuntun pembangunan Hukum Hak Cipta Nasional<sup>24</sup>

Adapun dalam kaitannya dengan perkembangan Undang-Undang Cipta Nasional sampai saat ini perlu dikaji secara mendalam apakah Politik Hukum Instrumental yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pengkajian dan pemahaman atas perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta di Indonesia sangat diperlukan dalam rangka membangun Undang-Undang Hak Cipta Nasional yang sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta sehingga Undang-Undang Hak Cipta Nasional dapat mengabdikan pada kepentingan nasional dan mempercepat terwujudnya tujuan negara. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di muka, maka **“Hak Cipta di Indonesia (Studi Mengenai Politik Hukum Hak Cipta di Indonesia)”** menjadi menarik dibahas dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Permasalahan**

---

<sup>24</sup> Politik hukum, menurut Arief Hidayat dibagi kedalam tiga jenis yakni, politik hukum ideal, politik hukum dasar, dan politik hukum instrumental. Ketiganya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam karya tulis ini. Arief Hidayat, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, dalam wawancara, Semarang, 21 Agustus 2012, izin mengutip telah diberikan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di muka, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Politik Hukum Ideal dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar?
2. Bagaimanakah perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional?
3. Bagaimanakah membangun Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada masa yang akan datang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Politik Hukum Ideal dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional.
3. Untuk mengkaji pembangunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. **Manfaat Teoretik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada bidang Ilmu Hukum, khususnya bidang Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi mengenai masalah yang berkaitan dengan Politik Hukum Hak Cipta di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengambil kebijakan dalam membangun sistem perlindungan Hak Cipta yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **a. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan salah satu bidang dalam Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual yang dalam bahasa asing lebih dikenal sebagai *Intellectual Property Rights* merupakan salah satu konsep perlindungan hak manusia yang telah dikenal sejak lama untuk melindungi karya intelektual manusia. Pada awalnya konsep Hak Kekayaan Intelektual dimulai dengan konsep merek dagang yang telah ada sejak tiga setengah abad yang lalu ketika para perajin gerabah menjadikan suatu



tanda (merek) tertentu pada gerabah karyanya.<sup>25</sup> Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang kehidupan yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.<sup>26</sup> Dalam perkembangannya, konsep Hak Kekayaan Intelektual berkembang sesuai dengan perkembangan hasil kemampuan intelektual manusia dan tuntutan masyarakat dalam melindungi kekayaan intelektual tersebut.

Sudargo Gautama berpandangan bahwa terdapat dua bidang khusus dalam kaitannya dengan *Intellectual Property*, yakni bidang-bidang yang berkaitan dengan industri dan pengetahuan yang digolongkan sebagai Hak Milik Industri (*Industrial Property*) dan bidang yang berkaitan dengan estetika yang digolongkan sebagai Hak Cipta. Sama halnya dengan Sudargo Gautama, Achmad Zen Umar Purba dan Bambang Kesowo berpandangan bahwa secara “tradisional”, Hak Kekayaan Intelektual pada intinya terbagi dalam dua kelompok besar yaitu Hak Cipta

---

<sup>25</sup> Dorris Estelle dan Anthony D’Amato, *A Coursebook in International Intellectual Property*, (ST. Paul Minn: West Group, 2000), hal. 10-11, sebagaimana diikuti dalam Candra Irawan, *ibid.*, hal. 43.

<sup>26</sup> Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta Indonesia*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012), hal. 7.

dan hak terkait (*Copyright* dan *related rights*), serta Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property*).<sup>27</sup>

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan Hak Cipta, secara terminologi terdapat perbedaan pengistilahan antara negara-negara yang menganut tradisi *Common Law* dan *Civil Law*. Pada negara-negara yang menganut tradisi *Common Law*, Hak Cipta disebut dengan istilah *Copyright*, sedangkan pada negara-negara yang menganut tradisi *Civil Law*, Hak Cipta disebut dengan istilah *Authors Right*.<sup>28</sup> Indonesia sebagai bekas wilayah jajahan Belanda dalam kaitannya dengan tradisi hukum tentu mengikuti tradisi *Civil Law* yang dianut oleh Belanda. Oleh karenanya pada awal kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dengan UU Hak Pengarang yang merupakan *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600 Tahun 1912. Adapun dalam perkembangannya istilah Hak Pengarang digantikan oleh Hak Cipta yang secara resmi digunakan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Jauh sebelum istilah Hak Cipta digunakan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, istilah Hak Cipta

---

<sup>27</sup> Lihat: Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 23, lihat juga: Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 5-6.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 21, lihat juga: Budi Santoso, materi kuliah Hak Cipta pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Bidang Kajian HET-HKI, Februari 2012.

tersebut pertama kali muncul dalam Kongres Kebudayaan Indonesia ke XI yang diselenggarakan di Bandung pada Oktober 1951. Istilah Hak Cipta diperkenalkan sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dianggap terlalu sempit jangkauan cakupan haknya karena seakan-akan hanya menyangkut hak yang diberikan kepada pengarang saja. Oleh karenanya dalam kongres tersebut disepakati penggunaan istilah Hak Cipta sebagai pengganti dari istilah Hak Pengarang.<sup>29</sup>

Secara etimologis Hak Cipta terdiri dari dua kata, yakni hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau wewenang menurut hukum. Sedangkan cipta diartikan sebagai kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru.<sup>30</sup>

Menurut *Auteurswet* 1912 pengertian *Auteursrecht* atau Hak Pengarang adalah:

*“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”*

---

<sup>29</sup> Lihat: Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 10-11, sebagaimana dikutip dalam Helman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right, Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: IHC, 2010), hal. 43, lihat juga: Budi Santosa, *op.cit.*, hal. 22.

<sup>30</sup> <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 18 September 2012.

Dari uraian tersebut maka dipahami bahwa Hak Pengarang adalah hak eksklusif pengarang atau pencipta karya sastra, ilmu pengetahuan atau seni, atau orang yang ditugaskan, dalam rangka untuk mempublikasikan dan mereproduksi, dengan mengingat pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>31</sup>

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Cipta atau *copyright* diartikan sebagai “*legal form deserving right given to creator for their literary and artistic work*”. Dari uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa Hak Cipta merupakan status hukum berupa hak yang diberikan kepada pencipta atas karya-karya seni maupun sastra mereka.

Pengertian Hak Cipta berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah:

“hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan beberapa pengertian Hak Cipta sebagaimana diuraikan di muka maka pengertian Hak Cipta

---

<sup>31</sup> Artikel 1 *Auteurswet* 1912, [http://nl.wikisource.org/wiki/Auteurswet\\_-\\_Hoofdstuk\\_I](http://nl.wikisource.org/wiki/Auteurswet_-_Hoofdstuk_I), diakses pada 18 September 2012.

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hak yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya sebagai bentuk karya intelektual manusia.

#### **b. Pengertian Politik Hukum Hak Cipta**

Hingga kini belum terdapat satu kesatuan pandangan mengenai pengertian politik hukum, akan tetapi seluruh ahli hukum sependapat bahwa tiada satu negarapun di dunia yang tidak memiliki politik hukum. Huntington berpendapat bahwa politik hukum (kebijakan hukum) adalah usaha penyelenggara negara dalam *invention law* dan *discovery law* untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya.<sup>32</sup> Sementara itu, Bellefroid<sup>33</sup> mengutarakan pendapatnya mengenai *rechtspolitiek* yang kemudian oleh Abdul Latif dan Hasbi Ali diterjemahkan sebagai politik hukum. Politik hukum menurut Bellefroid sebagai bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.<sup>34</sup> Lemaire<sup>35</sup>,

---

<sup>32</sup> Huntington Cairns, *The Theory of Legal Science*, (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1941), hal. 58-66, sebagaimana dikutip dalam H.R. Abdussalam, *Politik Hukum*, (Jakarta: PTIK Press, 2011), hal. 16.

<sup>33</sup> JHP Bellefroid merupakan seorang guru besar ilmu hukum di Belanda.

<sup>34</sup> JHP Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, (Nijmegen Utrecht: Dekker & Veegt, 1952), hal. 18 sebagaimana dikutip dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 6.

<sup>35</sup> WLJ Lemaire merupakan seorang guru besar Universitas Indonesia.

mengungkapkan bahwa politik hukum termasuk kajian hukum yang terkait dengan ilmu pengetahuan hukum positif. Lemaire berpandangan bahwa politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Politik hukum mengkaji mengenai bagaimana penetapan hukum yang seharusnya atau diharapkan (*ius constituendum*) yang berarti bahwa dalam mengkaji hukum positif tidak berhenti pada kajian hukum yang berlaku akan.<sup>36</sup>

Berbeda dengan Bellefroid dan Lemaire, L.J. Van Apeldoorn tidak menggunakan istilah politik hukum akan tetapi menggunakan istilah politik perundang-undangan yang dalam pandangannya merupakan upaya untuk menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Sudarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>37</sup> Sudarto juga mendefinisikan

---

<sup>36</sup> WLG Lemaire, *Het Recht in Indonesie*, (Bandung: NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, 1955), hal. 2-34 sebagaimana dikutip dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *op.cit.*, hal 6-7.

<sup>37</sup> Soedarto, "Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum", dalam *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun ke VII, Januari – Februari 1979, hal 15-16, dan Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20, sebagaimana dikutip dalam Mohammad Mahfud MD, *op.cit.*, hal. 14.

politik hukum sebagai “usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.” Politik hukum menyangkut *ius constituendum* yakni hukum yang dicita-citakan pada masa yang akan datang.<sup>38</sup>

Lebih lanjut, Sunaryati Hartono, meskipun tidak secara tersurat merumuskan pengertian politik hukum, akan tetapi dapat dipahami bahwa politik hukum merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia. Menurutnya, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari realita sosial dan tradisional bangsa Indonesia, serta tidak dapat dilepaskan pula dari realita dan politik hukum internasional.<sup>39</sup> Dari beberapa pendapat ahli hukum di muka maka dapat dipahami bahwa rumusan pengertian politik hukum tersebut lebih condong kepada aspek *ius constituendum* atau mengenai hukum yang dicita-citakan dan seharusnya diberlakukan di masa mendatang.

Adapun Teuku Mohammad Radhie memberikan definisi politik hukum sebagai “suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 159.

<sup>39</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991), hal. 1, lihat juga: Mohammad Mahfud MD, *op.cit.*, hal. 15, dan H.R. Abdussalam, *op.cit.*, hal. 16.

wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.”<sup>40</sup>

Mahfud MD, mendefinisikan politik hukum sebagai:<sup>41</sup>

“Kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang dalam implementasinya meliputi<sup>42</sup>:

- 1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan, dan
- 2) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.”

Disamping itu Mahfud MD juga mendefinisikan politik hukum sebagai “arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.”<sup>43</sup> Baik berdasarkan pendapat Teuku Mohammad Radhie maupun Mahfud MD maka dapat dipahami bahwa politik hukum tidak hanya mencakup aspek *ius constituendum* akan tetapi juga aspek *ius constitutum* atau

---

<sup>40</sup> Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional”, dalam Majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973, hal. 3, sebagaimana dikutip dalam Mohammad Mahfud MD, *op.cit.*, hal. 13.

<sup>41</sup> Mohammad Mahfud M.D., “Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, Disertasi pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993, hal. 74.

<sup>42</sup> Definisi tersebut dilengkapi Mahfud MD dengan Mengutip pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum nasional”, Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum, yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya, September 1995.

<sup>43</sup> Mohammad Mahfud MD, *Membangun ...*, *op.cit.*, hal. 15.



hukum yang secara aktual berlaku pada wilayah negara tertentu. Adapun dalam penelitian ini dasar pijakan yang diambil dalam memahami politik hukum adalah mencakup politik hukum dalam aspek *ius constitutum* maupun aspek *ius constituendum*, sehingga politik hukum dapat dimaknai sebagai pedoman penuntun pembuatan dan pembangunan hukum sekaligus pula digunakan sebagai sarana menilai dan mengkritisi apakah suatu hukum yang secara aktual telah berlaku sesuai atau tidak dengan pedoman penuntun yang dicita-citakan bagi terwujudnya tujuan negara.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian politik hukum yang telah dirumuskan para ahli hukum sebagaimana diuraikan di muka, maka yang dimaksud dengan politik hukum Hak Cipta dalam penelitian ini adalah kebijaksanaan hukum (legal policy) yang telah dan hendak dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atas ciptaannya sebagai bentuk karya intelektual manusia.

## **2. Kerangka Teori**

Indonesia sebagai sebuah negara baru yang lahir pada abad ke-20 didirikan atas dasar konsepsi negara hukum modern

---

<sup>44</sup> Lihat: Mohammad Mahfud MD, *Membangun ...*, *op.cit.*, hal. 16.

atau negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>45</sup> Hal tersebut secara nyata ditegaskan pada tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsepsi negara hukum yang mendasari didirikannya negara Indonesia juga dinyatakan dalam Penjelasan UUD RI 1945 bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”, yang kemudian secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pendirian negara yang didasarkan atas konsep negara hukum selain dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan negara, namun juga sejalan dengan dianutnya konsepsi negara hukum modern oleh sebagian besar negara pada abad tersebut. Konsepsi negara hukum merupakan suatu konsepsi negara yang lahir pada abad ke-17 dan 18, sebagai bentuk reaksi terhadap konsepsi negara kekuasaan.<sup>46</sup> Namun sejatinya, gagasan atau embrio mengenai negara hukum sebetulnya telah ada jauh

---

<sup>45</sup> Lihat: Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia, 2005), hal. 4,

<sup>46</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1962), hal.9, sebagaimana dikutip dalam Mukthie Fadjar, *op.cit*, hal. 19.

sebelum konsepsi negara hukum mengemuka pada abad ke-17, yakni Plato yang pertama kali mengemukakan bahwa penyelenggara negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik atau ia sebut sebagai *Nomoi*.<sup>47</sup> Gagasan mengenai negara hukum tersebut dalam perkembangannya juga dikuatkan oleh murid Plato yakni Aristoteles. Dalam buku *Politica*, Aristoteles menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>48</sup> Namun demikian gagasan negara tersebut agaknya belum mendapatkan perhatian secara penuh dan menghilang seiring berkembangnya konsepsi negara kekuasaan pada abad pertengahan dan zaman *renaissance*.<sup>49</sup> Absolutisme yang mewarnai negara kekuasaan menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Mereka yang menentang pada intinya menginginkan agar kekuasaan raja harus dibatasi agar tidak berbuat sewenang-wenang pada rakyat. Satu-satunya jalan dalam rangka membatasi kekuasaan

---

<sup>47</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 88-89.

<sup>48</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal. 20-21, sebagaimana dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 2.

<sup>49</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1962), hal.9, sebagaimana dikutip dalam Mukthie Fadjar, *op.cit.*, hal. 11.

raja adalah dengan adanya supremasi hukum yang diiringi dengan adanya pembagian kekuasaan negara.<sup>50</sup>

Berdasarkan perkembangannya terdapat dua konsepsi negara hukum, yakni negara hukum klasik dan negara hukum kesejahteraan. Konsepsi negara hukum klasik atau *legal state* mendasarkan penyelenggaraan negara pada prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peran negara dan pemerintah yakni dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “*the least goverment is the best goverment*” dan dalam bidang ekonomi prinsip yang bertumpu pada dalil “*laissez faire, laissez aller*”. Berdasarkan kedua prinsip tersebut maka negara hanya bertindak sebagai “pejaga malam” saja sehingga dikenal konsep *nachtwakerstaat* / *nachtwatchersstaat*. Dalam perkembangannya, konsepsi negara hukum klasik tersebut dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan bernegara gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karenanya lahir gagasan baru mengenai negara hukum yang menyejahterakan rakyatnya sehingga dikenal konsep *welfare state*. Konsep ini menghendaki negara dan pemerintah disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*) juga turut campur secara

---

<sup>50</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1962), hal.9, sebagaimana dikutip dalam Mukthie Fadjar, *op.cit*, hal. 19.

aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.<sup>51</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara haruslah didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang terbentuk menjadi satu sistem hukum nasional. Sebagai suatu sistem, peraturan-peraturan hukum yang ada terikat oleh asas-asas hukum.<sup>52</sup> Asas hukum merupakan unsur terpenting dan merupakan pokok dari suatu peraturan hukum. Asas hukum merupakan landasan terluas lahirnya suatu peraturan hukum dan merupakan *ratio legis* atau alasan lahirnya peraturan hukum.<sup>53</sup>

Asas hukum juga merupakan sarana yang membuat hukum selalu hidup, tumbuh, dan berkembang. Disamping itu, asas hukum menunjukkan bahwa hukum bukanlah sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka.<sup>54</sup> Hal tersebut dikarenakan di dalam asas hukum terkandung suatu nilai-nilai atau cita-cita sosial dan tuntutan-tuntutan etis masyarakat. Dengan adanya asas hukum, peraturan hukum yang sekilas nampak berdiri sendiri-sendiri itu sebenarnya terikat dalam satu susunan kesatuan. Hal tersebut dikarenakan peraturan-peraturan hukum

---

<sup>51</sup> Ridwan HR, *op.cit.*, hal. 14-15.

<sup>52</sup> Lihat: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal.

49.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 45

<sup>54</sup> Paton sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, *loc.cit.*

tersebut bersumber pada satu induk cita-cita sosial dan penilaian etis tertentu.

Dalam kaitannya dengan keterikatan peraturan hukum pada suatu induk cita-cita sosial dan penilaian etis tertentu, *Stufenbautheorie* dari Hans Kelsen dengan jelas menunjukkan kondisi tersebut. Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum yang ada berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan. Hal tersebut berarti bahwa suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yakni Norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>55</sup>

Dalam kaitannya dengan sistem hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu sistem hukum merupakan suatu proses terus menerus yang dimulai dari yang abstrak menjadi yang positif dan akhirnya menjadi nyata. Jadi menurut Kelsen, urutan norma dimulai dari *Grundnorm* (norma dasar) yang bersifat abstrak (relatif) dijabarkan ke dalam *Generallenorm* (norma positif) dan selanjutnya diindividualisasikan menjadi *Concretenorm* (norma nyata atau konkret). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya *Stufenbautheorie*

---

<sup>55</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1935), hal. 35, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Buku 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 41.

merupakan suatu proses konkretisasi (*konkretisierung*)<sup>56</sup> oleh karenanya keseluruhan norma hukum mulai dari norma hukum tertinggi sampai ke yang terendah merupakan satu kesatuan dalam susunan yang teratur (*samenhangende eenheid*) dan logis (*logische stufenbau*), sehingga tidak ada pertentangan atau kontradiksi.

Pendapat Hans Kelsen bahwa norma hukum selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jejang dikuatkan pula oleh Hans Nawiasky. Dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, ia juga berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jejang, norma-norma hukum juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yakni:<sup>57</sup>

- a. *Staatsfundamentalnorn* (Norma Fundamental Negara);
- b. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);
- c. *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);
- d. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

---

<sup>56</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hal. 26, lihat juga: Tundjung Herning Sitabuana, *Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina: Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 60.

<sup>57</sup> Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, (Einseideln / Zurich / Koln: Benziger, 1948), hal. 31 dan seterusnya, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *op.cit.*, hal. 44-45.

Sekalipun mempunyai istilah yang berbeda dalam setiap kelompoknya, kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara.

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa dalam norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam suatu kehidupan sosial melalui norma-norma hukum yang diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar, dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi.

Sebagaimana dipahami bahwa dalam setiap sistem hukum terdiri atas norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-



jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok. Tak terkecuali dalam sistem hukum Indonesia, norma-norma hukum yang ada tersusun pula secara berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, dimana suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar (*Grundnorm*) dan norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia yakni Pancasila.<sup>58</sup>

Adapun secara garis besar, hierarkhi dalam sistem hukum nasional adalah sebagai berikut: Pancasila merupakan Norma Dasar sekaligus Norma Fundamental Negara (*Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm*), yang merupakan norma hukum tertinggi; selanjutnya berturut-turut diikuti oleh Pasal-Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, serta hukum dasar tidak tertulis atau konvensi ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*)<sup>59</sup>; Undang-Undang (*Formell Gesetz*); Peraturan Pelaksanaan yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 44. Berbeda dengan pendapat Maria Farida, Arief Hidayat berpendapat bahwa Pancasila merupakan Norma Dasar (*Grundnorm*), sedangkan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*). Arief Hidayat, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, dalam wawancara, Semarang, 21 Agustus 2012, izin mengutip telah diberikan.

<sup>59</sup> Sebagai *Staatsgrundgezets*, UUD RI 1945 merupakan *Verfassungsnorm* karena ditempatkan dalam satu dokumen negara, dan Ketetapan MPR merupakan *Grundgesetznorm* karena dituangkan dsecara tersebar dalam beberapa dokumen negara. Lihat: *Ibid.*, hal. 48.

peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom lainnya (*Verordnung & Autonome Satzung*).<sup>60</sup>

Berdasarkan hierarkhi tersebut maka dasar hukum yang dijadikan pedoman atau sumber legitimasi sehingga seluruh norma hukum atau peraturan perundang-undangan (hukum positif) harus bersumber dan berdasar, serta oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengannya adalah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila sebagai *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorn* bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat merupakan tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya. Pancasila juga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya, sehingga perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi<sup>61</sup> sebagai suatu hipotesa, dan suatu yang aksioma atau diterima sebagai suatu kebenaran. Hal tersebut

---

<sup>60</sup> Lihat: *Ibid.*, hal. 45-56.

<sup>61</sup> Pancasila merupakan kesepakatan para *founding fathers* dalam mendirikan negara Indonesia dan mempersatukan bangsa Indonesia, yang berisi *core value* bangsa dan negara Indonesia, yang apabila dapat diubah atau diperdebatkan merupakan suatu kemunduran dari perjalanan bangsa dan Negara Indonesia. Arief Hidayat, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, dalam wawancara, Semarang, 27 September 2012, izin mengutip telah diberikan.

Kesepakatan menerima Pancasila sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi juga Nampak dan ditegaskan dalam Kesepakatan dasar perubahan UUD 1945 yang salah satu butirnya menegaskan bahwa “tidak mengubah Pembukaan UUD 1945”. Hal tersebut dikarenakan Pembukaan UUD 1945 yang berintikan Pancasila memuat dasar filosofis dan dasar normative yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945. Pancasila merupakan *staatsidee* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan Negara, serta dasar Negara yang senantiasa harus dipertahankan. Lihat: Sekretaris Jenderal MPR RI, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Setjen MPR RI, 2003), hal. 25, lihat juga: Sekretaris Jenderal MPR RI, *Bahan Tayangan: Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Setjen MPR RI, 2006), hal. 1.

dibutuhkan sebagai pengikat lapis-lapis bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri kepadanya.<sup>62</sup>

Dalam kaitannya dengan pendapat Satjipto Rahardjo sebagaimana diuraikan dimuka mengenai asas hukum, maka dapat dipahami bahwa Pancasila sebagai pengikat lapis-lapis bangunan tata hukum Indonesia (sistem hukum nasional) merupakan asas hukum nasional yang merupakan cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat yang oleh karenanya hendak dijabarkan dalam norma hukum atau peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang lebih rendah. Hal tersebut berarti bahwa dalam setiap penyusunan / pembuatan setiap norma hukum atau peraturan perundang-undangan (hukum positif) wajib selalu berpedoman dan bersumber pada Pancasila sebagai dasar politik hukum atau *legal policy*. Dengan berpedoman pada Pancasila maka akan terbentuk kondisi ideal dimana norma hukum atau peraturan perundang-undangan (hukum positif), baik *ius constitutum* maupun *ius operatum*, taat asas, sehingga ideal bagi bangsa dan negara Indonesia serta mengabdikan pada kepentingan nasional. Apabila dalam kenyataannya terjadi kondisi dimana norma hukum atau peraturan perundang-undangan (hukum positif), baik *ius*

---

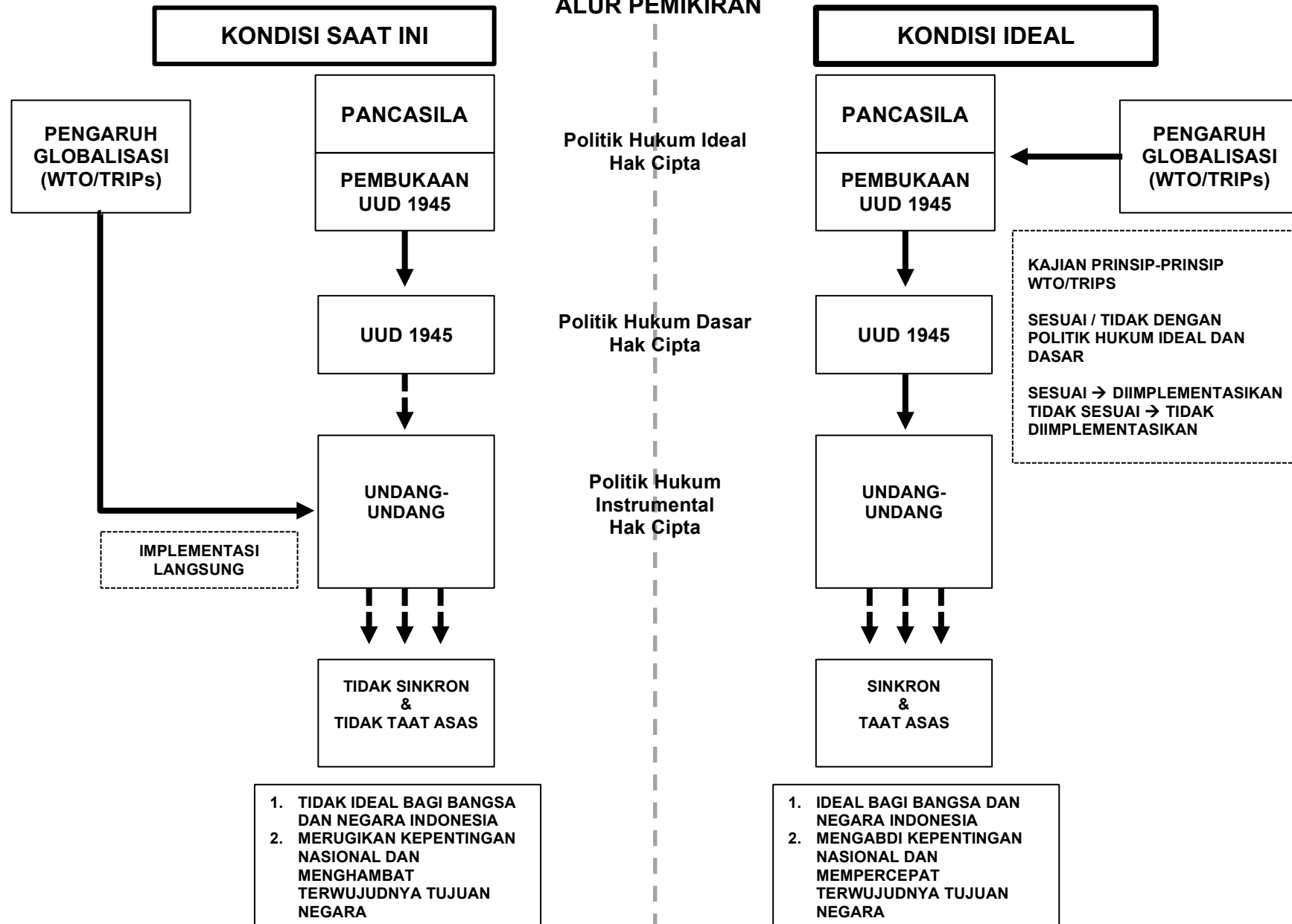
<sup>62</sup> Maria Farida Indrati S., *op.cit*, hal. 46-47

*constitutum* maupun *ius operatum*, tidak taat asas dan tidak konsisten dengan *legal policy* yang ada maka akan hukum yang ada dapat menghambat tercapainya tujuan negara dan merugikan kepentingan nasional.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> lihat: Tundjung Herning Sitabuana, *op.cit.*, hal. 63-64.

Bagan 1.1. Alur Pemikiran



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*).

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai:<sup>64</sup>

“Suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.”

Morris L. Cohen menyatakan bahwa *“legal research is the process of finding the law that governs activities in human society.”* Cohen juga menyatakan bahwa *“it involves locating both the rules are enforced by states and commentaries which explain or analyze these rules.”*<sup>65</sup>

Dalam praktiknya terdapat dua jenis penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa:<sup>66</sup>

“Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 38.

<sup>65</sup> Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research*, (St. Paul Minn.: West Publishing, 1992), hal. 1, sebagaimana dikutip dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 29.

<sup>66</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24, sebagaimana dikutip dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), hal. 109-110.

kepastakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat”

Dalam kaitannya dengan jenis-jenis (tipologi) penelitian hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:<sup>67</sup>

“Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama; Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua; Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.”

Berdasarkan batasan-batasan para ahli sebagaimana dijelaskan di muka maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif karena berupaya menemukan asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta.

Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini akan digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan filosofi (*philosophical approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk meneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hal. 51, sebagaimana dikutip dalam Mukti Fajar ND, *Ibid.*, hal. 109, lihat juga: Bambang Sunggono, *op.cit.*, hal. 42-43.

Indonesia serta peraturan-perundang-undangan terkait dengan politik hukum nasional. Pendekatan filosofi (*philosophical approach*), digunakan untuk meneliti dan mengkaji filosofi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di Indonesia. Pendekatan sejarah (*historical approach*), dilakukan dengan cara menelusuri perkembangan Politik Hukum Hak Cipta di Indonesia. Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan di dalam hasil penelitian akan dapat tersaji pembahasan mengenai Politik Hukum Hak Cipta yang komprehensif.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan deskripsi tersebut kemudian dilakukanlah suatu analisis apakah Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang pernah dan tengah berlaku sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta. Disamping bersifat deskriptif analitis, penelitian ini juga bersifat deskriptif.



Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini dilakukan penilaian atas ketaatan substansi hukum pada struktur hukum secara hierarkhis.<sup>68</sup>

### **3. Jenis Data**

Sesuai dengan metode penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka sumber data yang menjadi tumpuan utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yakni semua bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:
  - 1) Pancasila;
  - 2) UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD NRI Tahun 1945;
  - 3) Sejumlah peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Hak Cipta;
  - 4) Konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yakni semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:
  - 1) Buku-buku;

---

<sup>68</sup> Mukthie Fajar ND, *loc.cit.*, hal. 28 dan 131.

- 2) Pendapat ahli dari surat kabar dan majalah;
- 3) Hasil-hasil penelitian;
- 4) Hasil Karya Ilmiah;
- 5) Jurnal-jurnal;
- 6) Artikel dari internet.

Adapun teori-teori yang didapatkan dari bahan-bahan hukum sekunder akan digunakan untuk memperjelas konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer.

- c. Bahan-bahan hukum tersier, yakni semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus umum (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Belanda), kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai kamus lain yang berkaitan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yang tersebar di dalam berbagai literatur. Studi pustaka dilakukan dengan menyeleksi data sekunder yang

kemudian disusun sebagai data hasil penelitian secara sistematis dan logis sehingga nampak adanya keterkaitan antara bahan-bahan hukum yang ada yang memberikan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>69</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Dari seluruh data yang terkumpul dilakukan analisa data sekunder dengan metode analisis isi normatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis isi<sup>70</sup> normatif adalah suatu metode analisis yang dilakukan dengan melakukan abstraksi atas asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang diteliti, menilai taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan membandingkan peraturan perundang-undangan dari suatu periode dengan periode lainnya.<sup>71</sup>

Metode analisis kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dengan metode analisis kualitatif data sekunder yang ada diuraikan,

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 128.

<sup>70</sup> Metode analisis isi (*content analysis*) adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Metode analisis isi yang berfokus pada definisi operasional dan kuantifikasi dari *dependent variables*, terkadang juga *independent variables* ini pada awalnya dipergunakan dalam penelitian kuantitatif, yang dalam perkembangannya kemudian juga dipergunakan dalam penelitian kualitatif. Natasya Yunita Sugiastuti, *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial 1870-1942)*, Cetakan 1, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 19-21, sebagaimana dikutip dalam Tundjung Herning Sitabuana, *op.cit*, hal. 84.

<sup>71</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *loc.cit*.

diidentifikasi, disusun, dan diolah serta diuraikan secara sistematis, kemudian dianalisa dengan cara dijabarkan dan diinterpretasikan dengan penafsiran sistematis – historis, dan disusun secara sistematis – logis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh tersebut diambil ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif dan disajikan dalam bentuk tesis.<sup>72</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Karya ilmiah berbentuk tesis ini terdiri dari empat bab yang diawali oleh Bab I yang berjudul “Pendahuluan”. Pada bab yang merupakan dasar bagi bab-bab berikutnya ini diuraikan Latar Belakang Penelitian, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian (yang terdiri dari Manfaat Teoretik dan Manfaat Praktis), Kerangka Pemikiran (yang terdiri dari Kerangka Konseptual yang meliputi Pengertian Hak Cipta dan Pengertian Politik Hak Cipta; serta Kerangka Teori), Metode Penelitian (yang terdiri dari Pendekatan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data), serta Sistematika Penulisan.

Selanjutnya adalah Bab II yang berjudul “Tinjauan Pustaka” diuraikan mengenai Teori Hak Cipta dan Teori Politik Hukum.

---

<sup>72</sup> Mukthie Fajar ND, *op.cit.*, hal. 130.

Dalam Bab III yang berjudul “Hasil Penelitian dan Pembahasan” akan diuraikan mengenai Politik Hukum Ideal dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta; Perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta; serta Pembangunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional Pada Masa Yang Akan Datang.

Terakhir adalah Bab IV berjudul “Penutup” diuraikan simpulan dari seluruh permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan dilengkapi dengan rekomendasi yang diajukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Cipta

##### 1. Sejarah Lahirnya Perlindungan Hak Cipta

Benih-benih perlindungan hukum Hak Cipta sejatinya telah muncul jauh sebelum terselenggaranya *Bern Convention* 1886.<sup>71</sup> Berdasarkan beberapa literatur yang membahas mengenai Hak Cipta dinyatakan bahwa pada tahun 567 *Anno Dominum* telah terjadi suatu peristiwa yang berkaitan erat dengan Hak Cipta yang dikenal dewasa ini. Pada masa itu, seorang biarawan Columba diketahui menyalin karya tulis dalam kitab mazmur ciptaan gurunya Abbot Finian, secara diam-diam tanpa izin. Permasalahan tersebut akhirnya diketahui *King Diarmid*, seorang raja yang berkuasa pada masa itu. *King Diarmid* kemudian memerintahkan pada Columba untuk menyerahkan salinan yang ia buat kepada Abbot Finnian dan melarangnya untuk melakukan lagi perbuatan tersebut melalui perintahnya yang terkenal “*to every cow her calf and to every book it's copy*”.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Konvensi Bern 1886 dipandang sebagai tonggak awal perlindungan Hak Cipta modern karena bersifat internasional dan lebih terstruktur, lihat: Raditya Adi Nugraha, *Tarik Menarik Antara Aktor Negara dan Non Negara dalam Penerapan Rezim Internasional Tentang Lisensi Software (Studi Kasus MoU Microsoft – RI)*, Tesis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 46.

<sup>72</sup> Paul Goldstein, *Copyrights Highway, The Law and Lore of Copyright from Gutenberg to the Celestial Jukebox*, (Canada: Harper Collins, 1994), hal. 39, David Bainbridge, *Cases and Materials In Intellectual Property Law*. (London: Pitman

Perintah dalam bahasa kiasan tersebut secara harfiah memiliki arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Columba merupakan apa yang saat ini dikenal sebagai penjiplakan sebagai suatu tindakan terlarang. Tindakan Columba merupakan suatu tindakan yang terlarang berdasarkan apa yang dititahkan oleh *King* Diarmid. Berdasarkan peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya kesadaran dan upaya untuk melindungi Hak Cipta telah ada jauh sebelum lahirnya perlindungan Hak Cipta modern dalam arti formal melalui suatu produk hukum.

Dalam perkembangannya, pembahasan mengenai sejarah lahirnya perlindungan Hak Cipta tidak akan bisa dilepaskan dari dua tradisi hukum yang mendominasi dunia yakni *Common Law system* dan *Civil Law system*. Hal tersebut tidak hanya menyangkut perbedaan pengistilahan Hak Cipta, akan tetapi juga menyangkut perbedaan filosofi perlindungan Hak Cipta yang dipengaruhi baik oleh doktrin-doktrin hukum yang melekat pada kedua tradisi hukum tersebut maupun sejarah perkembangan Hak Cipta dan perlindungan terhadap Hak Cipta pada masing-masing tradisi hukum tersebut. Perbedaan inilah yang pada akhirnya membawa perbedaan dalam perlindungan Hak Cipta diantara keduanya.

---

Publishing, 1995), hal. 28, Richard Wincor, *et.al.*, *Copyright, Patent, and Trademarks: The Protection of Industrial Property*, (New York: Oceana Publications Inc., 1980), hal. 33, sebagaimana dikutip dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2009), hal. 42.

**a. Tradisi Common Law System**

Dalam *Common Law System*, pesatnya perkembangan perlindungan Hak Cipta diawali pada saat ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg di Jerman pada tahun 1455 yang kemudian dilanjutkan dengan penemuan *printing press* yang merupakan pengembangan mesin cetak konvensional oleh William Caxton di Inggris pada tahun 1478. Sebelum ditemukannya mesin cetak yang merupakan alat produksi untuk memperbanyak ciptaan, dasar moral merupakan satu-satunya alasan dasar dilindunginya hak cipta seorang pencipta. Hal tersebut dikarenakan disatu sisi bahwa dengan ditemukannya mesin cetak seorang pencipta dapat memperbanyak karya tulis ciptaannya dengan mudah dan dalam jumlah yang banyak, yang kemudian dijual kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari penjualan tersebut. Namun demikian disisi lain, penjiplak juga dapat melakukan hal yang sama. Perbuatan para penjiplak atau plagiator inilah yang merugikan kepentingan pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaannya.<sup>73</sup>

Ditemukannya pengembangan mesin cetak di Inggris telah mendorong pesatnya pertumbuhan usaha percetakan

---

<sup>73</sup> Lihat: *Ibid.*, hal. 43.



di negara tersebut pada masa itu. Akibatnya muncul beberapa masalah dalam kaitannya dengan perbanyakan karya tulis, semisal siapakah yang berhak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil penjualan karya tulis hasil cetakan tersebut? Apakah pengarang atau pencipta karya tulis atautkah penerbit yang memperbanyak dan membiayai perbanyakan karya tulis?<sup>74</sup>

Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, pada tahun 1518, kerajaan memberikan hak istimewa kepada Richard Pynson. Hak istimewa tersebut diberikan dalam bentuk hak untuk mencetak naskah pidato dan melarang pihak lain untuk mencetak naskah pidato. Pada masa ini, praktis hak istimewa diberikan dan dinikmati oleh perusahaan percetakan.<sup>75</sup>

Dalam perkembangannya satu dekade kemudian lahir suatu undang-undang yang dikenal dengan *Act of 1529*. Pada masa itu Raja Henry VIII membentuk suatu perhimpunan perusahaan penerbit, percetakan, penjilid, dan toko buku yang dinamakan *The Stationers Company*. Melalui dukungan parlemen dan kerajaan sebagaimana diwujudkan dengan *Act of 1529, The Stationers Company*, diberikan hak monopoli pencetakan buku. Alhasil hanya

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 44.

<sup>75</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hal. 54.

perusahaan-perusahaan tertentu anggota *The Stationers Company* yang mempunyai hak untuk melakukan perbanyakan (pencetakan) dan penerbitan karya tulis yang ada dalam bentuk buku. Kegiatan pencetakan dan penerbitan buku wajib didahului dengan pendaftaran judul buku yang akan dicetak pada perhimpunan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa karakteristik Hak Cipta pada kedua masa tersebut lebih condong sebagai suatu *privilege*.<sup>76</sup>

Setelah berlangsung lebih dari satu abad, pada tahun 1709 monopoli yang dimiliki oleh *The Stationers Company* akhirnya berakhir dengan diundangkannya *Statute of Anne*. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari berakhirnya monopoli *The Stationers Company* melalui diundangkannya *Statute of Anne*, pertama, disebabkan oleh maraknya pembajakan berbagai karya tulis cetakan para perusahaan anggota *The Stationers Company*,<sup>77</sup> kedua, dipersoalkannya hak monopoli sebagai *privilege* yang dimiliki oleh *The Stationers Company* oleh para pencipta karya tulis atau pengarang dikarenakan dalam cenderung merugikan kepentingan dari para pengarang.<sup>78</sup> *Statute of Anne* diketahui sebagai undang-undang Hak Cipta pertama

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 55-56.

<sup>77</sup> Eddy Damian, *op.cit.*, hal. 45.

<sup>78</sup> Bernard Nainggolan, *op.cit.*, hal. 56.

di dunia. Dalam *Statute of Anne* dinyatakan bahwa pencipta buku adalah satu-satunya pemilik hak untuk menerbitkan dan mencetak bukunya. Hal tersebut berarti bahwa negara -Kerajaan Inggris- memberikan hak istimewa pada pengarang untuk mengeksploitasi ciptaannya dalam jangka waktu tertentu. Bagi Inggris sendiri, diundangkannya *Statute of Anne* telah membawa perkembangan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal tersebut mengilhami Kongres Amerika Serikat untuk menyalin *Statute of Anne* ketika merumuskan undang-undang Hak Cipta di Amerika Serikat pada tahun 1790. Dalam sejarah perkembangan perlindungan Hak Cipta, *Statute of Anne* memiliki kedudukan yang sangat penting dikarenakan memberikan dasar diakuinya hak-hak pencipta atas ciptaannya, terutama dalam kaitannya dengan aspek ekonomi dari suatu ciptaan.<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian di muka maka dalam tradisi *Common Law System*, objek utama yang menjadi titik tolak perlindungan Hak Cipta adalah ciptaan atau karya cipta. Adapun dasar perlindungan Hak Cipta yang mengemuka dilatarbelakangi oleh rasionalitas ekonomi. Hal tersebut nampak jelas dalam *Act of 1529* yang bermaksud

---

<sup>79</sup> *Loc.cit.*

memberikan insentif bagi penerbit yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya serta mengambil resiko kerugian dalam memasarkan produk cetakannya.<sup>80</sup> Alasan rasionalitas ekonomi juga mendasari lahirnya *Statute of Anne* sebagai hasil perjuangan para pencipta atau pengarang untuk mendapatkan hak lebih atas karya tulisnya sehingga para pencipta lebih termotivasi untuk menciptakan karya-karya tulis baru lainnya guna mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Dari latar belakang pemikiran tersebut maka perlindungan Hak Cipta dalam *Common Law System* lebih condong pada aspek ekonomi ketimbang aspek moral sehingga lebih tepat dikatakan sebagai instrumen ekonomi ketimbang instrumen hukum, oleh karenanya Hak Cipta diistilahkan sebagai *Copyright* atau *Right to Copy*.

Latar belakang rasionalitas ekonomi yang mendasari perlindungan ekonomi juga nampak jelas dalam perlindungan Hak Cipta di Amerika Serikat sebagai negara penganut *Common Law System*. Hal tersebut tidak lain karena *Copyright Act of 1790* yang merupakan undang-undang Hak Cipta pertama di Amerika merupakan salinan

---

<sup>80</sup> David I. Bainbridge, *Intellectual Property, Third Edition*, (London: Pitman Publishing, 1996), hal. 34, sebagaimana dikutip dalam Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 23.

dari *Statute of Anne*. Disamping itu paham Utilitarian<sup>81</sup> telah membawa pengaruh besar pada Amerika Serikat dalam memandang perlindungan Hak Cipta yakni bahwa perlindungan terhadap kepentingan ekonomi ciptaan merupakan pokok perlindungan dibandingkan melindungi kepentingan penciptanya secara berlebihan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam pandangan Amerika Serikat, Hak Ekonomi atas ciptaan lebih menonjol dari Hak Moral pencipta. Pandangan tersebut juga membawa konsekuensi pada dasar filosofis perlindungan Hak Cipta yang bukan berasal dari Hak-hak Alamiah (*Natural Rights*), akan tetapi merupakan sesuatu yang

---

<sup>81</sup> Paham Utilitarian atau dikenal pula dengan paham Individualisme – Utilitarian adalah paham yang dimotori oleh Jeremy Bentham (1733-1804). Paham ini berdasar pada dalil "*The greatest happiness for the greatest number*" sehingga dikenal pula dengan "*The greatest happiness principle*". Jeremy Bentham menganggap bahwa apa yang cocok untuk kepentingan individu adalah apa yang cenderung dapat memberikan kebahagiaan. Demikian pula dengan apa yang cocok untuk kepentingan masyarakat adalah apa yang cenderung dapat menambah kesenangan individu. Dasar itulah yang wajib menjadi titik tolak dalam menata kehidupan manusia, dalam hal ini termasuk hukum. Oleh karenanya, hukum harus melindungi hak-hak individu dalam kerangka memenuhi kebutuhannya dan mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap individu.

Bentham juga mengatakan bahwa individu harus paham titik toleransi yang harus dipertahankan, yakni ketika tiap orang menjaga dirinya sendiri, ketika tiap orang tahu hak dan kewajibannya sebagai sesama individu yang membutuhkan kebahagiaan, dan ketika tiap orang sadar bahwa tiada seorangpun yang ingin menderita, maka kepentingan umum akan terjamin pula. Oleh karenanya menurut Bentham, hukum harus mampu menopang penghidupan materi yang cukup bagi tiap individu, mendorong persamaan, memelihara keamanan, dan meraih hak milik.

Dalam paham Utilitarian, dikenal pula empat credo dalam mewujudkan semangat persaingan sehat (*fair*), yakni hak untuk hidup; hak untuk bebas; hak untuk memiliki; dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Lihat: Bernard L. Tanya, *et.al.*, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal.90-93.

diberikan oleh negara melalui undang-undang yang berupa *Property Rights*.<sup>82</sup>

**b. Tradisi Civil Law System**

Perkembangan perlindungan Hak Cipta di Perancis sebagai kiblat dari tradisi *Civil Law System* bisa dikatakan berjalan lebih lambat jika dibandingkan dengan perkembangan perlindungan Hak Cipta di Inggris sebagai kiblat dari tradisi *Civil Law System*. Namun demikian pada dasarnya landasan sejarah lahirnya perlindungan Hak Cipta Perancis dan Inggris adalah sama yakni muncul dari reruntuhan praktek monopoli negara -kerajaan- dan lembaga sensor atas karya tulis yang ada.<sup>83</sup> Berbeda dengan *Common Law System*, dalam *Civil Law System* dasar perlindungan Hak Cipta yang mengemuka dilatarbelakangi oleh alasan moral. Hal tersebut nampak jelas terlihat pada objek utama yang menjadi titik tolak perlindungan Hak Cipta adalah hak pencipta atau hak pengarang. Doktrin hak moral tersebut memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol ciptaannya dan melarang orang lain, termasuk penerbit, untuk mengubah ciptaannya kedalam bentuk apapun yang dapat berakibat

---

<sup>82</sup> Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 114.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 106, lihat juga Bernard Nainggolan, *op.cit.*, hal. 57.

buruk pada reputasi karya maupun penciptanya.<sup>84</sup> Hak pencipta tersebut sejatinya bersumber dari *droit d'auteur* (hak pencipta) dalam Undang-undang Hak Cipta Perancis.

Dalam kaitannya dengan titik tolak perlindungan Hak Cipta pada hak pencipta atau hak pengarang dalam tradisi *Civil Law System* telah membawa konsekuensi pada persyaratan asal ciptaan dan persyaratan keaslian ciptaan (*originality*). Persyaratan asal muasal ciptaan merupakan parameter untuk menguji tingkat kreativitas pencipta melalui ide atau inspirasinya. Persyaratan keaslian merupakan suatu petunjuk untuk memastikan lingkup hak pencipta dalam substansi ciptaannya.<sup>85</sup>

Doktrin hak moral yang mengakar dalam perlindungan Hak Cipta pada *Civil Law System* sejatinya berakar pada doktrin-doktrin hukum alam yang dikemukakan oleh para pemikir hukum alam seperti John Locke. Dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties on Civil Government*, John Locke menyatakan bahwa hukum tidak lagi diturunkan dari Tuhan, namun diturunkan dari alam kodrat dan berdasarkan rasio, oleh karenanya kekuasaan penguasa bukanlah kekuasaan mutlak yang berasal dari Tuhan, akan tetapi bersifat tidak

---

<sup>84</sup> Budi Santoso, *op.cit.* hal. 106.

<sup>85</sup> Rahmi Jened, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hal. 70, sebagaimana dikutip Henry Soelistyo, *op.cit.*, hal. 28.

mutlak didasarkan pada hukum alam. John Locke juga menyatakan keadaan tersebut sebagai keadaan alamiah yang menurutnya telah ada sebelum adanya suatu negara. Dalam keadaan alamiah tersebut manusia memiliki suatu hak alamiah seperti hak akan hidup, kebebasan, serta kemerdekaan, hak milik, dsb. Hal tersebut berarti pula bahwa secara kodrati manusia telah memiliki hak-hak alamiah sejak dilahirkan, hak-hak alamiah tersebut kini dikenal dengan sebutan hak-hak asasi.<sup>86</sup>

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta, John Locke menyatakan bahwa:

“Hukum Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.”

Pemikiran John Locke mengenai Hak Cipta tersebut sejatinya merupakan bentuk perlawanan terhadap hegemoni feodalisme dalam memonopoli suatu karya cipta. John Locke menegaskan bahwa Hak Cipta merupakan suatu hak asasi yang melekat erat pada seorang pencipta dan tidak bisa diganggu gugat. Oleh karenanya secara kodrati, seorang pencipta memiliki hak untuk mempertahankan dan mengawasi karya-karya ciptaannya,

---

<sup>86</sup> Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 111.



serta hanya penciptalah yang layak untuk mendapatkan kompensasi yang adil atas kontribusinya pada masyarakat.<sup>87</sup>

Penegasan bahwa doktrin hukum alam sebagai justifikasi Hak Cipta juga ditemukan dalam literatur-literatur modern. Stainforth Ricketson menyatakan:<sup>88</sup>

“.... it has been popular argue, particularly in **Continental Jurisdictions**, that a person has a natural property right in creation of his mind. Thus, it is said, a person has a natural right to the product of his labor and this should be recognised as his property, whether tangible or intangible.”

Demikian pula Marshall Leafer, menyatakan bahwa:<sup>89</sup>

“The natural law justification for recognizing property rights in work of authorship is based on the rights of authors to reap the fruits of their creation, to obtain rewards for their contributions to society, and to protect the integrity of their creations as extensions of their personalities.”

Berdasarkan pernyataan Marshall Leafer, dapat dipahami bahwa Hak Cipta selain berdasar pada doktrin hukum alam, Hak Cipta juga berkaitan dan merupakan *personality* atau bentuk karakter dan personifikasi seorang pencipta.<sup>90</sup> Hal tersebut semakin menegaskan bahwa Hak Moral yang melekat pada suatu ciptaan merupakan hak

---

<sup>87</sup> Lihat: Bernard Nainggolan, *op.cit.*, hal. 66.

<sup>88</sup> Stainford Ricketson, *The Law of Intellectual Property*, (Sidney: The Law Book Company, 1984), hal. 6, sebagaimana dikutip Bernard Nainggolan, *op.cit.*, hal. 64.

<sup>89</sup> Marshall Leafer, *Understanding Copyright Law, Second Edition*, (Matthew Bender & Company, 1995), hal. 77, sebagaimana dikutip *Loc.cit.*

<sup>90</sup> Lihat: Henry Sulisty Budi, *op.cit.* hal. 27-28, lihat juga Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 110.

yang bersifat abadi (*perpetual*), tidak dapat dicabut (*inalienable*), serta mengalir sebagai warisan pada pencipta, bahkan ketika ciptaan tersebut telah dialihkan secara ekonomi pada pihak lainnya.<sup>91</sup>

Dalam perkembangannya, doktrin hukum alam sebagai dasar perlindungan Hak Cipta sebagaimana yang dianut negara-negara dengan tradisi *Civil Law System* lebih dapat diterima dan mendapatkan dukungan oleh beberapa negara di dunia. Hal tersebut nampak pada besarnya pengaruh doktrin hukum alam dalam Bern Convention sebagai tonggak awal perlindungan Hak Cipta modern, sekalipun dalam perkembangannya pada *TRIPs Agreement* aspek ekonomi menjadi jauh lebih menonjol. Namun demikian secara umum konsep perlindungan Hak Cipta bersifat universal, sebagaimana ditegaskan dalam Article 27 par. 2 *Universal Declaration of Human Right 1947* bahwa:<sup>92</sup> “*Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*”

---

<sup>91</sup> Lihat: Budi Santoso, *Loc.cit.*

<sup>92</sup> <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a27>.

## **2. Perlindungan Hak Cipta Dalam Berbagai Perjanjian Internasional**

Berdasarkan sejarah lahirnya perlindungan Hak Cipta sebagaimana diuraikan dimuka, maka dapat dipahami bahwa lahirnya perlindungan Hak Cipta sejatinya didorong oleh perkembangan kemampuan intelektual manusia. Disamping itu lahirnya perlindungan Hak Cipta juga didorong oleh besarnya kebutuhan manusia (masyarakat) atas karya intelektual manusia sehingga menjadi sangat penting bagi pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas ciptaannya. Oleh karenanya, perlindungan Hak Cipta yang dikenal dewasa ini bermula di negara-negara barat yang terlebih dulu mengecap kemajuan dibandingkan dengan negara-negara timur yang lahir sesudahnya. Hal tersebut semakin ditegaskan oleh internasionalisasi perlindungan Hak Cipta yang dimulai oleh negara-negara barat, khususnya negara-negara Eropa.<sup>93</sup>

Negara-negara Eropa sebagai negara-negara yang telah terlebih dahulu mengecap kemajuan memiliki kepentingan untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimilikinya beserta potensi ekonomi yang melekat padanya. Oleh karenanya, negara-negara Eropa mendorong untuk dilakukannya internasionalisasi perlindungan Hak Cipta. Internasionalisasi perlindungan Hak

---

<sup>93</sup> Lihat: Bernard Nainggolan, *op.cit.*, hal. 108-109.

Cipta dilakukan dengan mengadakan berbagai perjanjian internasional yang mengatur mengenai Hak Cipta serta hal-hal yang berkaitan dengan Hak Cipta. Pada intinya internasionalisasi perlindungan Hak Cipta menghendaki terciptanya persamaan standar antar negara-negara anggota perjanjian dalam memberikan perlindungan Hak Cipta. Sebagaimana dipahami pula bahwa berdasarkan *International Court of Justice*, perjanjian merupakan salah satu sumber pokok hukum internasional.<sup>94</sup> Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut:

**a. Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)**

Internasionalisasi perlindungan Hak Cipta mendapatkan wadahnya melalui ditandatanganinya Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Bern Convention) pada 9 September 1886, di kota Bern, Swiss. Pada mulanya terdapat sepuluh negara peserta asli (original members) yang menandatangani konvensi ini yakni: Belgia, Perancis, Jerman, Inggris, Haiti, Italia, Liberia, Spanyol, Swiss, dan Tunisia, serta oleh tujuh Negara, yakni Denmark, Jepang, Luksemburg, Monako, Montenegro, dan Swedia.<sup>95</sup> Bersamaan dengan ditandatanganinya Bern Convention, didirikan pula Bern

---

<sup>94</sup> Lihat: Article 38 ICJ Statute.

<sup>95</sup> Eddy Damian, Op. Cit., halaman 53.

Union, sebuah organisasi internasional yang bertugas melindungi karya cipta di bidang seni dan sastra.

Latar belakang diselenggarakannya Bern Convention tercantum dalam Mukadimah naskah asli Bern Convention yang menyatakan bahwa:

*“... being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works.”*

Adapun Arpad Bogisch mengatakan bahwa secara filosofis Bern Convention muncul karena alasan keadilan. Arpad Bogisch menyatakan bahwa:

*It is behaved that the underlying reason is sense of justice. Justitia fundamentum rei publicae. Justice is the foundation of the republic. Without its preservation, no government can survive.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa latar belakang diselenggarakannya Bern Convention yakni adanya keinginan untuk melindungi hak-hak penulis (pengarang) atas karya seni dan sastra mereka melalui cara yang efektif dan seragam, serta adanya sebuah nilai keadilan yang hendak dicapai bersama dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersebut.

Bern Convention juga mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta bagi negara-negara yang tergolong sebagai negara berkembang. Ketentuan tersebut

merupakan hasil revisi di Stockholm, tahun 1967.<sup>96</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, negara-negara berkembang pada waktu melakukan ratifikasi atau akses dapat memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu yang merupakan *Faculties Open to Developing Countries*, berupa hak melakukan penerjemahan dan hak melakukan reproduksi.<sup>97</sup> Adapun hak-hak eksklusif yang diatur dalam Bern Convention meliputi hak terjemahan, hak mempertunjukkan drama di depan publik, karya drama musikal dan karya musik, hak untuk menyiarkan, hak untuk reproduksi dalam bentuk apapun, hak untuk membuat gambar hidup dari karya, serta hak untuk adaptasi.

#### **b. Universal Copyright Convention**

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa di dunia ini dikenal dua tradisi hukum yang mendominasi dunia yakni Common Law system dan Civil Law system. Dua tradisi hukum yang berbeda secara filosofis tersebut membawa konsekuensi pada perbedaan masing-masing negara penganutnya dalam memberikan perlindungan Hak Cipta. Hal tersebut sebagaimana tecermin dalam internasionalisasi perlindungan Hak Cipta, dimana negara-

---

<sup>96</sup> Teks asli Bern Convention telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan *pertama* terjadi tahun 1908 di Berlin, *kedua* tahun 1928 di Roma, *ketiga* tahun 1948 di Brusel, *keempat* tahun 1967 di Stockholm, dan *kelima* tahun 1972 di Paris. Lihat: Bernard Nainggolan, *Op. Cit.*, hal. 112.

<sup>97</sup> Lihat: *Article 21 Bern Convention*, lihat juga: Eddy Damian, *op.cit.*, hal. 60.

negara Eropa Kontinental penganut Civil Law System beserta Inggris bergabung dalam Bern Convention, sedangkan Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin mengadakan konvensi-konvensi Hak Cipta regional. Konvensi-konvensi regional yang dimaksud antara lain adalah Inter American Convention on the Rights of The Authors in Literary, Scientific and Artistic Works 1905, dan Buenos Aires Convention 1910 yang direvisi di Havana 1928 dan Washington 1946.<sup>98</sup>

Dalam upaya memajukan perlindungan Hak Cipta serta menjembatani adanya perbedaan standar antara Eropa dan Amerika dalam memberikan perlindungan Hak Cipta maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), memprakarsai diselenggarakannya konvensi internasional Hak Cipta di Geneva, Swiss, yang dikenal dengan Universal Copyright Convention (UCC) pada 6 September 1952 yang kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi pada 16 September 1955. Sehubungan dengan adanya upaya dari PBB tersebut, maka Paul Goldstein berpendapat bahwa UCC merupakan:

---

<sup>98</sup> Lihat: Eddy Damian, *ibid.*, hal. 61, lihat juga: Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hal. 41.

*A new common dinamisator convention that was intended to establish a minimum level of international copyrights relations throughout the world, without weaking or supplanting the Bern Convention.*

### **c. The Rome Convention**

The Rome Convention diselenggarakan pada tahun 1961 melalui prakarsa dari Bern Union dalam rangka untuk memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompokkan dengan nama Hak-Hak Terkait (*Neighboring Rights/Related Rights*).<sup>99</sup> Peserta dari konvensi ini sampai dengan Desember 2004 berjumlah 73 negara.

Adapun tujuan dari diadakannya Konvensi ini adalah untuk menetapkan peraturan secara internasional perlindungan terhadap tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak terkait. Tiga kelompok pemegang hak cipta tersebut yakni:<sup>100</sup>

- 1) Artis-artis pelaku atau performer (*Performing Artists*)

---

<sup>99</sup> Diberi nama hak-hak terkait karena hak ini sangat berkaitan dengan hak-hak atas ciotaan seorang pencipta di bidang seni dan sastra. Yang dimaksud dengan hak terkait yakni misalnya hak-hak para artis pelaku (*performing artist*) yang dapat terdiri dari para penyanyi, aktor, musisi, dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik suatu pertunjukan hidup (*live performance*), fiksasi dari pertunjukan demikian dan perbanyakannya (reproduksi) dari pertunjukan-pertunjukannya. Juga para produser rekaman suara (*producer of sound recordings/phonograms*) menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang diperbanyak oleh produser rekaman suara yang sah atau tidak sah. Lihat: Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 67.

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 68.



Artis-artis pelaku (*performers*), yang terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni, dilindungi terhadap tindakan tertentu yang tidak mereka setuju. Tindakan tersebut misalnya penyiaran dan mengadakan pertunjukan hidup (*live performance*) kepada khalayak ramai; fiksasi (misalnya pertunjukan hidup direkam untuk dikomersialkan dengan pita film atau laser disk) dari mereka yang mengadakan pertunjukan hidup; reproduksi dari suatu fiksasi dalam hal fiksasi yang asli dibuat tanpa persetujuan artis pelaku atau bila reproduksi yang dibuat berbeda dengan tujuan diberikannya izin.

2) Produser rekaman (*Producers of Phonograms*)

Produser rekaman suara mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang reproduksi secara langsung atau tak langsung rekaman suara yang dilakukan produser rekaman suara. Dalam hal suatu rekaman suara dipublikasikan dengan tujuan komersial kemudian dapat menimbulkan pemanfaatannya lebih lanjut oleh orang lain, maka suatu ganti rugi yang layak harus dibayarkan oleh si

pemakai kepada artis pelaku atau produser rekaman suara kepada kedua-duanya. Sekalipun demikian, negara-negara peserta Konvensi Roma memiliki kebebasan untuk tidak memberlakukan ketentuan ini atau membatasi pelaksanaannya.

3) Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organizations*)

Lembaga-lembaga penyiaran mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang dilakukan tindakan-tindakan tertentu, misalnya penyiaran ulang siarannya, fiksasi siaran, reproduksi siaran, dan menyampaikan kepada publik siaran televisi jika siaran ulang itu ditujukan kepada publik yang dipungut bayaran untuk menyaksikannya.

Perlindungan terhadap Hak-hak terkait sebagaimana telah diuraikan di muka merupakan sebuah upaya perlindungan hukum terhadap apa yang semula dinamakan sebagai ciptaan derivatif (*derivative work*)<sup>101</sup>, sehingga dalam hal ini, hak cipta tetap berada pada ciptaan-ciptaan awal atau asli yang menjadi sumber eksistensi ciptaan-ciptaan yang diderivasi dari ciptaan dinamakan hak-hak terkait.

---

<sup>101</sup> Dimaksudkan sebagai ciptaan derivatif ini adalah ciptaan-ciptaan yang diturunkan (diderivasi) dari ciptaan-ciptaan yang telah eksis sebelumnya, misalnya: penerjemahan ciptaan novel ke pelbagai bahasa; adaptasi ciptaan novel menjadi film layar lebar, kompilasi ciptaan-ciptaan seni dan sastra seperti ensiklopedia dan antologi; dan lainnya. Lihat: Bernard Nainggolan, Op. Cit., hal. 119.

#### **d. The Geneva Phonogram Convention**

Pada bulan Maret 1971 di Paris telah diselenggarakan sebuah pertemuan antara WIPO dengan UNESCO yang membahas mengenai kurang efektifnya perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Roma terhadap produsen rekaman suara. Pembajakan masih saja berlangsung dan usaha-usaha untuk memberantasnya sangat tidak efisien, yang disebabkan masih sedikitnya negara-negara yang menjadi peserta Konvensi, yakni sampai dengan tahun 1971 hanya ada sebelas anggota yang meratifikasi atau mengaksesinya. Setelah diselenggarakan pertemuan antara WIPO dengan UNESCO tersebut, kemudian pada bulan Oktober 1971 di Geneva diselenggarakan sebuah konferensi diplomatik yang berhasil menerima suatu rancangan The Geneva Phonogram Convention sebagai sebuah konvensi yang sampai dengan tanggal 1 Januari 1996 pesertanya telah melonjak menjadi 50 negara.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada produsen rekaman suara pada dasarnya merupakan sekumpulan kaidah hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri dan merupakan bagian dari pengaturan umum hak cipta, sehingga menjadi suatu hukum *lex specialis* dari ketentuan

hukum yang mengatur mengenai hak terkait.<sup>102</sup> Konvensi Geneva menetapkan suatu kewajiban setiap negara peserta konvensi untuk melindungi produser rekaman suara yang merupakan warga negara dari negara peserta lain konvensi terhadap pembuatan duplikasi (perbanyak) tanpa persetujuan dari produsen. Selain itu, negara peserta konvensi juga berkewajiban untuk melarang pengimporan segala bentuk rekaman suara yang penggandaan atau perbanyakannya dilakukan tanpa seizin produsen yang berhak. Jangka waktu perlindungan hukum bagi suatu rekaman suara adalah 20 tahun semenjak fiksasi pertama dilakukan atau publikasi pertama rekaman suara yang bersangkutan.

**e. WTO/TRIPs Agreement**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa bidang Hak Kekayaan Intelektual dimana Hak Cipta sebagai salah satu bidangnya, kini diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)*.<sup>103</sup> Masuknya TRIPs Agreement kedalam WTO Agreement merupakan hasil negosiasi GATT putaran ke-8 yang dikenal dengan

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hal. 121.

<sup>103</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 1.

Uruguay Round. Selama sebelum diselenggarakannya Uruguay Round, negara maju memandang bahwa kurangnya perlindungan *Hak Kekayaan Intelektual* merupakan suatu hambatan terhadap perdagangan internasional. Dalam Uruguay Round inilah negara maju mendesak agar para anggota GATT lainnya juga menyadari besarnya pengaruh Hak Kekayaan Intelektual terhadap perdagangan internasional yang oleh karenanya harus diatur di dalam seperangkat perjanjian multilateral WTO Agreement.<sup>104</sup> Dengan demikian dalam *TRIPs Agreement*, aspek-aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung lebih condong kearah konsep ekonomi dan konsep perdagangan internasional.

Hal tersebut di muka setidaknya ditegaskan melalui *pertama*, pemberian nama *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang oleh Ahmad Zen Umar Purba diterjemahkan sebagai Aspek-aspek perdagangan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>105</sup> *Kedua*, kedudukan *TRIPs Agreement* diatur dalam Annex 1C. Kedudukan *TRIPs Agreement* di antara berbagai perjanjian lainnya di dalam *WTO Agreement* merupakan suatu sistem penunjang perdagangan internasional. Hal tersebut

---

<sup>104</sup> Bernard Nainggolan, *op.cit.*, hal. 129.

<sup>105</sup> Lihat: Ahmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 21.

dikarenakan sebagai lampiran, *TRIPs Agreement* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *WTO Agreement*. Ketiga, dalam pembukaan *TRIPs Agreement* dinyatakan bahwa negara-negara anggota mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan *private rights*.<sup>106</sup> Pengkategorian Hak Kekayaan Intelektual sebagai *private rights* menjadi sangat menarik karena dapat memicu perdebatan. Pertama, karena pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual melayani kepentingan masyarakat.<sup>107</sup> Kedua, konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dibatasi oleh jangka waktu perlindungan, setelah jangka waktu perlindungan habis, kekayaan intelektual tersebut menjadi *public domain*.

Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa ditetapkannya jangka waktu perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual adalah dalam rangka melindungi kepentingan publik dari monopoli pemilik hak. Namun demikian dalam kenyataannya, nuansa yang melekat bahwa *public domain* tidak lebih dari sekedar penampungan bagi kekayaan intelektual<sup>108</sup> yang sudah tidak dapat lagi “diperas sari-sari” keuntungannya atau kehilangan nilai ekonomi

---

<sup>106</sup> *Paragraph 4* Pembukaan *TRIPs Agreement*.

<sup>107</sup> Hector MacQueen, *et.al.*, *Contemporary Intellectual Property: Law And Policy*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), page 10, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 26.

<sup>108</sup> Lihat: *loc. cit.*

(*potential profit*) karena sudah *out of date*, sehingga yang tersisa hanyalah “ampas-ampas” kekayaan intelektual yang hanya perlu dilindungi secara moral saja.

Salah satu karakteristik pokok *TRIPs Agreement* yang perlu diperhatikan adalah bahwa *TRIPs Agreement* tidak melahirkan suatu hukum baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berbeda dari konvensi-konvensi yang telah ada sebelumnya, akan tetapi bermaksud memperkuat dan mewajibkan negara anggota WTO untuk menghormati dan melaksanakan konvensi yang telah ada tersebut.<sup>109</sup> Pada hakikatnya, di dalam *TRIPs Agreement* terkandung empat kelompok pengaturan, yakni:<sup>110</sup> (1) pengaturan yang mengaitkan Hak Kekayaan Intelektual dengan konsep perdagangan internasional; (2) pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi *Paris Convention dan Bern Convention*; (3) merupakan aturan dan ketentuan yang ditetapkan sendiri; (4) merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk kedalam upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara-negara anggota.

---

<sup>109</sup> Lihat: *Ibid.*, hal. 22, lihat juga: Bernard Nainggolan, *op.cit.*, hal. 134.

<sup>110</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 23.

**f. WIPO Copyright Treaty (WCT)**

WCT lahir pada tahun 1996 dan mulai berlaku pada tahun 2002. WCT memuat tiga ketentuan yang lazim disebut dengan Digital Agenda (pada masa itu, hak cipta memasuki suatu periode abad digital) yang pada esensinya untuk melindungi kepentingan para pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital, berkaitan dengan hal ini Mukadimah WCT merumuskan sebagai berikut:<sup>111</sup>

*“...the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works.”*

Adapun tiga ketentuan atau yang lazim disebut sebagai Digital Agenda yakni: Pertama, memberikan kepada pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik (*communication right to the public*) dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel; kedua, memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta; ketiga, kewajiban negara untuk

---

<sup>111</sup> Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 88.



menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: menghapus atau mengubah surat elektronik hak informasi manajemen elektronik tanpa izin pencipta; mendistribusi, mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengomunikasikan kepada publik suatu ciptaan atau memperbanyak satu ciptaan yang diketahui bahwa hak pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin pencipta.

Pemberlakuan Digital Agenda ini sangat mempengaruhi perlindungan ciptaan-ciptaan dilindungi hak cipta, yang diperbanyak secara digital hingga memunculkan adanya pergeseran dalam hal pengaturan hak cipta yang dibagi menjadi tiga jenis, yakni sebagai berikut:<sup>112</sup>

1) *Time-shifting*

Yakni diperbolehkannya seseorang merekam siaran televisi atau program radio di tempat tinggal pribadi, kemudian menonton atau mendengarkan ulang di waktu yang lain baik di dalam atau di luar rumah.

2) *Space-shifting*

Dalam space-shifting, seseorang diperbolehkan membuat salinan dari suatu rekaman suara CD ke CD

---

<sup>112</sup> Ibid, hal. 124.

yang lain, atau memperdengarkannya melalui alat elektronik lain.

3) *Format-shifting*

Seseorang diperkenankan membesarkan atau mengecilkan suatu ciptaan yang telah ada dalam suatu alat secara digital.

**g. WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)**

Perjanjian WPPT ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2002 dan hingga Bulan Oktober 2003 telah ada 42 negara yang meratifikasi perjanjian internasional ini. Perjanjian WPPT mengatur mengenai hak-hak performer dan produser rekaman suara. Pengaturan hak-hak performer dalam hal ini hanyalah mengenai status hukum seorang performer yang karya ciptanya dialihkan dalam bentuk rekaman suara, sedangkan mengenai performer yang adalah seorang aktor yang karya ciptanya dialihkan perwujudannya dalam sebuah film tidak diatur dalam perjanjian internasional ini. Dalam perjanjian ini juga tidak diatur mengenai hak dari lembaga-lembaga badan penyiaran. Perjanjian WPPT juga sering disebut dengan istilah Rome Plus dan TRIPs Plus karena mengatur

perlindungan hak-hak performer yang lebih banyak dari yang diatur dalam Konvensi Roma dan TRIPs.

Penyebutan istilah TRIPs Plus ataupun Rome Plus ini dilatarbelakangi oleh adanya tiga hak tambahan atau *extra right* kepada performer yakni: hak mengontrol perwujudan pertunjukannya yang diperbanyak, diumumkan, disewakan, dan juga mengontrol pemasarannya; kemudian dalam hal suatu pertunjukan dipertontonkan secara luas kepada publik maka negara-negara peserta WPPT harus menjamin performer menerima pembayaran; serta adanya hak-hak moral yang berupa identitas dan integritas pertunjukan hidup para performer atau pertunjukan yang dialihkan dalam wujud rekaman suara harus dijamin negara-negara peserta.<sup>113</sup> Adapun *extra right* ini juga diberikan kepada produser rekaman suara sebagai pemegang hak terkait yang berupa hak eksklusif mengontrol distribusi, penyewaan dan penggandaan rekaman suara, serta hak eksklusif untuk memperoleh pembayaran penggunaan rekaman suaranya melalui telekomunikasi atau gelombang radio kepada publik.

---

<sup>113</sup> Bernard Nainggolan, *Op. Cit.*, hal. 126.

### 3. Sejarah Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Secara historis, sejarah perlindungan Hak Cipta modern, dalam bentuk yuridis formal berupa peraturan perundang-undangan barulah dikenal pada masa-masa akhir penjajahan Kolonial Belanda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perlindungan Hak Cipta sejatinya telah ada jauh sebelumnya yakni pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Hal tersebut mengingat tingginya tingkat peradaban dan kebudayaan Nusantara pada masa silam yang ditunjukkan dari peninggalan-peninggalan sejarah yang masih dapat ditemui saat ini. Semakin tinggi tingkat peradaban dan kebudayaan suatu bangsa, semakin tinggi pula penghormatan yang diberikan kepada hak-hak asasi manusia, sekalipun bentuk penghormatan tersebut belum dituangkan secara yuridis formal sebagaimana peraturan perundang-undangan yang dikenal dewasa ini.

Pada tahun 1912, Kerajaan Belanda menerbitkan *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600 Tahun 1912 yang berdasarkan asas konkordansi turut berlaku di Indonesia yang pada masa itu merupakan daerah jajahan Belanda. Tidak lama setelah pemberlakuan *Auteurswet* 1912, Kerajaan Belanda pada 1 April 1913 mengikatkan diri pada *Bern Convention* 1886. Melalui *Staatsblad* No. 797 Tahun 1914, Indonesia yang masih bernama *Netherlands East-Indies* menjadi anggota *Bern Convention*.

Sama halnya ketika *Bern Convention* mengalami revisi di Roma pada tahun 1928, revisi tersebut turut berlaku di Indonesia melalui *Staatsblad* No. 325 Tahun 1931. Pada masa Kolonial Belanda inilah untuk pertama kalinya secara formal Indonesia mengenal perlindungan Hak Cipta dan terikat dalam konvensi internasional Hak Cipta.<sup>114</sup>

Berbeda dengan pada masa Kolonial Belanda, pada masa pendudukan Bala Tentara Jepang, tidak dikenal bentuk-bentuk perlindungan Hak Cipta apapun yang menonjol. Sekalipun berdasarkan Pasal 3 *Osamu Sirei* No. 1, untuk mencegah kekosongan hukum maka semua badan-badan pemerintah, kekuasaan hukum, dan undang-undang dari pemerintah Kolonial Belanda tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer.<sup>115</sup> Tidak nampaknya bentuk-bentuk perlindungan Hak Cipta secara jelas agaknya merupakan suatu hal yang wajar mengingat singkatnya masa pendudukan Bala Tentara Jepang yang hanya sekitar tiga setengah tahun. Dapat dikatakan perlindungan Hak Cipta berada dalam kedudukan *status-quo*.

Tahun 1945 berakhirlah masa pendudukan Bala Tentara Jepang yang secara yuridis ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

---

<sup>114</sup> Lihat: Eddy Damian, *op.cit.*, hal. 144, lihat juga: Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 64.

<sup>115</sup> Toendjoeng Herning Sitaboeana, *op.cit.*, hal. 278.

Dengan proklamasi kemerdekaan inilah secara formal dimulailah Sistem Hukum Nasional berdasarkan UUD RI 1945. Dalam upaya untuk mengatasi terjadinya kekosongan hukum maka dilakukanlah suatu terobosan hukum melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD RI 1945 yang menetapkan bahwa: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan inilah aturan-aturan hukum peninggalan Kolonial Belanda berlaku kembali termasuk *Auteurswet* 1912 yang diterjemahkan menjadi UU Hak Pengarang.

*Auteurswet* 1912 atau UU Hak Pengarang secara yuridis tetap berlaku pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) tahun 1949-1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) tahun 1950-1959 melalui aturan peralihan yakni Pasal 192 Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDS 1950. UU Hak Pengarang tersebut berlaku kembali ketika Indonesia kembali pada UUD RI 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan masih terus berlaku hingga tahun 1982. Dengan demikian tercatat dalam sejarah perlindungan Hak Cipta di Indonesia bahwa UU Hak Pengarang pernah berlaku dalam tiga masa konstitusi dan melewati pasang surut perjalanan negara Indonesia sejak masa awal

kemerdekaan, orde lama, hingga orde baru. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa pada tahun 1958, Indonesia memutuskan untuk keluar dari *Bern Convention*.

Pada tahun 1982 pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut diundangkan dengan maksud untuk mendorong serta melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta di dalam rangka mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>116</sup> Keberhasilan pemerintahan orde baru dalam membenahi bidang perekonomian meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada dekade 1980. Dengan meningkatnya kesejahteraan, meningkat pula daya beli masyarakat yang berarti bahwa pasar tumbuh dengan pesat. Tumbuhnya pasar domestik tersebut ternyata memancing berbagai bentuk pembajakan karya cipta seperti buku, kaset audio, video, dsb.<sup>117</sup> Maraknya pembajakan selain dipicu oleh pertumbuhan pasar, juga merupakan andil dari lemahnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 dalam memberikan perlindungan Hak Cipta. Dikarenakan tekanan dunia internasional yang begitu kuat atas kondisi pembajakan yang begitu kritis maka tahun 1987 pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang

---

<sup>116</sup> Lihat: Konsiderans dan bagian Umum Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

<sup>117</sup> Lihat: Otto Hasibuan, *op.cit.*, hal. 95.

Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.<sup>118</sup>

Dalam perkembangannya, diratifikasinya *WTO Agreement* melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* oleh pemerintah Indonesia membawa pengaruh terhadap sistem perlindungan Hak Cipta. Hal tersebut sebagai konsekuensi yuridis kedudukan *TRIPs Agreement* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari *WTO Agreement* sehingga harus diimplementasikan dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta di Indonesia. Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap *WTO - TRIPs Agreement* yang akan segera berlaku secara definitive mulai tanggal 1 Januari 2000, maka pada tahun 1997 pemerintah kembali melakukan perubahan atas undang-undang Hak Cipta dengan menerbitkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987. Pada tahun yang sama Indonesia kembali bergabung sebagai anggota *Bern Convention* dengan ratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention for the Protection of*

---

<sup>118</sup> Lihat: Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 67.



*Literary and Artistic Works*. Lima tahun kemudian, pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini disusun dan diterbitkan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan TRIPs dan WIPO *Copyright Treaty*.

## **B. Politik Hukum**

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 menandai puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu penjajahan selama berabad-abad. Tidak hanya itu, proklamasi kemerdekaan juga menandai dibangunnya suatu sistem hukum baru, menggantikan suatu sistem hukum asing yang telah selama berabad-abad tumbuh dan berkembang, serta melayani kepentingan pemerintah Kolonial Belanda dan Jepang di Indonesia. Berbeda dengan sistem hukum asing, Sistem Hukum Nasional dibangun untuk mengabdikan pada kepentingan nasional dan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara tersebut, pembangunan Sistem Hukum Nasional didasarkan pada suatu kerangka atau orientasi arah yang dikehendaki oleh segenap bangsa Indonesia atau didasarkan pada suatu Politik Hukum Nasional.

## 1. Paradigma Politik Hukum Nasional

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka batasan politik hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup aspek *ius constituendum* maupun aspek *ius constitutum*. Setidaknya terdapat dua ahli hukum yang mendefinisikan politik hukum dalam dua aspek tersebut. Mahfud MD., mendefinisikan politik hukum sebagai:<sup>119</sup>

Kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang dalam implementasinya meliputi<sup>120</sup>:

- 1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan, dan
- 2) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.

Teuku Mohammad Radhie memberikan definisi politik hukum sebagai “suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.”<sup>121</sup> Berdasarkan pengertian di muka maka politik hukum dapat pula dipahami sebagai pedoman penuntun pembuatan dan pembangunan hukum sekaligus pula digunakan sebagai sarana menilai dan

---

<sup>119</sup> Mohammad Mahfud M.D., “Perkembangan ...”, *op.cit.*, hal. 74.

<sup>120</sup> Definisi tersebut dilengkapi Mahfud MD dengan Mengutip pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum nasional”, Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum, yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya, September 1995.

<sup>121</sup> Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional”, dalam Majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973, hal. 3, sebagaimana dikutip dalam Mohammad Mahfud MD, *Membangun...*, *op.cit.*, hal. 13.

mengkritisi apakah suatu hukum yang secara aktual telah berlaku sesuai atau tidak dengan pedoman penuntun yang dicita-citakan bagi terwujudnya tujuan negara.<sup>122</sup>

Politik Hukum Nasional, sebagai pedoman penuntun pembuatan dan pembangunan hukum nasional, sekaligus pula digunakan sebagai sarana untuk menilai dan mengkritisi hukum nasional yang tengah berlaku, bersumber pada Pancasila. Dengan perkataan lain, Pancasila merupakan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan Hukum Nasional serta segala upaya pembaruannya.<sup>123</sup> Adapun dasar dikemukakannya Pancasila sebagai sumber Politik Hukum Nasional atau menjadi paradigma dalam pembangunan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia

Pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Radjiman Wediodiningrat mengemukakan bahwa perlu dirumuskannya suatu dasar negara Indonesia. Dalam rangka menjawab permintaan tersebut para *founding fathers* telah mengemukakan berbagai pandangannya mengenai prinsip-prinsip yang akan digunakan sebagai dasar negara. Namun demikian

---

<sup>122</sup> Lihat: Mohammad Mahfud MD, *Membangun ...*, *Ibid.*, hal. 16.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hal. 52.

diantara berbagai pandangan tersebut belum terdapat suatu rumusan yang sistematis dan holistik sebagai dasar negara yang koheren.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berhasil menjawab permintaan Radjiman akan dasar negara Indonesia melalui rumusan Pancasila. Soekarno menyebut Pancasila sebagai *Weltanschauung* (ideologi atau pandangan dunia) dan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Ia juga menyebut Pancasila sebagai *Leitstar* (bintang pemimpin atau bintang pemandu) yang dinamis. Melalui proses pembahasan yang mendalam dan proses penyempurnaan rumusan, akhirnya dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pembukaan UUD RI 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Dalam Pembukaan UUD RI 1945 terkandung rumusan Pancasila, yang pada pokoknya merupakan apa yang disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945.<sup>124</sup>

Apabila dikaitkan dengan *Stufenbautheorie* dari Hans Kelsen dan *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* dari Hans Nawiasky, maka Pancasila dapat

---

<sup>124</sup> Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 9-39, lihat juga: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, *Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara*, (Jakarta: PT Cipta Prima Budaya, 2005), hal. 29-30.

digolongkan sebagai *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm*.<sup>125</sup> Hal tersebut dikarenakan Pancasila bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya. Pancasila merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi karena ditetapkan terlebih dahulu sebelum adanya UUD RI 1945. Pancasila juga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya, sehingga perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi sebagai suatu hipotesa, dan suatu yang aksioma atau diterima sebagai suatu kebenaran.<sup>126</sup>

Pancasila sejatinya merupakan kesepakatan luhur para *founding fathers* dalam mendirikan negara Indonesia dan mempersatukan bangsa Indonesia, yang berisi *core value* bangsa dan negara Indonesia, yang oleh karenanya harus menjadi bintang pemandu perjalanan bangsa dan negara Indonesia.<sup>127</sup> Dalam kaitannya sebagai ideologi negara, Soekarno selalu mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan "*de grootste*

---

<sup>125</sup> Arief Hidayat berpendapat bahwa Pancasila merupakan Norma Dasar (*Grundnorm*), sedangkan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*). Arief Hidayat, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, dalam wawancara, Semarang, 21 Agustus 2012, izin mengutip telah diberikan. Bandingkan dengan pendapat A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati S., *op.cit*, hal. 46-47, bandingkan juga dengan pendapat Mahfud MD, dalam Mohammad Mahfud MD, *Membangun ....op.cit.*, hal. 54-56.

<sup>126</sup> Maria Farida Indrati S., *op.cit*, hal. 46-47.

<sup>127</sup> Arief Hidayat, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, dalam wawancara, Semarang, 27 September 2012, izin mengutip telah diberikan.

*gemene deler*” dan “*de kleinste gemene veelvoud*” dari nilai-nilai budaya masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan pernyataan Soekarno dan perjalanan sejarah maka nampak jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan *common denominator* yang bersumber dari nilai-nilai yang berkembang dalam segenap elemen bangsa Indonesia. Dengan demikian maka Pancasila merupakan suatu *ligatur*<sup>128</sup> yang memiliki daya pengikat kuat atas bangsa dan negara Indonesia sehingga melahirkan suatu negara yang kokoh, karena secara alami bersumber dari bumi Indonesia.<sup>129</sup>

b. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*)

Apabila mengaitkan Sistem Hukum Nasional dengan *Stufenbautheorie* dari Hans Kelsen dan *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* dari Hans Nawiasky maka nampak jelas bahwa Sistem Hukum Nasional tersusun secara berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok. Semakin tinggi kedudukan suatu hukum dalam lapis-lapis hukum tersebut, akan semakin kaya kandungan moral atau asas-asas umumnya, semakin

---

<sup>128</sup> Ligatur berasal dari Bahasa Latin, *ligatura* yang berarti sesuatu yang mengikat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ligatur diartikan sebagai benang pengikat suatu organ yang berongga. Lihat: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 14 November 2012.

<sup>129</sup> Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, *op.cit.*, hal. 48.

rendah kedudukannya akan semakin konkret dan tipis kandungan moralnya.<sup>130</sup> Adapun kedudukan Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional adalah sebagai *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm* yang kaya akan kandungan moral karena merupakan norma hukum tertinggi. Oleh karenanya dalam Sistem Hukum Nasional, Pancasila menjadi dasar hukum yang dijadikan pedoman atau sumber legitimasi sehingga seluruh norma hukum atau peraturan perundang-undangan (hukum positif) harus bersumber dan berdasar, serta oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengannya. Dengan demikian Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*.

Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai cita hukum, A. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa:<sup>131</sup>

Kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan, Terhadap isi peraturan perundang-undangan sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum.

---

<sup>130</sup> Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Pembahasan Dari Optik Ilmu Hukum Umum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hal. 35.

<sup>131</sup> A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV", Disertasi Pada Program Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, sebagaimana dikutip dalam: Maria Farida Indrati S., *ibid.*, hal. 59.

Pancasila sebagai cita hukum nampak dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Penjelasan UUD RI 1945<sup>132</sup>

Dalam Penjelasan UUD RI 1945 dinyatakan bahwa:

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan dalam pasal-pasal nya.

Pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*reichtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya.

Berdasarkan perumusan tersebut maka dapat dipahami bahwa bahwa kedudukan Pembukaan UUD RI 1945 adalah lebih utama dibandingkan dengan Batang Tubuh UUD RI 1945 –sekarang pasal-pasal- karena merupakan penjabaran normatif mengenai pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945. Dengan perkataan lain bahwa Pancasila merupakan cita hukum yang menguasai konstitusi.<sup>133</sup>

<sup>132</sup> Meskipun secara yuridis sejak diamanmemnnya UUD RI 1945, Penjelasan UUD RI 1945 tidak lagi menjadi bagian lagi dari undang-undang dasar Indonesia, akan tetapi gagasan-gagasan yang terkandung di dalam Penjelasan UUD RI 1945 tetap relevan untuk dijadikan sumber hukum materiil, bukan sumber hukum dalam arti formal.

<sup>133</sup> Lihat: *Ibid.*, hal. 58, lihat juga: Mahfud MD, *Membangun ..., op.cit.*, hal. 53.



2) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, dinyatakan secara tegas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat suatu negara.

3) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

Dalam Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD NI 1945.

4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus sebagai dasar filosofis bangsa dan negara. Hal tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Serupa dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Berdasarkan penjelasan mengenai Politik Hukum Nasional di muka, maka dapat dipahami bahwa terdapat jenjang-jenjang atau lapis-lapis dalam Politik Hukum Nasional. *Pertama*, politik hukum yang terkandung dalam Pancasila disebut sebagai **politik hukum ideal**. Politik hukum ideal yang terkandung dalam

Pancasila bersifat permanen, merupakan ideologi dan dasar negara yang kokoh karena merupakan *common denominator* berbagai elemen bangsa yang bersumber pada *core value* bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan bintang pemandu utama pembangunan hukum Indonesia, oleh karenanya merupakan cita hukum yang ideal dalam pembangunan hukum Indonesia. *Kedua*, sebagai suatu politik hukum ideal, nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma dasar atau pokok yang disusun ke dalam suatu undang-undang dasar. Rumusan undang-undang dasar yang merupakan penjabaran dari Pancasila bersifat semi permanen dengan jangkaun keberlakuan yang cukup panjang, artinya berbeda dengan Pancasila yang bersifat permanen, terhadap undang-undang dasar terdapat kemungkinan untuk dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam rumusan undang-undang dasar tersebut terkandung suatu politik hukum yang disebut sebagai **politik hukum dasar**. *Ketiga*, dikarenakan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam undang-undang dasar masih bersifat mendasar dan umum sehingga sulit menjangkau dan dioperasionalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka kaidah-kaidah atau norma-

norma tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai bentuk peraturan-peraturan yang dikenal sebagai undang-undang.<sup>134</sup> Undang-undang bersifat khusus dan temporer. Sebagai bentuk penjabaran dari undang-undang dasar, dalam suatu undang-undang terkandung suatu politik hukum yang disebut sebagai **politik hukum instrumental**. Adapun peraturan-peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang tidaklah mengandung suatu politik hukum, karena merupakan peraturan teknis operasional dari suatu undang-undang.<sup>135</sup>

Dalam rangka menyusun pembahasan politik hukum yang komprehensif, sistematis, dan logis dalam penelitian ini maka dalam pembahasan Politik Hukum Hak Cipta akan dilakukan analisis terhadap Politik Hukum Ideal Hak Cipta yang bersumber pada Pancasila, Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang bersumber pada berbagai undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia, maupun Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang bersumber pada berbagai Undang-Undang Hak Cipta yang pernah dan tengah berlaku di Indonesia.

## **2. Pengaruh Asing Terhadap Politik Hukum Nasional**

Sebagaimana apa yang dikatakan Sunaryati Hartono bahwa terdapat faktor-faktor eksternal, diluar jangkauan kita,

---

<sup>134</sup> Lihat: Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hal. 62.

<sup>135</sup> Arief Hidayat, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, dalam wawancara, Semarang, 21 Agustus 2012 dan 14 November 2012, izin mengutip telah diberikan.

yang ikut mempengaruhi Politik Hukum Nasional.<sup>136</sup> Faktor eksternal tersebut adalah pengaruh asing terhadap Politik Hukum Nasional. Terlebih pada era globalisasi saat ini dimana dunia terhubung tanpa batas, pengaruh asing sangatlah besar terhadap Politik Hukum Nasional. Namun demikian, secara historis sebenarnya baik disadari atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung, Indonesia sebagai bekas daerah jajahan Kolonial Belanda telah membawa pengaruh yang cukup besar terhadap Politik Hukum Nasional.

**a. Pengaruh Indonesia Sebagai Bekas Daerah Jajahan Kolonial Belanda Terhadap Politik Hukum Nasional**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pengaruh Indonesia sebagai bekas daerah jajahan Kolonial Belanda terhadap Politik Hukum Nasional nampak dalam Penjelasan UUD RI 1945. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*)”. Pernyataan tersebut seakan menegaskan bahwa bentuk negara hukum yang dipilih Indonesia adalah *rechtstaat*, suatu doktrin negara hukum warisan tradisi *Civil Law System*. Negara hukum (*rechtsaat*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan UUD RI 1945 merupakan pengaruh paradigma hukum yang

---

<sup>136</sup> Sunaryati Hartono, *op.cit.*, hal. 1-2.

diwariskan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang merupakan negara Eropa Kontinental yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental. Pengaruh tersebut tentu saja sangat mempengaruhi bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan arah pembangunan Sistem Hukum Nasional. Dengan pernyataan tersebut, seakan Indonesia akan membangun Sistem Hukum Nasional menuju ke arah suatu tertib hukum *Civil Law System*.

Pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dalam Penjelasan UUD RI 1945 sungguh suatu hal yang kontradiktif apabila dihadapkan dengan Pembukaan UUD RI 1945. Dalam pembukaan tersebut dinyatakan bahwa:

“... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu negara yang hendak dibentuk adalah suatu negara berdasar Pancasila. Negara hukum yang hendak dibangun adalah suatu negara hukum Pancasila, bukan negara hukum dalam doktrin *rechtsaat*.

Pengaruh asing terhadap Politik Hukum Nasional secara tidak langsung juga dimungkinkan terjadi melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD RI 1945, yang membuka kemungkinan bagi berlakunya peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda.<sup>137</sup> Sekalipun Aturan Peralihan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di Indonesia mengingat situasi dan kondisi yang serba mendesak, menjadi sulit untuk dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang sama sekali baru, namun demikian tetap membawa pengaruh terhadap Politik Hukum Nasional. Hal tersebut dikarenakan aturan peralihan yang terdapat di dalam undang-undang dasar cenderung bersifat spontan harus dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan kolonial Belanda yang tidak hanya bernafas kolonialisme dan imperialisme, tetapi juga memiliki watak sosio-kultural liberal-individualistis<sup>138</sup> sehingga tidak sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma Politik Hukum Nasional.

#### **b. Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik Hukum Nasional**

Dalam perkembangannya, pengaruh asing terhadap Politik Hukum Nasional juga terjadi sebagai konsekuensi

---

<sup>137</sup> Lihat: Imam Anshori Saleh, *Membenahi Hukum Dari Proklamasi ke Reformasi: Urgensi Prolegnas dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2009), hal. 83.

<sup>138</sup> Lihat: Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hal. 38 & 40-41.

dari pergaulan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam era globalisasi. Era globalisasi yang dikenal dewasa ini sejatinya berawal dari krisis ekonomi dunia pasca Perang Dunia II. Sebagaimana dipahami bersama bahwa perjalanan akhir dari Perang Dunia II telah mengantarkan Amerika Serikat dan sekutunya meraih kemenangan yang gilang gemilang. Perang Dunia II juga telah melahirkan banyak negara merdeka di berbagai belahan dunia khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Namun demikian dibalik itu semua telah terjadi krisis ekonomi pada negara-negara sekutu sebagai akibat perang yang berkepanjangan, disamping itu juga telah terjadi kemelaratan, kemiskinan, dan ketertinggalan pada negara-negara baru merdeka sebagai akibat kolonialisme berabad-abad.

Dalam kondisi demikian, masyarakat internasional seakan memiliki satu orientasi yang sama yakni melakukan pembangunan ekonomi. Negara-negara maju yang terlibat dalam Perang Dunia II berjuang untuk menormalisasi perekonomiannya dan menyejahterakan rakyatnya. Hal yang serupa juga terjadi pada negara-negara baru merdeka termasuk Indonesia, namun bedanya kelompok negara-negara baru merdeka membangun seluruhnya dari nol,



tidak hanya perekonomian, namun juga dalam bidang-bidang lainnya, termasuk pula melawan tekanan-tekanan dan gangguan-gangguan dari negara-negara maju.

Kelompok negara-negara maju kala itu mulai kembali melakukan kerjasama-kerjasama bilateral dan regional yang fokus pada kerjasama ekonomi. Salah satu kerjasama tersebut adalah diselenggarakannya The Bretton Woods Conference, di Amerika Serikat, Juli 1944 yang melahirkan IMF, World Bank. Adapun gagasan pendirian ITO (International Trade Organization) urung terlaksana karena tidak disetujui Amerika Serikat. Namun demikian akhirnya pada tahun 1947 sebagai ganti kegagalan pendirian ITO, diadakan konferensi internasional yang melahirkan perjanjian GATT di Genewa, Swiss. Dalam perkembangannya konferensi serupa diadakan secara periodik hingga delapan putaran negosiasi dengan negara peserta yang terus bertambah. Akhirnya pada putaran kedelapan yang terkenal dengan Uruguay Round lahirlah *WTO Agreement*.<sup>139</sup>

Dengan lahirnya *WTO Agreement* maka diharapkan akan tercipta situasi perdagangan internasional yang kondusif. Situasi kondusif tersebut tercipta melalui

---

<sup>139</sup> Lihat: Ahmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 2-3, lihat juga: [http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton\\_Woods\\_system](http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system), diakses tanggal 18 November 2012.

penghapusan praktik-praktik proteksionisme negara melalui hambatan tarif maupun non tarif yang pada intinya adalah menciptakan sistem ekonomi pasar bebas. Dengan terciptanya pasar bebas maka akan terwujud efisiensi ekonomi yang terwujud melalui kompetisi dan pembagian kerja. Pembagian kerja dan spesialisasi komoditas ekonomi akan membuat suatu negara terpusat perhatian dan pekerjaannya pada suatu bidang yang paling baik, cocok, dan efisien bagi dirinya sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi tidak hanya perekonomian bagi negara maju namun sama halnya juga pada negara berkembang.<sup>140</sup>

WTO *Agreement* sebagai suatu konvensi internasional tidak hanya dapat dipandang sebagai persetujuan negara-negara peserta untuk menundukkan diri pada suatu perjanjian bersama di bidang ekonomi, akan tetapi merupakan bentuk pelembagaan globalisasi. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa globalisasi yang telah dan tengah terjadi dewasa ini identik dengan suatu globalisasi ekonomi dan telah membawa pengaruh besar pada negara-negara di dunia. Namun demikian sekalipun identik dengan suatu globalisasi ekonomi, globalisasi yang

---

<sup>140</sup> Lihat: Mohammad Amien Rais, *op.cit.*, hal 13.

telah dan tengah terjadi saat ini juga membawa pengaruh pada bidang-bidang lain seperti hukum.

Indonesia sebagai sebuah entitas negara juga mendapat pengaruh besar dari terjadinya proses globalisasi. Khusus dalam bidang hukum, pengaruh globalisasi terhadap Politik Hukum Nasional pertama-tama ditunjukkan melalui dimasukkannya aturan-aturan hukum asing kedalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi kegiatan perdagangan internasional, investasi asing, dan pasar modal. Dalam perkembangannya pengaruh globalisasi terhadap Politik Hukum Nasional tidak hanya menyangkut hukum ekonomi saja akan tetapi meluas dalam bidang-bidang hukum lainnya. Tidak jarang pula suatu program pinjaman luar negeri yang diberikan oleh pihak-pihak asing, baik itu pinjaman yang diberikan oleh lembaga internasional seperti IMF dan World Bank, maupun pinjaman yang diberikan oleh negara-negara maju, merupakan satu paket dengan kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk memasukkan atau mengimplementasikan aturan-aturan hukum asing semisal konvensi internasional kedalam peraturan perundang-undangan nasional.

Keanggotaan Indonesia dalam *WTO Agreement* merupakan salah satu contoh pintu masuk hukum asing ke dalam Sistem Hukum Nasional. Dengan Ratifikasi *WTO Agreement* melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994, maka pemerintah diwajibkan untuk memasukkan dan mengimplementasikan seluruh aturan-aturan hukum yang ada di dalam *WTO Agreement* ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.<sup>141</sup> Hal ini tentu saja membawa pengaruh besar terhadap Politik Hukum Nasional. Sebagaimana diketahui bahwa *WTO Agreement* sarat dengan tarik menarik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang. *WTO Agreement* yang dimaksudkan untuk menciptakan sistem ekonomi dunia berbasis pasar bebas merupakan suatu bentuk liberalisme dengan menghadapkan negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam kedudukan yang sama. Kondisi demikian tentu saja merugikan negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia, karena tidak memiliki daya kekuatan, kesiapan, dan kemampuan yang sepadan. Kondisi ini mencerminkan suatu tata dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Oleh karenanya tentu saja

---

<sup>141</sup> Lihat: Art. XVI. 5 *WTO Agreement* Jo. Art. 72 *TRIPs Agreement*, lihat juga: Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2009), hal. 92-93.

dimasukkannya dan diimplementasikannya aturan-aturan yang terdapat dalam *WTO Agreement* ke dalam peraturan perundang-undangan nasional telah membawa pengaruh terhadap Politik Hukum Nasional karena tidak sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma Politik Hukum Nasional.

Puncak dari segala bentuk pengaruh dan campur tangan asing ke dalam Sistem Hukum Nasional yang mempengaruhi pula Politik Hukum Nasional adalah ketika dewasa ini negara hukum yang hendak dibangun bukan negara hukum Pancasila sebagai suatu model ideal penyelenggaraan negara hukum<sup>142</sup>, akan tetapi mulai condong kepada konsep *rule of law*. Sebagaimana dipahami bahwa konsep *rule of law* yang dianut oleh Amerika Serikat telah berubah menjadi suatu doktrin yang hegemonik. Dewasa ini doktrin *rule of law* telah banyak mempengaruhi sistem hukum banyak negara di dunia, salah satunya Indonesia. Namun demikian yang perlu diingat, sebagaimana dinyatakan Satjipto Rahardjo, bahwa *rule of law* (begitu juga *rechtstaat*) sebagai suatu institusi sosial memiliki struktur sosiologis dan akar budaya sendiri, yakni masyarakat Eropa dan Amerika. *Rule of law*

---

<sup>142</sup> Lihat: Arief Hidayat dan Airlangga Surya Nagara, *Negara Hukum Pancasila: Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum*, Makalah disampaikan pada acara Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2011.

merupakan suatu legalisme liberal yang bertolak dari kebebasan individu, oleh karenanya memberikan penekanan yang berlebihan terhadap hak-hak individu.<sup>143</sup> *Rule of law* juga bukan merupakan institusi yang netral, akan tetapi seperti apa yang diungkapkan Max Weber, *rule of law* sebagai sistem hukum modern tidak bisa dilepaskan dari kelahiran industrialisasi yang kapitalis yang oleh karenanya mengabdikan pada dan melayani kepentingan industrialisasi-kapitalis.<sup>144</sup>

Pengaruh asing terhadap Politik Hukum Nasional sebagaimana diuraikan di muka merupakan bentuk campur tangan atau intervensi asing ke dalam Sistem Hukum Nasional. Intervensi asing tersebut jelas bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Apabila intervensi tersebut dibiarkan terus berlanjut, maka dikhawatirkan cepat atau lambat, sebagaimana apa yang terjadi dewasa ini, kepentingan asing akan mendominasi dan meminggirkan kepentingan nasional. Dengan terpinggirkannya kepentingan nasional tersebut maka muskil terwujud tujuan negara sebagaimana diamanatkan para *founding fathers* dalam Pembukaan UUD RI 1945. Namun demikian segala

---

<sup>143</sup> Lihat: Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 8-12.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hal. 24.

pengaruh asing terhadap Politik Hukum Nasional saat ini sebagai suatu *necessary evil*, sekalipun buruk, tetapi harus terjadi. Yang harus dilakukan dewasa ini adalah merevitalisasi kedudukan Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional, yakni dengan menegaskan kembali Pancasila sebagai paradigma Politik Hukum Nasional. Dengan mendudukan Pancasila sebagai paradigma Politik Hukum Nasional maka diharapkan dapat terbentuk Sistem Hukum Nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional sehingga terwujudlah cita-cita dan tujuan bangsa dan negara Indonesia.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Politik Hukum Ideal dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta

###### 1. Politik Hukum Ideal Hak Cipta

Meminjam *Stufenbautheorie* dari Hans Kelsen, semakin tinggi posisi suatu norma hukum dalam suatu sistem hukum, maka akan semakin kaya pula norma hukum tersebut dengan kandungan moral atau asas-asas umum<sup>172</sup>, oleh karenanya suatu norma hukum tertinggi dalam suatu sistem hukum merupakan *guiding principles* bagi norma-norma hukum dibawahnya. Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional merupakan *guiding principles* bagi norma-norma hukum dibawahnya, yang berarti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Dalam kedudukannya tersebut, maka prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila merupakan sumber politik hukum ideal yang menjadi pedoman penuntun dalam pembangunan dan pelaksanaan sistem hukum nasional.

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta sebagai salah satu bidang dalam sistem hukum nasional maka idealnya Hukum Hak Cipta di Indonesia harus sesuai dengan Politik Hukum Ideal Hak

---

<sup>172</sup> Satjipto Rahardjo, *Mendudukkan...*, *op.cit.*, hal. 35.



Cipta yang bersumber pada Pancasila. Adapun dalam menggali Politik Hukum Ideal Hak Cipta yang bersumber pada Pancasila, maka terlebih dahulu dibahas mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai suatu *guiding principles*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>173</sup>

a. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam Pidato Soekarno di hadapan Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, ia menyatakan bahwa:<sup>174</sup>

Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara ini ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa atau prinsip monoteisme merupakan prinsip pertama dan prinsip utama yang mendasari prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Notonagoro menyatakan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan (peri kemanusiaan), persatuan

---

<sup>173</sup> Bandingkan dengan *guiding principles* yang dirumuskan oleh A.B. Kusuma dalam: RM. A.B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensial “Orde Reformasi”*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2011), hal. 9.

<sup>174</sup> Lihat: RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2004), hal. 163, lihat juga: Bambang Rahardjo dan Syamsuhadi, ed., *Garuda Emas Pancasila Sakti*, (Jakarta: Yayasan Pembela Tanah Air Pusat, 1995), hal. 63-64.

indonesia (kebangsaan), kerakyatan, dan keadilan sosial”.<sup>175</sup>

Secara historis, sejatinya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan suatu bentuk kesadaran bangsa Indonesia atas kehidupan religius<sup>176</sup> yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Nusantara yang merupakan cikal-bakal bangsa Indonesia selama berabad-abad dan menjadi bagain penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Atas kenyataan sejarah peradaban bangsa tersebut maka bangsa Indonesia hendak melandaskan nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur dalam penyelenggaraan negara Indonesia.<sup>177</sup> Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa juga sejatinya mencerminkan pandangan bangsa Indonesia dalam memandang hakikat eksistensi manusia di dunia. Dalam pandangan bangsa Indonesia, manusia sebagai suatu fenomena, ada tidak dengan sendirinya, akan tetapi memiliki suatu relasi dengan fenomena lain yang memiliki kekuatan adikodrati diatas manusia. Relasi tersebut adalah bahwa manusia dan alam semesta yang ada merupakan

---

<sup>175</sup> Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal. 60.

<sup>176</sup> Religius merupakan suatu yang bersifat religi, atau berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan (yang merupakan kekuatan adikodrati diatas manusia). Lihat: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 26 November 2012.

<sup>177</sup> Lihat: Yudi Latif, *op.cit.*, hal. 110-113.

ciptaan Tuhan, oleh karenanya sudah sepatutnya manusia wajib Berketuhanan.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sejatinya digali dari nilai-nilai universal agama-agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang bersifat inklusif. Dengan sifat inklusif tersebut menunjukkan bahwa para *founding fathers* tidak bermaksud untuk mendirikan suatu negara berdasarkan agama tertentu, akan tetapi merangkul tidak hanya semua agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia akan tetapi juga kepercayaan kepada Tuhan dalam kerangka Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan suatu pedoman bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler ataupun negara agama, melainkan negara yang Berketuhanan atau negara kebangsaan yang religius.<sup>178</sup> Negara kebangsaan yang religus merupakan suatu bentuk *formelkompromis*<sup>179</sup> yang menjadi jalan tengah terbaik yang diambil oleh para *founding fathers* mengingat plularitas bangsa Indonesia dan juga merupakan kesadaran

---

<sup>178</sup> Lihat: Mohammad Mahfud M.D., "Pancasila Sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa", makalah disampaikan pada Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta, 2-3 Mei 2011.

<sup>179</sup> Yang dimaksud dengan *formelkompromis* dalam konteks Pancasila adalah bahwa dalam perumusan Pancasila tercapai suatu kompromi diantara para pihak yang berbeda pandangan untuk bekerja sama. Lihat: Frans Magnis Suseno, *Berebut Jiwa Bangsa*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 225 dan 228.

para *founding fathers* untuk tetap melanjutkan peradaban bangsa yang religius atau Berketuhanan. Dalam prinsip inilah letak kekuatan utama Pancasila sebagai *ligatur* karena memungkinkan terjadinya *overlapping consensus*<sup>180</sup> antara pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda.

Dalam kaitannya dengan suatu peradaban bangsa yang religius, Huntington dalam penelitiannya tahun 2006 menunjukkan bahwa geografi peradaban yang mampu bertahan adalah geografi peradaban yang berbasis keyakinan/ketuhanan.<sup>181</sup> Jauh sebelum Huntington mengungkapkan penelitiannya, *founding fathers* telah mampu merumuskan Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam dasar negara Indonesia. Hal tersebut menunjukkan betapa *founding fathers* memandang pentingnya suatu dasar moral negara terhadap perkembangan negara pada masa yang akan datang. Bung Hatta mengungkapkan bahwa “Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik.”<sup>182</sup>

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat dipahami bahwa pada hakikatnya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

---

<sup>180</sup> Lihat: Frans Magnis Suseno, *ibid.*, hal. 173-174.

<sup>181</sup> Lihat: Yudi Latif, *op.cit*, hal. 113.

<sup>182</sup> Lihat: *Ibid.*, hal. 117.

memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun kehidupan yang dilandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur agar tercipta suatu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terumus dalam Pancasila saat ini sejatinya merupakan penyempurnaan dari apa yang dikatakan Soekarno sebagai prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan. Dalam Pidato Soekarno di hadapan Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, ia menyatakan bahwa:

Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata: 'saya seorang nasionalis, tapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan', '*my nationalism is humanity*'... Kita bukan saja harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa... Inilah *filosofisch principle* yang nomor dua, ... yang boleh saya namakan 'internasionalisme'. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitanisme, yang tidak mau adanya kebangsaan....<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Pemadatan isi pidato dalam kutipan dengan maksud untuk memperjelas prinsip internasionalisme yang dimaksud Soekarno, tanpa maksud untuk mengaburkan atau mengubah makna dari pidato sebenarnya. Pengutipan ini mengikuti pengutipan yang dilakukan Yudi Latif dalam: *Ibid.*, hal. 125. Untuk membaca naskah asli pidato Soekarno

Dalam pandangan bangsa Indonesia, manusia sebagai suatu fenomena, ada tidak dengan sendirinya, akan tetapi memiliki suatu relasi dengan fenomena lain yang memiliki kekuatan adikodrati diatas manusia, yakni Tuhan. Disamping itu bangsa Indonesia juga memandang bahwa manusia juga memiliki relasi dengan fenomena lainnya yakni alam semesta dan manusia lainnya itu sendiri. Dalam kenyataannya umat manusia terdiri atas beranekaragam bangsa, suku bangsa, etnik, adat budaya, maupun agama. Dalam kaitannya dengan keanekaragaman umat manusia tersebut maka bangsa Indonesia memiliki suatu pandangan hidup bahwa seluruh umat manusia di dunia sekalipun berbeda satu sama lain adalah setara dan bersaudara. Pandangan hidup bangsa Indonesia atas persaudaraan umat manusia itulah yang menjadi dasar lahirnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Secara filosofis, religiusitas bangsa Indonesia yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, merupakan dasar yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pandangan

---

pada bagian tersebut dapat melihat pada: RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya...*, *op.cit.* hal. 160, lihat juga: Bambang Rahardjo dan Syamsuhadi, *ed.*, *op.cit.*, hal. 57-59.

hidup bangsa Indonesia. Secara historis, kuatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sumbangan dari pluralitas atau kemajemukan bangsa Indonesia merupakan gabungan dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki beragam etnik, adat budaya, maupun agama. Disamping itu, letak geografis Indonesia yang menjadi titik temu penjelajahan bahari dari berbagai peradaban membuat bangsa Indonesia menjadi semakin luas dan kaya dalam memandang universalitas manusia. Kuatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pandangan hidup bangsa Indonesia juga merupakan sumbangan dari kepedihan dan penderitaan sebagai bangsa yang terjajah selama berabad-abad.<sup>184</sup> Berdasarkan berbagai kenyataan dan pengalaman tersebut terbentuklah suatu sintesis pemikiran yang terangkum dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mengutip pendapat Muhammad Hatta yang memandang bahwa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki dua konsekuensi. *Pertama*, konsekuensi ke dalam, bahwa prinsip tersebut menjadi pedoman negara untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak dasar/asasi manusia, dengan menjalankan fungsi

---

<sup>184</sup> Lihat: Yudi Latif, *Ibid.*, hal. 2-3 dan 237.

“melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. *Kedua*, menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia<sup>185</sup>, maka berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia ditempuh melalui prinsip keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan hak sosial (kolektif),<sup>186</sup> serta melalui prinsip bahwa setiap manusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan. Dengan terciptanya keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan hak sosial (kolektif) serta kesadaran atas kewajiban dan tanggung jawab manusia dalam kehidupan, maka akan terwujud suatu harmoni dalam kehidupan manusia dimana perlindungan hak asasi manusia tidak akan menegasikan hak sosial, begitu pula sebaliknya,

---

<sup>185</sup> Frans Magniz Suseno menyatakan bahwa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan tanpa kecuali terhadap hak asasi manusia. Ia menganggap bahwa hak asasi manusia merupakan operasionalisasi sikap hormat terhadap martabat setiap orang dan setiap kelompok orang sebagai manusia dan tidak terdisposisi. Lihat: Frans Magniz Suseno, “Nilai-nilai Pancasila Sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi”, makalah disampaikan pada Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta, 2-3 Mei 2011, hal. 5.

<sup>186</sup> Lihat: *Ibid.*, hal. 242-243.



perlindungan hak sosial tidak akan menegasikan hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menuntut terwujudnya suatu harmoni kehidupan manusia dengan Tuhan memiliki dimensi vertikal, sedangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang menuntut terwujudnya suatu harmoni antar umat manusia memiliki dimensi horisontal. Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, oleh karena menjadi suatu aksioma bahwa terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut suatu kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan moralitas.

c. Prinsip Persatuan Indonesia

Prinsip persatuan Indonesia sejatinya merupakan penyempurnaan dari apa yang dikatakan Soekarno sebagai prinsip kebangsaan Indonesia. Dalam Pidato Soekarno di hadapan Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, pada urutan yang pertama dalam rumusan Soekarno mengenai dasar negara, ia menyatakan bahwa:<sup>187</sup>

---

<sup>187</sup> Lihat: RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya...*, *op.cit.*, hal.156-158, lihat juga: Bambang Rahardjo dan Syamsuhadi, *ed.*, *op.cit.*, hal. 51-54.

Pertama-tama saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang,....

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi 'semua buat semua'.... Dasar pertama yang dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia....

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, Tanah Air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah Tanah Air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah s.w.t menjadi kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah Tanah Air kita.

Prinsip persatuan Indonesia meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia.<sup>188</sup> Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang sarat akan nilai-nilai kemanusiaan yang menerima bahwa umat manusia beranekaragam namun demikian setara dan bersaudara berakar dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti kebangsaan Indonesia menjadi akar dari aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks ke dalam maupun ke luar sebagaimana apa yang diungkapkan Bung

---

<sup>188</sup> Yudi Latif, *op.cit.*, hal 369.

Hatta menyangkut prinsip kemanusiaan. Prinsip persatuan atau kebangsaan Indonesia juga merupakan simpul perekat yang kuat bagi kemajemukan bangsa Indonesia sebagai bagian dari tamansari kemajemukan dunia<sup>189</sup> sebagaimana apa yang dikatakan Soekarno bahwa “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar dari buminya nasionalisme”.

Yudi Latif mengungkapkan bahwa kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan Clifford Gertz mengenai Indonesia. Ia mengibaratkan Indonesia sebagai anggur tua dalam botol baru, Indonesia merupakan gugusan masyarakat lama dalam negara baru.<sup>190</sup> Nama Indonesia sebagai bentuk proyek “nasionalisme politik” yang digaungkan *founding fathers* tahun 1920-an, sejatinya bukan suatu hal yang baru, akan tetapi lahir dari peradaban masyarakat Nusantara yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hidup dan berkembang di Nusantara.<sup>191</sup>

---

<sup>189</sup> *Ibid.*, hal. 250, lihat juga: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, *op.cit.*, hal. 60-61.

<sup>190</sup> Clifford Geertz, *Old Societies New States*, (New York: The Free Press, 1963), sebagaimana dikutip dalam Yudi Latif, *op.cit.*, hal. 250

<sup>191</sup> *Loc.cit.* Lihat juga: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, *op.cit.*, hal. 58.

Prinsip kebangsaan serta nama Indonesia sebagai bentuk proyek “nasionalisme politik” yang digaungkan oleh Soekarno serta *founding fathers* adalah upaya untuk membangun rasa kebangsaan diatas kemajemukan bangsa Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa membangun rasa kebangsaan, membangun rasa persatuan, membangun rasa kekeluargaan di dalam masyarakat majemuk bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya, Soekarno dengan meminjam pemikiran Ernest Renan dan Otto Bauer mencoba untuk membangkitkan rasa kebangsaan Indonesia. Meminjam pendapat Ernest Renan, Soekarno mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah satu gerombolan manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu untuk hidup bersama (*le desir d’etre ensemble*). Soekarno mengatakan pula bahwa bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan yang hidup dengan *le desir d’etre ensemble* di atas daerah-daerah kecil seperti Minangkabau, Jogja, Sunda, atau Bugis, akan tetapi bangsa Indonesia adalah satu kesatuan besar atas seluruh wilayah Nusantara. Dengan meminjam pendapat Otto Bauer, Soekarno kembali menguatkan rasa kebangsaan Indonesia, dengan mengatakan bahwa Indonesia sebagai suatu bangsa yang lahir dari pengalaman dan nasib yang

sama (*Eine Nation ist eine aus Schicksals gemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*). Pengalaman tersebut adalah pengalaman sebagai bangsa yang terjajah selama berabad-abad sehingga merupakan suatu bangsa yang bersatu.

Kemajemukan bangsa Indonesia juga berusaha disatukan melalui semangat “semua buat semua” yang digaungkan oleh Soekarno. Semangat “semua buat semua” tidak lain adalah apa yang Soekarno sebut sebagai gotong royong. Negara gotong royong yang dimaksud Soekarno adalah negara yang didirikan atas suatu usaha bersama dimana dalam gotong royong bangsa Indonesia melakukan “pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat semua, keringat semua buat semua.” Dengan semangat gotong royong ini diharapkan dapat melebur semua perbedaan dalam arti negatif yang ada sebagai konsekuensi kemajemukan bangsa, sehingga terbentuklah suatu negara persatuan tidak hanya dalam arti formil, namun juga dalam arti materiil, dimana segala elemen bangsa bersatu dan bahu-membahu membangun dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Apabila mengaitkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dengan prinsip persatuan Indonesia maka terbentuklah suatu sintesis pemikiran bahwa kebangsaan Indonesia (nasionalisme Indonesia) bukanlah nasionalisme sempit yang bersifat chauvinis<sup>192</sup>, provinsialis<sup>193</sup>, serta etnosentris<sup>194</sup> yang memecah belah akan tetapi merupakan nasionalisme dalam arti luas yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia di dunia sebagai sesama ciptaan Tuhan YME.<sup>195</sup>

d. Prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat  
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan-Perwakilan

Prinsip keempat dalam Pancasila adalah prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

---

<sup>192</sup> Merupakan paham atau pandangan patriotisme yang fanatik, mengagungkan bangsa atau negaranya sendiri dan memandang rendah bangsa atau negara lainnya, <http://www.artikata.com/arti-32098-chauvinist.html>, diakses tanggal 27 November 2012.

<sup>193</sup> Merupakan paham atau pandangan yang bersifat kedaerahan, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 27 November 2012.

<sup>194</sup> Merupakan sikap atau pandangan yg berpangkal pd masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dng sikap dan pandangan yg meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 27 November 2012.

<sup>195</sup> Lihat: Yudi Latif, *op.cit.*, hal. 373, Lihat juga: Frans Magniz Suseno, *Nilai-nilai...*, *op.cit.*, hal.6, lihat juga: Sudjito, "Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila", makalah disampaikan pada Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta, 2-3 Mei 2011, hal. 8, lihat juga: Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2008), hal. 82.

permusyawaratan-perwakilan. Prinsip ini didasarkan pada kesadaran *founding fathers* atas kehidupan yang berdaulat rakyat dan bertata kekeluargaan yang telah tumbuh dan berkembang dalam peradaban Nusantara selama beribu-ribu tahun lamanya. Bahkan sekalipun dalam kondisi terjajah, suasana daulat rakyat dan kekeluargaan tetap tumbuh dan berkembang dalam kultur masyarakat Indonesia baik melalui institusi adat maupun institusi keagamaan yang ada. Berangkat dari kesadaran tersebut maka *founding fathers* mencoba untuk merumuskan prinsip demokrasi khas Indonesia yang berbeda dengan demokrasi khas barat. Jauh hari sebelum Soekarno mengemukakan pendapatnya mengenai demokrasi permusyawaratan, pada 1932, Hatta mengemukakan pendapatnya tentang demokrasi khas Indonesia, sebagai berikut:

Jadinya, kita tiada membuang apa yang baik pada asas-asas lama, tidak mengganti demokrasi asli Indonesia dengan barang impor. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, akan tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada tingkat yang lebih tinggi, menurut kehendak pergaulan hidup sekarang.

Selanjutnya, kesadaran *founding fathers* mengenai kehidupan bangsa Indonesia yang berdaulat rakyat dan bertata kekeluargaan nampak jelas dalam masa awal persidangan BPUPKI. Hal tersebut sebagaimana terungkap

pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Muh. Yamin mengungkapkan mengenai dasar kedaulatan rakyat sebagai tujuan kemerdekaan, dan permusyawaratan sebagai salah satu dasar negara. Disamping itu Woerjaningrat menyatakan bahwa “kemerdekaan Indonesia harus bersendi kekeluargaan” sebagaimana yang diungkapkan oleh Soesanto Tirtoprodjo yang menyatakan rasa kekeluargaan sebagai fundamen bernegara. Selanjutnya pada sidang tanggal 30 Mei 1945, Rachim Pratallykrama mengungkapkan perihal kepala negara dan badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Ki Bagoes Hadikoesoemo menekankan pentingnya asas permusyawaratan dan Soepomo menekankan mengenai semangat kekeluargaan.<sup>196</sup>

Dalam perjalanannya, prinsip demokrasi khas Indonesia tersebut memperoleh bentuk yang lebih nyata sebagai prinsip demokrasi permusyawaratan/perwakilan sebagaimana diungkapkan Soekarno dalam pidatonya di hadapan Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, bahwa:<sup>197</sup>

Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar

---

<sup>196</sup> Yudi Latif, *op.cit.* hal. 420.

<sup>197</sup> Lihat: RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya..., op.cit.*, hal. 160-161, lihat juga: Bambang Rahardjo dan Syamsuhadi, *ed., op.cit.*, hal. 59.



permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Prinsip demokrasi permusyawaratan/perwakilan merupakan gambaran nyata dari kehidupan bangsa Indonesia yang berdaulat rakyat dan bertata kekeluargaan erat. Prinsip demokrasi permusyawaratan/perwakilan merupakan cerminan pandangan hidup bangsa Indonesia, kepribadian hidup bangsa Indonesia, dan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam membangun suatu kehidupan sipil dan politik baru dalam kerangka negara Indonesia.

Dalam kerangka negara Indonesia merdeka maka prinsip demokrasi harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Inilah merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia yang telah sejak lama terpinggirkan hak-hak sipil dan politiknya sebagai akibat dari penindasan oleh kolonialisme dan feodalisme. Dalam kerangka negara Indonesia merdeka pula prinsip kerakyatan harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui suatu hikmat kebijaksanaan. Dengan dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan maka pelaksanaan kedaulatan rakyat bersendi pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan kearifan budi pekerti, sehingga terbentuklah suatu daulat rakyat yang berintikan kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan keadilan. Dengan hikmat kebijaksanaan, baik para wakil rakyat dan penyelenggara negara menjalankan tugasnya penuh tanggung jawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun secara horisontal kepada seluruh rakyat Indonesia.<sup>198</sup> Dengan hikmat kebijaksanaan pulalah negara gotong royong yang dicita-citakan bersama dapat terwujud, dimana masing-masing elemen bangsa melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan negara dengan baik, jujur, dan tulus sehingga dapat melebur segala perbedaan yang ada dalam arti negatif.

Melalui demokrasi pemusyawaratan diharapkan pula akan terhapus hegemoni mayoritas terhadap minoritas yang biasa terjadi dalam demokrasi barat. Dimana melalui musyawarah tiap-tiap elemen terbesar hingga terkecil memiliki kedudukan dan hak yang setara.<sup>199</sup> Melalui musyawarah itu pula terjaga suatu harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

---

<sup>198</sup> Sudjito, *op.cit.*, hal. 9.

<sup>199</sup> Kedudukan dan hak yang setara dalam musyawarah oleh Soediman Kartohadiprodjo dikatakan sebagai “berdiri sama tegaknya, duduk sama rendahnya”. Lihat: Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Gatra Pustaka, 2010), hal. 235.

dimana keputusan yang diambil bukan berdasarkan atas kalah dan menang, akan tetapi merupakan suatu konsensus bersama yang memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Dengan suatu konsensus maka seluruh elemen yang ada di dalamnya memiliki tanggung jawab atas keputusan tersebut.

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat dipahami bahwa prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan adalah prinsip demokrasi khas Indonesia yang berbeda dengan prinsip demokrasi lainnya. Prinsip demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai kemajemukan dengan semangat persaudaraan dan kebangsaan yang kuat, dengan tujuan mewujudkan sautu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>200</sup>

e. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi prinsip pamungkas dalam rumusan Pancasila. Namun demikian prinsip keadilan sosial sejatinya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan

---

<sup>200</sup> Yudi Latif, *op.cit.*, hal. 485.

dengan prinsip demokrasi permusyawaratan/perwakilan. Hal tersebut setidaknya nampak dari petikan pidato Soekarno dihadapan sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, sebagai berikut.<sup>201</sup>

Prinsip nomor 4, sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka....

Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!....

badan permusyawaratan yang akan kita buat, hendaknya bukan bada permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: *politieke rechtvaardigheid* dan *sociale rechtvaardigheid*.

Berdasarkan petikan pidato Soekarno tersebut menunjukkan betapa pentingnya demokrasi ekonomi disamping demokrasi politik dalam pembangunan negara Indonesia. Hal tersebut juga semakin diteguhkan oleh pemikiran Hatta yang memandang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi adalah hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hatta berkata bahwa "Cita-cita demokrasi kita lebih luas, tidak saja demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi."<sup>202</sup>

---

<sup>201</sup> Lihat: RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya...*, *op.cit.*, hal. 162-163, lihat juga: Bambang Rahardjo dan Syamsuhadi, *ed.*, *op.cit.*, hal. 61-62.

<sup>202</sup> Yudi Latif, *op.cit.*, hal. 492.

Berdasarkan prinsip keadilan sosial, maka jelas bahwa negara Indonesia mempunyai kehendak tidak hanya untuk memuliakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, akan tetapi bahwa penyelenggaraan negara yang dimaksud juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yakni suatu konsep kesejahteraan tidak hanya bagi bangsa Indonesia, namun juga bagi umat manusia. Dengan demikian maka berdasarkan prinsip keadilan sosial, tidak dikehendaki dianutnya suatu sistem ekonomi liberal. Ekonomi liberal bertumpu pada dalil “*laissez faire, laissez aller*” yang menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonomi kepada mekanisme pasar sehingga melemahkan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar, maka akan membentuk individu yang menjadi predator bagi individu lainnya, yang pada akhirnya berujung pada suatu bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang yang diwarnai berbagai kesenjangan sosial di dalam masyarakatnya, menganut sistem ekonomi liberal sama saja “mengadu petinju kelas berat dan kelas bulu” dalam satu ring pertandingan. Hal tersebut merupakan

suatu ketidakadilan. Dalam prinsip keadilan sosial berbagai kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat hendak dikembalikan ke titik keseimbangan yang berjalan lurus yang hanya dapat tercapai melalui pemberian perlakuan yang berbeda sesuai dengan kondisi kesenjangan dalam masyarakat tersebut. Dalam kondisi tersebut hendaknya kegiatan ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif yang berlandaskan asas gotong royong dan kekeluargaan. Peran individu dan mekanisme pasar diberdayakan dalam kondisi yang wajar dan berkeadilan dimana negara memainkan fungsi vital, baik sebagai *provider, regulator, enterpreuner, maupun umpire*.<sup>203</sup> Prinsip keadilan sosial dalam usaha mewujudkan kesejahteraan umum juga menghendaki dikuasainya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara; termasuk pula bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>204</sup>

---

<sup>203</sup> Empat fungsi negara, lihat: Nanik Trihastuti, *Tanggung Jawab Perusahaan Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Mineral Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Ringkasan Disertasi dalam Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004, hal. 33.

<sup>204</sup> Lihat: Yudi Latif, *op.cit.*, hal. 46 dan 584-585. Lihat juga: Frans Magnis Suseno, *Nilai-nilai...*, *op.cit.*, hal. 6.

Dalam prinsip keadilan sosial khas Indonesia dikehendaki adanya suatu keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial oleh karenanya setiap hak milik individu selalu mempunyai fungsi sosial. Dalam prinsip keadilan sosial khas Indonesia yang berwawasan teosentris (Ketuhanan) maka kegiatan pemenuhan kesejahteraan manusia (kegiatan ekonomi) harus dibebaskan dari anasir-anasir pemberhalaan materi, sehingga tercipta suatu institusi ekonomi yang berbasis nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan kearifan budi pekerti. Dalam konteks inilah Indonesia sebagai negara kesejahteraan menjelma sebagai *religious welfare state* melalui ekonomi gotong-royong.

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa disatu sisi prinsip keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis dari prinsip Ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip kebangsaan, serta prinsip demokrasi permusyawaratan/ perwakilan. Namun demikian, di sisi lain otentisitas pengamalan Pancasila bisa dinilai dari perwujudan keadilan sosial dalam bentuk kesejahteraan umum.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> Yudi Latif, *op.cit.*, hal. 45.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip Pancasila di muka, maka terkandung politik hukum ideal sebagai berikut:

- a. Hukum harus dibangun dan dilaksanakan dengan berbasis pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur;
- b. Hukum harus dibangun dan dilaksanakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta harkat dan martabat manusia;
- c. Hukum harus dibangun dan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan nasional;
- d. Hukum harus dibangun dan dilaksanakan dalam kerangka negara hukum yang demokratis;
- e. Hukum harus dibangun dan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Cipta, maka pada hakikatnya Politik Hukum Ideal Hak Cipta yang bersumber pada kelima prinsip Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa maka terkandung suatu Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa **perlindungan Hak Cipta yang diberikan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur.**
- b. Berdasarkan prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab maka terkandung suatu Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta harus menjunjung tinggi



nilai-nilai kemanusiaan serta harkat dan martabat manusia. Yang dimaksud dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta harkat dan martabat manusia adalah **mencakup aspek pencipta sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial dan aspek masyarakat tempat dimana ciptaan tersebut berada. Dalam aspek pencipta sebagai individu maka perlindungan Hak Cipta yang diberikan merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam aspek masyarakat maka setiap Ciptaan dan Hak Cipta harus memberi kemanfaatan bagi manusia, disamping itu perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam rangka memacu etos masyarakat dalam mencipta. Dalam aspek pencipta sebagai makhluk sosial dalam hubungannya dengan masyarakat maka perlindungan Hak Cipta diberikan dengan memperhatikan keseimbangan atau harmoni antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / Kolektif).**

- c. Berdasarkan prinsip Persatuan Indonesia maka terkandung suatu Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa **perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka kepentingan nasional.** Secara harfiah kepentingan nasional dapat

diartikan sebagai suatu tujuan, harapan, serta cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Dalam konteks negara Indonesia maka yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah mewujudkan tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945 yakni (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka kepentingan nasional yakni: **(1) perlindungan Hak Cipta harus diberikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi tertentu; (2) perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; (3) perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yakni untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kesusastraan, serta bentuk-bentuk kebudayaan lainnya; (4) perlindungan Hak Cipta harus dilakukan dalam kerangka negara yang merdeka dan**

- berdaulat; (5) perlindungan Hak Cipta harus diberikan tidak hanya bagi Warga Negara Indonesia akan tetapi juga kepada warga negara asing dalam batas-batas kewajaran serta tidak merugikan kepentingan nasional;**
- d. Berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka terkandung suatu Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa **perlindungan Hak Cipta Nasional harus diberikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.** Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial maka **(1) perlindungan Hak Cipta diberikan dengan memperhatikan keseimbangan atau harmoni antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / Kolektif); (2) perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang berbeda dalam rangka tercapainya suatu keadilan; (3) cabang-cabang Hak Cipta yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup masyarakat harus dikuasai negara dan digunakan bagi kemajuan masyarakat.**

## **2. Politik Hukum Dasar Hak Cipta**

Pancasila sebagai politik hukum ideal yang kaya akan kandungan moral dan asas-asas atau prinsip-prinsip umum dalam pembangunan sistem hukum nasional dijabarkan menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma dasar yang disusun ke dalam suatu undang-undang dasar. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, hingga saat ini telah berlaku tiga undang-undang dasar, yakni (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebut UUD RI 1945, berlaku pada 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949, kemudian melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlaku kembali hingga saat ini dengan mengalami perubahan sebanyak empat kali dalam kurun waktu tahun 1999, 2000, 2001, 2002, dan disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945; (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat disebut sebagai Konstitusi RIS, berlaku pada 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950; (3) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 disebut sebagai UUDS 1950, berlaku pada 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959. Dalam setiap undang-undang dasar yang pernah dan tengah berlaku tersebut, terkandung suatu politik hukum sebagaimana politik hukum ideal yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karenanya setiap undang-undang dasar memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara, dan merupakan hukum dasar

dalam peraturan perundang-undangan, atau mengandung suatu politik hukum dasar.<sup>206</sup> Adapun Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam undang-undang dasar tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Politik Hukum Dasar Hak Cipta Yang Terkandung Dalam UUD RI 1945**

Setelah melalui pembahasan panjang dalam sidang-sidang BPUPKI maka rancangan undang-undang dasar akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945). Dalam UUD RI 1945 setidaknya terkandung kurang lebih 80 (delapan puluh) norma dasar yang merupakan politik hukum dasar<sup>207</sup>.

Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan hukum setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka dalam UUD RI 1945 dimuat ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD RI 1945 yang menetapkan bahwa: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Pasal II Aturan Peralihan UUD RI 1945 selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 2 Tahun

---

<sup>206</sup> Lihat: Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 84-88.

<sup>207</sup> RM. A.B. Kusuma, *Sistem...*, hal. 9.

1945 tentang Badan Negara dan Peraturan Yang Ada Sebelum Berdirinya Negara RI. Pasal II Aturan Peralihan UUD RI 1945 merupakan salah satu tonggak awal pembangunan sistem hukum nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi suatu permasalahan bahwa sekalipun Aturan Peralihan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di Indonesia mengingat situasi dan kondisi yang serba mendesak, serta dasar pemberlakuan peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan UUD RI 1945, namun demikian tetap membawa pengaruh terhadap Politik Hukum Nasional. Hal tersebut dikarenakan aturan peralihan yang terdapat di dalam undang-undang dasar cenderung bersifat spontan harus dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan kolonial Belanda yang tidak hanya bernafas kolonialisme dan imperialisme, tetapi juga memiliki watak sosio-kultural liberalis-individualis<sup>208</sup> sehingga tidak sesuai dengan politik hukum ideal dan politik hukum dasar.

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta, meskipun UUD RI 1945 tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai

---

<sup>208</sup> Lihat: Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hal. 38 & 40-41.

Politik Hukum Dasar Hak Cipta, namun demikian secara implisit Politik Hukum Dasar Hak Cipta dapat ditemukan dalam beberapa pasal UUD RI 1945. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa dalam setiap konstitusi terkandung suatu gagasan besar dan cita-cita suatu bangsa, disamping itu juga terkandung pandangan kemasyarakatan, kosmologi, cita hukum, dan hal-hal mendasar lainnya. Hal-hal tersebut kemungkinan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam konstitusi, oleh karenanya diperlukan usaha untuk menarik keluar (*to tease out*) dari dalam konstitusi. Dengan demikian dalam membaca suatu undang-undang dasar harus dilakukan meresapi maknanya sebagai suatu risalah dan pernyataan moral bangsa Indonesia (undang-undang dasar sebagai suatu dokumen moral) yang oleh Ronald Dworkin disebut sebagai "*the moral reading of the constitution*".<sup>209</sup>

Politik Hukum Dasar Hak Cipta dapat ditarik keluar dari pasal-pasal sebagai berikut:

*Pertama*, Pasal 27 ayat (1), dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

---

<sup>209</sup> Satjipto Rahardjo, *Mendudukan...*, *op.cit.*, hal. 29-30, 41-42, dan 77-78.

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal tersebut mengandung suatu Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan sebagai wujud penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia kepada seluruh Warga Negara Indonesia -tanpa adanya diskriminasi tertentu- atas karya ciptaannya sepanjang tidak melanggar hukum, kepentingan umum, serta hak asasi manusia lainnya. Sebagai suatu bentuk Hak Asasi Manusia maka setiap Warga Negara Indonesia wajib memberikan penghormatan dan perlindungan atas setiap Hak Cipta.

*Kedua*, Pasal 27 ayat (2), dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut mengandung suatu Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa setiap pemegang Hak Cipta berhak untuk mengambil manfaat ekonomi (hak ekonomi) dari setiap ciptaannya. Namun demikian pemanfaatan ekonomi atas suatu ciptaan harus dalam batas-batas kewajaran atau tidak boleh bersifat eksploitatif sehingga merugikan kepentingan ekonomi pihak lainnya. Dengan pemanfaatan ekonomi yang non-eksploitatif maka



masyarakat dapat memperoleh suatu ciptaan dengan mudah dan harga yang wajar dan terjangkau.

*Ketiga*, Pasal 29 ayat (1), dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal tersebut mengandung suatu Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa ciptaan yang mendapatkan perlindungan adalah ciptaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur. Setiap bentuk ciptaan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur tidak dapat mendapatkan perlindungan Hak Cipta dan disebarluaskan pada masyarakat.

*Keempat*, Pasal 31 ayat (1), dalam pasal ini dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Pasal tersebut mengandung suatu Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa setiap perlindungan Hak Cipta diberikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karenanya perlindungan Hak Cipta bukanlah suatu perlindungan yang absolut dan berorientasi pada perlindungan individu semata, akan tetapi dengan perlindungan Hak Cipta, ciptaan tersebut dapat diakses dengan wajar dan mudah

oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat.

*Kelima*, Pasal 32, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional.” Pasal tersebut mengandung suatu Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta harus dapat memajukan dan mengembangkan segala bentuk kebudayaan nasional.

*Keenam*, Pasal 33 ayat (1), dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Hampir serupa dengan politik hukum dasar yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) maka dalam Pasal 33 ayat (1) terkandung suatu Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa pemanfaatan nilai ekonomi Hak Cipta sebagai bagian dari kegiatan perekonomian harus dilakukan dalam batas yang wajar dengan mengembangkan semangat solidaritas dan tolong menolong, sehingga tidak terjadi suatu bentuk pemanfaatan yang eksploitatif, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat tidak hanya kesenjangan ekonomi, namun juga kesenjangan pengetahuan, karena terjadi keterbatasan akses terhadap suatu ciptaan yang notabene sangat bermanfaat bagi pengembangan

masyarakat. Asas kekeluargaan juga mengandung suatu politik hukum dasar bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan dengan memperhatikan keseimbangan atau harmoni antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif).

*Ketujuh*, Pasal 33 ayat (2), dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Pasal tersebut mengandung suatu Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa cabang-cabang Hak Cipta yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup masyarakat harus dikuasai negara dan digunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara dalam hal ini adalah tidak dalam arti yang sempit akan tetapi dikuasai oleh negara baik sebagai *provider*, *regulator*, *enterpreuner*, maupun *umpire*. Penguasaan oleh negara harus dalam batas-batas kewajaran dan tidak merugikan kepentingan pencipta.

*Kedelapan*, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2). Dalam pasal-pasal tersebut terkandung pula Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa Perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang berbeda dalam rangka

tercapainya suatu keadilan. Yang dimaksud dengan perlakuan berbeda adalah perlakuan khusus yang diberikan negara kepada pihak yang lemah agar dapat mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan pihak yang lebih kuat. Dalam konteks perlindungan Hak Cipta maka negara harus memberikan perlakuan khusus kepada bangsa Indonesia agar dapat mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan negara-negara maju.

**b. Politik Hukum Dasar Hak Cipta Yang Terkandung Dalam Konstitusi RIS**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 berlaku sebuah undang-undang dasar baru, yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS). Konstitusi RIS merupakan undang-undang dasar Republik Indonesia Serikat<sup>210</sup> yang didirikan merupakan hasil perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949 - 2 November 1949, di Den Haag, Belanda. KMB dilaksanakan dalam rangka meredam segala bentuk agresi dan kekerasan Belanda

---

<sup>210</sup> Konstitusi RIS berlaku pada wilayah Republik Indonesia Serikat, sedangkan dalam wilayah Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat tetap berlaku UUD RI 1945. Lihat: Jimly Asshiddiqie, *konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2006), hal. 45-46.

terhadap Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum diadakannya KMB, Belanda telah melakukan Agresi Militer I (21 Juli 1947) dan Agresi Militer II (19 Desember 1949). Untuk memecah belah, Belanda mendirikan beberapa negara baru di wilayah Indonesia yakni Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948), dan Negara Madura (1948), negara – negara inilah ditambah Republik Indonesia yang kemudian menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat melalui KMB. Adapun KMB menghasilkan tiga kesepakatan yaitu: (1) Pembentukan Republik Indonesia Serikat; (2) penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; (3) Pembentukan Uni Republik Indonesia Serikat - Belanda.<sup>211</sup>

Dalam kaitannya dengan Politik Hukum Dasar Hak Cipta, dalam Konstitusi RIS juga tidak tercantum secara eksplisit mengenai Politik Hukum Dasar Hak Cipta, namun demikian secara implisit Politik Hukum Dasar Hak Cipta dapat ditemukan dalam beberapa pasal Konstitusi RIS, khususnya pada Bagian 5 tentang Hak-Hak dan

---

<sup>211</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hal. 44-46.

Kebebasan Dasar Manusia serta Bagian 6 tentang Asas-Asas Dasar, sebagai berikut:

*Pertama*, Pasal 7 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 36 ayat (2). Dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa “Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang.” Dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.” dan “Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang.” Dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Pembatasan hak (onteigening) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan2 undang-undang.

Dalam Pasal 36 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan2 undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketajaman masing2 untuk turut serta dalam perkembangan sumber2 kemakmuran negeri.

Pasal tersebut mengandung suatu Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkarya dan menghasilkan suatu ciptaan serta mendapatkan perlindungan Hak Cipta sebagai wujud

pernghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Atas ciptaanya maka pencipta melalui Hak Cipta yang dimilikinya mempunyai hak untuk mengambil manfaat ekonomi darinya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, oleh karena itu Hak Cipta merupakan hak milik individu yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dengan semena-mena. Namun demikian perlindungan Hak Cipta bukanlah suatu perlindungan yang absolut dan berorientasi pada perlindungan individu semata. Hak Cipta yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian dan kesusastraan adalah menyangkut kepentingan masyarakat luas, oleh karenanya dimungkinkan pemanfaatan Hak Cipta untuk kepentingan masyarakat dengan pemberian imbal balik yang layak.

*Kedua*, Pasal 36 ayat (1), dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Meninggikan kemakmuran rakyat adalah suatu hal yang terus-menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewajibannya senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.

Pasal tersebut mengandung suatu Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya pemerintah dapat menguasai cabang-cabang

Hak Cipta yang penting dan menguasai hajat hidup masyarakat, sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Tentunya penguasaan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan pencipta sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana politik hukum dasar yang terkandung dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Konstitusi RIS. Dalam Pasal 36 ayat (1) terkandung pula Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa Perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang berbeda dalam rangka tercapainya suatu keadilan. Yang dimaksud dengan perlakuan berbeda adalah perlakuan khusus yang diberikan negara kepada pihak yang lemah agar dapat mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan pihak yang lebih kuat. Dalam konteks perlindungan Hak Cipta maka negara harus memberikan perlakuan khusus kepada bangsa Indonesia agar dapat mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan negara-negara maju.

*Ketiga*, Pasal 38, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan



kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan.

Pasal tersebut mengandung suatu Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta harus dapat memberikan perlindungan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kesenian dan kesusastraan serta bentuk-bentuk budaya nasional lainnya. Disamping itu perlindungan Hak Cipta diberikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yakni untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kesenian dan kesusastraan serta bentuk-bentuk budaya nasional lainnya. Dengan perlindungan Hak Cipta maka diharapkan akan lebih membuka akses masyarakat terhadap suatu ciptaan, sehingga dapat meningkatkan tingkat perkembangan masyarakat.

**c. Politik Hukum Dasar Hak Cipta Yang Terkandung Dalam UUDS 1950**

Dalam perjalanannya, Republik Indonesia Serikat tidak dapat bertahan lama. Bentuk negara serikat dipandang sarat dengan kepentingan politis pemerintah Belanda dan dianggap memperlemah bersatunya bangsa Indonesia. Oleh karenanya muncul keinginan untuk kembali

bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian pada tanggal 19 Mei 1950 dituangkan dalam piagam persetujuan yang berisi kesepakatan untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun dalam rangka kembali kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuklah suatu undang-undang dasar baru yang bersifat sementara, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.<sup>212</sup>

Pada dasarnya, Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam UUDS 1950 memiliki kesamaan dengan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam Konstitusi RIS. Hal tersebut dikarenakan ide dasar pasal-pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dan asas-asas dasar yang menjadi sumber Politik Hukum Dasar Hak Cipta dalam UUDS 1950 hampir seluruhnya mengambil oper dari pasal-pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dan asas-asas dasar yang tercantum di dalam Konstitusi RIS. Disamping itu, ide dasar beberapa pasal UUDS 1950 juga mengambil oper beberapa pasal

---

<sup>212</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hal. 46-48.

UUD RI 1945 sehingga beberapa pasal UUDS 1950 memiliki kesamaan Politik Hukum Dasar Hak Cipta dengan beberapa pasal UUD RI Tahun 1945.

Secara singkat pasal-pasal UUDS 1950 yang memiliki kesamaan kandungan Politik Hukum Dasar Hak Cipta dengan pasal-pasal Konstitusi RIS dan UUD RI 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 ayat (2) UUDS 1950 memiliki kandungan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang sama dengan Pasal 7 ayat (2) Konstitusi RIS;
- 2) Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUDS 1950 memiliki kandungan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang sama dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS;
- 3) Pasal 27 ayat (1) UUDS 1950 memiliki kandungan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang sama dengan Pasal 26 ayat (1) Konstitusi RIS;
- 4) Pasal 37 ayat (2) UUDS 1950 memiliki kandungan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang sama dengan Pasal 36 ayat (2) Konstitusi RIS;
- 5) Pasal 37 ayat (1) UUDS 1950 memiliki kandungan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang sama dengan Pasal 36 ayat (1) Konstitusi RIS;

- 6) Pasal 40 UUDS 1950 memiliki kandungan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang sama dengan Pasal 38 Konstitusi RIS;
- 7) Pasal 38 ayat (1) dan (2) UUDS 1950 memiliki kandungan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang sama dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD RI 1945;
- 8) Pasal 43 ayat (1) UUDS 1950 memiliki kandungan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang sama dengan Pasal 29 ayat (1) UUD RI 1945.

Disamping pasal-pasal sebagaimana diuraikan di muka, dalam Pasal 26 ayat (3) UUDS 1950 juga terkandung Politik Hukum Dasar Hak Cipta dalam kaitannya Hak Cipta sebagai hak milik. Berdasarkan pasal tersebut maka terkandung politik hukum dasar bahwa setiap Hak Cipta memiliki suatu fungsi sosial. Dengan demikian maka pasal 26 ayat (3) UUDS 1950 semakin memperkuat, mempertegas, dan memperjelas bahwa Politik Hukum Dasar Hak Cipta berbasis pada prinsip keseimbangan antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif).

**d. Politik Hukum Dasar Hak Cipta Yang Terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945**

Semenjak diterbitkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, UUD RI 1945 dinyatakan berlaku kembali untuk menggantikan UUDS 1950. Sekalipun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah berulang kali terjadi perubahan undang-undang dasar, namun demikian apa yang terjadi bukanlah perubahan dalam arti pembaharuan, melainkan perubahan dalam arti pembentukan, penyusunan, dan penggantian undang-undang dasar, termasuk dalam hal ini pembaharuan UUD RI 1945. Padahal dalam Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar yang dilakukan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa dikemudian hari akan dibuat suatu undang-undang dasar baru, karena undang-undang dasar yang disusun adalah undang-undang dasar kilat.<sup>213</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut sebetulnya nampak bahwa UUD RI 1945 yang tengah disusun pada masa itu oleh *founding fathers* masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dikemudian hari dimungkinkan dilakukan perubahan atas UUD RI 1945, sebagaimana diatur dalam

---

<sup>213</sup> Sekretariat Negara, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1998), hal. 311-312.

Pasal 37 UUD RI 1945. Namun demikian, sebagaimana dipahami bahwa hingga jatuhnya orde baru, belum sama sekali dilakukan perubahan UUD RI 1945, bahkan pemerintah pada masa itu seakan telah membangun dinding romantisme dan sakralisme atas UUD RI 1945.<sup>214</sup>

Beberapa kelemahan mendasar yang terdapat dalam UUD RI 1945 adalah pasal-pasal bersifat “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir, *executive heavy*, kurangnya materi muatan mengenai Hak Asasi Manusia dalam undang-undang dasar, dsb.<sup>215</sup> Kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian membuka ruang terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD RI 1945 sebagaimana yang terjadi selama era orde lama dan orde baru. Berdasarkan kenyataan tersebut maka upaya mendasar yang dilakukan pada era reformasi adalah dengan melakukan perubahan terhadap UUD RI 1945. Adapun perubahan UUD RI 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali.<sup>216</sup> Perubahan Pertama ditetapkan oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999. Kemudian disusul berturut-turut pada tahun 2000, 2001,

---

<sup>214</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hal. 50-51 dan 59..

<sup>215</sup> Lihat: Sekretaris Jenderal MPR RI, *op.cit.*, hal. 1. Lihat juga: Bagir Manan, *et.al.*, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 83.

<sup>216</sup> Adapula yang memandang bahwa perubahan terhadap UUD RI 1945 tidak dilakukan sebanyak empat kali, namun dilakukan sekali dalam empat tahap.

dan 2002 dilakukan Perubahan Kedua hingga Keempat dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan empat kali Perubahan UUD RI 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945 maka jika semula dalam UUD RI 1945 dimuat kurang lebih 80 norma dasar, maka setelah Perubahan UUD RI 1945 dimuat kurang lebih 190 norma dasar yang merupakan politik hukum dasar yang kemudian menjadi dasar norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945, pada dasarnya sama dengan Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam UUD RI 1945. Namun demikian, dengan dicantumkannya pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 semakin memperkuat, memperjelas, dan mempertegas politik hukum dasar Hak Asasi Manusia dimana Hak Cipta menjadi bagian di dalamnya.

Politik Hukum Dasar Hak Cipta sebagaimana terkandung dalam pasal-pasal UUD RI 1945 yang semakin diperkuat, diperjelas, dan dipertegas dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan sebagai wujud penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dengan prinsip non-diskriminasi semakin diperkuat, diperjelas, dan dipertegas oleh Pasal 28A , 28D ayat (1), 28G ayat (1), dan 28H ayat (4), 28 J ayat (1) dan (2).

*Kedua*, dalam 28C ayat (1) dan 28H ayat (1) terkandung pula Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa setiap pemegang Hak Cipta berhak untuk mengambil manfaat ekonomi (hak ekonomi) dari setiap ciptaannya untuk kesejahteraan hidupnya.

*Ketiga*, Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta yang diberikan harus berbasis nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur semakin diperkuat, diperjelas, dan dipertegas dalam Pasal 28 J ayat (2).

*Keempat*, Politik Hukum Dasar Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bahwa pemanfaatan nilai ekonomi Hak Cipta sebagai bagian dari kegiatan perekonomian harus dilakukan dalam batas yang wajar dengan mengembangkan semangat solidaritas dan



tolong menolong, sehingga tidak terjadi suatu bentuk pemanfaatan yang eksploitatif, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan masyarakat, semakin diperkuat, diperjelas, dan dipertegas dalam Pasal 28C ayat (1). Dengan demikian maka dimensi kekeluargaan dan gotong royong -keseimbangan antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif)- sebagai Politik Hukum Dasar Hak Cipta menjadi semakin diperkuat, diperjelas, dan dipertegas.

Lebih lanjut, apabila mengaitkan Pasal 28I ayat (1) dengan Pasal 28J ayat (2), maka terkandung suatu politik hukum dasar bahwa perlindungan Hak Cipta adalah sebuah kepastian yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, namun demikian dalam pelaksanaannya bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan dapat menderogasi hak orang lain, akan tetapi dimungkinkan dilakukan padanya suatu pembatasan tertentu berdasarkan undang-undang demi menjamin terpenuhinya hak asasi setiap manusia.

Berdasarkan penjelasan mengenai Politik Hukum Dasar Hak Cipta sebagaimana diuraikan di muka, maka terlihat jelas bahwa Politik Hukum Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam UUD RI 1945,

Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD NRI Tahun 1945 telah sesuai (sinkron dan taat asas) dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi *reichtsidee* yang menjiwai Undang-Undang Dasar. Dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Cipta di Indonesia maka idealnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD NRI Tahun 1945) menjadi pedoman tuntunan dan sumber Hukum Hak Cipta Nasional. Dengan kata lain bahwa Politik Hukum Ideal dan Politik Hukum Dasar menjadi suatu paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional yang harus diimplementasikan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional.

#### **B. Perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta**

Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila sebagai politik hukum ideal yang kaya akan kandungan moral dan asas-asas atau prinsip-prinsip umum dalam pembangunan sistem hukum nasional dijabarkan menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma dasar yang disusun ke dalam suatu undang-undang dasar. Namun demikian dikarenakan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam undang-undang dasar masih bersifat mendasar dan umum sehingga sulit menjangkau dan dioperasionalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka kaidah-kaidah atau norma-norma tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam berbagai bentuk peraturan-peraturan

yang dikenal sebagai undang-undang. Undang-undang sebagai suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi yakni Pancasila dan undang-undang dasar. Oleh karenanya politik hukum instrumental yang terkandung dalam setiap undang-undang harus sesuai (sinkron dan taat asas) dengan politik hukum ideal dan politik hukum dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta, hingga saat ini pernah berlaku tiga Undang-Undang Hak Cipta yakni (1) *Auteurswet* 1912 atau Undang-Undang Hak Pengarang; (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997; (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta<sup>217</sup>. Adapun politik hukum instrumental yang terkandung dalam setiap undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Politik Hukum Instrumental Hak Cipta Yang Terkandung Dalam *Auteurswet* 1912 atau Undang-Undang Hak Pengarang**

*Auteurswet* 1912 atau yang kemudian dikenal dengan UU Hak Pengarang sejatinya merupakan sebuah undang-undang perlindungan Hak Pengarang (Hak Cipta) yang diterbitkan oleh

---

<sup>217</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih berlaku pada saat penulisan ini dilakukan.

Kerajaan Belanda melalui Stb. No. 600 Tahun 1912. Penerbitan *Auteurswet* 1912 pada dasarnya didorong oleh mayoritas negara-negara eropa barat yang menjadi anggota *Bern Convention* 1886, oleh karenanya *Auteurswet* 1912 dijiwai oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Bern Convention* 1886,<sup>218</sup> yakni prinsip *national treatment*, prinsip *automatic protection*, dan prinsip *independence of protection*. Disamping didasarkan pada ketiga prinsip perlindungan tersebut, dapat dipahami pula bahwa *Auteurswet* 1912 sebagai sebuah peraturan hukum yang dijiwai oleh *Berne Convention* merupakan sebuah peraturan yang lahir di Eropa sehingga disusun berdasarkan watak sosio-kultural bangsa Eropa yang liberalis-individualis.

Dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai daerah jajahan kolonial belanda, maka berdasarkan asas konkordansi maka *Auteurswet* 1912 yang terdiri dari 45 pasal turut pula berlaku di Indonesia dengan beberapa pengecualian yakni tidak berlakunya Pasal 39, 43, 44 serta ditambahkannya Pasal 17 bis. Dibandingkan dengan *Auteurswet* 1912 yang berlaku di Belanda maka pada hakikatnya *Auteurswet* 1912 yang berlaku di Indonesia memiliki kesamaan substansi.<sup>219</sup>

---

<sup>218</sup> Lihat: Candra Irawan, *op.cit.*, hal. 102, lihat juga: Inda Citraninda Noerhadi, *Sejarah Hak Cipta Lukisan*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hal. 271.

<sup>219</sup> Lihat: Henry Sulisty, *op.cit.*, hal. 125, lihat juga: Eddy Damian, *op.cit.*, hal. 144, lihat juga: Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 64.

Dengan diterbitkannya *Auteurswet* 1912, maka Kerajaan Belanda pada 1 April 1913 dapat mengikatkan diri pada *Bern Convention*. Melalui *Staatsblad* No. 797 Tahun 1914, Indonesia yang masih bernama *Netherlands East-Indies* turut pula menjadi anggota *Bern Convention*. Sama halnya ketika *Bern Convention* mengalami revisi di Roma pada tahun 1928, revisi tersebut turut berlaku di Indonesia melalui *Staatsblad* No. 325 Tahun 1931. Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa pada masa tersebut baik di Kerajaan Belanda maupun di Hindia Belanda berlaku dua peraturan hukum Hak Cipta, yakni *Auteurswet* 1912 dan *Bern Convention* 1886.

Namun demikian, dengan adanya dua peraturan pada masa tersebut tidak serta merta perlindungan Hak Cipta khususnya di Hindia Belanda berjalan dengan baik dan maksimal. Hal tersebut dikarenakan kedua peraturan tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh pemerintah kolonial. Lemahnya penerapan kedua peraturan tersebut menurut Eddy Damian ditunjukkan melalui sikap diam pemerintah kolonial terhadap buku-buku terbitan Balai Pustaka yang merupakan terjemahan dari buku-buku asing oleh penulis Hindia Belanda tanpa izin pengarang aslinya. Meskipun hal tersebut dilakukan dengan maksud memperkaya khasanah pustaka penduduk Hindia Belanda sejalan dengan politik etis

yang diterapkan pemerintahan kolonial dan beberapa dilakukan terhadap buku-buku yang telah menjadi *public domain*, namun demikian tetap merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta karena dilakukan tanpa seizin pencipta atau ahli warisnya, bahkan diantaranya dilakukan tanpa menyebut pencipta dan mengubah judul buku tersebut.<sup>220</sup>

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda terjadi suatu keadaan yang sangat kontradiktif. Hal tersebut mengingat bahwa pada dasarnya telah terdapat dua peraturan hukum Hak Cipta, yakni *Auteurswet* 1912 dan *Bern Convention* 1886 yang merupakan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta pada masa kolonial Belanda. Politik Hukum Instrumental Hak Cipta tersebut digunakan sebagai dasar pijak dalam perlindungan Hak Cipta namun demikian dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan penerapan hukum yang baik sehingga menjadi aturan hukum yang tidur. Disamping itu watak sosio-kultural bangsa Indonesia yang religius-kolektifis turut pula menyebabkan lemahnya penerapan kedua peraturan tersebut yang memiliki watak liberalis-individualis.

Dalam perkembangannya, Perjanjian Kalijati 1942 menandai berakhirnya masa penjajahan kolonial Belanda yang

---

<sup>220</sup> Lihat: Eddy Damian, *op.cit.*, hal. 144-145.

menandai pula dimulainya masa pendudukan Bala Tentara Jepang. Dengan berdasarkan Pasal 3 *Osamu Sirei* No. 1, untuk mencegah kekosongan hukum maka semua badan-badan pemerintah, kekuasaan hukum, dan undang-undang dari pemerintah Kolonial Belanda tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer.<sup>221</sup> Berdasarkan Pasal 3 *Osamu Sirei* tersebut maka *Auteurswet* 1912 dan *Bern Convention* 1886 tetap berlaku di Indonesia. Namun demikian sekalipun *Auteurswet* 1912 dan *Bern Convention* 1886 sebagai Politik Hukum Instrumental Hak Cipta secara yuridis formil tetap berlaku, mengingat singkatnya masa pendudukan Bala Tentara Jepang yang hanya sekitar tiga setengah tahun serta konsentrasi Bala Tentara Jepang yang tertuju pada Perang Dunia II maka pada masa itu tidak dikenal bentuk-bentuk perlindungan Hak Cipta apapun yang menonjol sehingga cenderung statis adanya seperti pada masa-masa sebelumnya.

Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta maka berakhir pula pendudukan Bala Tentara Jepang. Dengan proklamasi kemerdekaan inilah secara formal dimulailah sistem hukum nasional berdasarkan UUD RI 1945. Dalam upaya untuk mengatasi terjadinya kekosongan

---

<sup>221</sup> Toendjoeng Herning Sitaboeana, *op.cit.*, hal. 278.

hukum maka dilakukanlah suatu terobosan hukum melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD RI 1945 yang menetapkan bahwa: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan inilah aturan-aturan hukum peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku, termasuk *Auteurswet* 1912 yang diterjemahkan menjadi UU Hak Pengarang.

Penggunaan dan penerjemahan *Auteurswet* 1912 menjadi UU Hak Pengarang dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Hak Pengarang (Hak Cipta) merupakan suatu bentuk Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang cenderung bersifat spontan. Kebijakan bersifat spontan ini diambil dalam rangka untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum belaka tanpa didasari adanya pertimbangan hukum yang matang apakah politik hukum instrumental yang terkandung *Auteurswet* 1912 telah sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam Pancasila dan UUD RI 1945.

Mengingat pemberlakuan UU Hak Pengarang yang bersifat spontan maka dalam perkembangannya, penerapan UU Hak Pengarang tidak dapat dilakukan secara efektif di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan substansi yang terkandung dalam UU Hak Pengarang memiliki banyak kekurangan, misal dalam hal



cakupan pengaturannya maupun sanksi atas pelanggaran terhadap Hak Pengarang. Disamping itu substansi yang terkandung dalam UU Hak Pengarang juga dipandang tidak merepresentasikan kepentingan Indonesia (kepentingan nasional) sebagai sebuah negara yang baru merdeka. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia mengalami ketertinggalan diberbagai bidang sebagai akibat dari penjajahan yang telah terjadi selama berabad-abad. Pemerintah berdasarkan amanat yang diberikan oleh konstitusi, memiliki keinginan untuk mengejar ketertinggalan tersebut, salah satunya melalui pengembangan kebudayaan nasional khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan kepentingan tersebut maka pemerintah memandang bahwa substansi yang terkandung dalam UU Hak Pengarang tidak sesuai dengan kepentingan nasional tersebut karena dianggap dapat membatasi atau memperlambat keinginan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan yang dialami Indonesia. Oleh karenanya pada masa itu pemerintah memilih untuk membiarkan UU Hak Pengarang menjadi hukum yang tidur, ada secara formal namun dalam prakteknya tidak diterapkan.

Kenyataan sebagaimana yang diuraikan dimuka tidak serta merta mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin menyusun UU Hak Pengarang (Hak Cipta) baru yang sesuai

dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta –sebagai paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional- yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Agaknya dinamika perjalanan negara Indonesia secara tidak langsung dapat menjelaskan mengapa pemerintah seakan tidak menaruh perhatian dalam perlindungan Hak Cipta dan tidak sesegera mungkin menyusun UU Hak Cipta yang baru.

Tidak lama setelah Indonesia merdeka, Belanda mencoba kembali menancapkan pengaruhnya di Indonesia melalui berbagai aksi hingga agresi militer dalam kurun waktu 1947-1949. Pasca berakhirnya agresi militer Belanda melalui KMB terjadi dinamika di bidang ketatanegaraan Indonesia yakni berdirinya Republik Indonesia Serikat dan berlakunya Konstitusi RIS. Pasca Indonesia kembali kedalam bentuk negara kesatuan, pemerintah pada masa 1950-1959 lebih banyak berkonsentrasi dalam membentuk undang-undang dasar yang baru. Sebagaimana dipahami bersama bahwa dalam kurun waktu tersebut Indonesia yang menganut sistem parlementer harus menghadapi kenyataan jatuh bangunnya kabinet sehingga tidak pernah ada satupun kabinet yang memerintah secara efektif. Dalam kurun waktu 25 tahun Indonesia merdeka tersebut pemerintah juga harus terpecah konsentrasinya mulai dari menghadapi berbagai bentuk pemberontakan yang terjadi

selama kurun waktu 1945-1965, upaya pembebasan Irian Barat dari cengkeraman Belanda, program ganyang malaysia, peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober), hingga transisi pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Disamping itu keterpurukan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada masa itu juga membuat pemerintah lebih berkonsentrasi untuk memulihkan keadaan ekonomi terlebih dahulu. Berdasarkan fakta sejarah inilah maka dapat dipahami mengapa pemerintah seakan tidak menaruh perhatian dalam perlindungan Hak Cipta dan tidak sesegera mungkin menyusun Undang-Undang Hak Cipta yang baru.

Adapun dalam kaitanya keberlakuan *Berne Convention* bagi Indonesia maka pasca Indonesia merdeka *Berne Convention* sudah tidak mengikat lagi bagi Indonesia. Hal tersebut berdasarkan perubahan *Berne Convention* tahun 1948 yang tidak lagi mencantumkan Indonesia dalam daftar negara-negara anggota *Berne Convention*. Tidak terdaftarnya Indonesia sebagai negara anggota *Berne Convention* dikarenakan keanggotaan Indonesia (Hindia Belanda) pada masa lalu adalah berdasarkan status Indonesia sebagai jajahan kolonial Belanda yang mengikatkan diri pada *Berne Convention*. Pasca kemerdekaan Indonesia, maka status keanggotaan tersebut tidak secara otomatis beralih ke Indonesia. Adapun untuk

kembali menjadi anggota *Berne Convention* maka Indonesia harus menyatakan untuk mengikatkan diri pada *Berne Convention*. Namun demikian pada tahun 1958 pemerintah Indonesia melalui Kabinet Juanda justru mempertegas status Indonesia dengan menyatakan secara resmi bahwa Indonesia tidak mengikatkan diri pada *Berne Convention* melalui Surat Menteri Luar Negeri RI Nomor 15.149 XII tanggal 15 Maret 1958.<sup>222</sup>

Pernyataan resmi pemerintah untuk tidak mengikatkan diri pada *Berne Convention* mengandung suatu politik hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pemerintah berpandangan bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat merupakan bagian dari masyarakat dunia yang oleh karenanya sederajat dengan negara-negara dunia lainnya dan memiliki kewajiban untuk mewujudkan ketertiban dunia. Sesuai dengan garis politik luar negeri bebas-aktif maka Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan pandangannya sendiri sesuai dengan kepentingan nasional. Sikap bebas tersebut bukanlah dalam arti sebebaskan-bebasnya, namun demikian berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dengan aktif mewujudkan ketertiban dunia. Dalam kaitannya dengan suatu perjanjian internasional maka sesuai dengan kedudukan

---

<sup>222</sup> Lihat: Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 127. lihat juga: Otto Hasibuan, *op.cit.*, hal. 84, lihat juga: Henry Sulisty, *op.cit.*, hal. 127.

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta politik luar negeri bebas-aktif yang dianut, pemerintah memiliki kebebasan untuk mengikat diri atau tidak mengikat diri pada suatu perjanjian internasional. Dalam kaitannya dengan *Berne Convention* sebagai sebuah perjanjian internasional, pemerintah berpandangan bahwa prinsip-prinsip perlindungan Hak Cipta sebagaimana terkandung dalam *Berne Convention* tidak sesuai dengan watak sosio-kultural bangsa Indonesia dan kepentingan nasional pada masa itu.<sup>223</sup> Pemerintah juga berpandangan bahwa hendaknya perlindungan Hak Cipta yang dibangun tidak berdasarkan prinsip keadilan dengan perlakuan setara sebagaimana apa yang terkandung dalam *Berne Convention*, karena pada akhirnya justru akan menimbulkan ketidakadilan khususnya kepada bangsa Indonesia yang mengalami berbagai ketimpangan dan ketertinggalan. Pemerintah juga berkehendak untuk menyusun suatu undang-undang Hak Cipta yang sama sekali baru yang sesuai dengan watak sosio-kultural bangsa Indonesia dan kepentingan nasional, bukan sekedar memberlakukan, mengubah, atau mengamandemen UU Hak Pengarang atau *Auteurswet* 1912

---

<sup>223</sup> Sebagaimana dipahami bahwa perhatian *Berne Convention* pada negara-negara berkembang baru diberikan pada saat revisi *Berne Convention* di Stockholm 1967, sehingga dapat dipahami bahwa sebelum adanya revisi Stockholm, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *Berne Convention* hanya mencerminkan kepentingan negara-negara eropa yang notabene merupakan negara maju. Lihat: Bab II, hal. 65 karya tulis ini, dan lihat juga: Eddy Damian, *op.cit.*, hal. 60.

dimana di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *Berne Convention*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka pemerintah memutuskan untuk tidak mengikatkan diri pada *Berne Convention*. Tindakan tersebut sekalipun dianggap kontroversial bagi sebagian kalangan, namun demikian mencerminkan tingginya nasionalisme bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tindakan tersebut menunjukkan pada dunia bahwa bangsa dan negara Indonesia berani melawan arus internasional demi tercapainya kepentingan nasional. Dengan tidak mengikatkan diri pada *Berne Convention* maka negara memiliki kebebasan untuk memanfaatkan karya-karya cipta asing demi mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan bangsa dan negara lain.

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip baik yang terkandung dalam *Auteurswet* 1912 maupun yang terkandung dalam *Berne Convention* tidak sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta. Hal tersebut juga menandakan bahwa *Auteurswet* 1912 dan *Berne Convention* tidak sesuai dengan watak sosio-kultural bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional.

Karena tidak sesuai dengan watak sosio-kultural bangsa Indonesia maka dalam penerapannya di masyarakat *Auteurswet* 1912 tidak dapat dilakukan secara efektif sebagaimana yang terjadi baik selama masa penjajahan kolonial belanda maupun pasca kemerdekaan Indonesia sampai diterbitkannya undang-undang Hak Cipta baru. Disamping itu, keputusan pemerintah untuk tidak mengikatkan diri pada *Berne Convention* merupakan keputusan yang tepat, hal tersebut dikarenakan apabila pemerintah mengikatkan diri pada *Berne Convention* yang notabene tidak sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta Nasional dan berarti pula tidak sesuai dengan kepentingan nasional maka akan memperlambat tercapainya tujuan negara khususnya dalam rangka mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan bangsa dan negara lain.

**2. Politik Hukum Instrumental Hak Cipta Yang Terkandung Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997**

Diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara RI No. 15 Tahun 1982 menandai berakhirnya *Auteurswet* 1912 yang telah berlaku lebih kurang 70 tahun lamanya di Indonesia dan merupakan tonggak Undang-Undang

Hak Cipta nasional pertama. Terungkap dalam keterangan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dalam Sidang Paripurna DPR bahwa *Auterswet* 1912 tidaklah sesuai dengan watak-sosio kultural bangsa Indonesia<sup>224</sup> dan kepentingan nasional sehingga serta tidak lagi sesuai dengan kondisi nasional dimana terus terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemerintah menganggap penting untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada DPR.<sup>225</sup>

Berdasarkan rumusan pasal-pasal UU Hak Cipta 1982 maka terkandung suatu politik hukum instrumental yang hendak dilaksanakan pemerintah sebagai berikut:

*Pertama*, perlindungan Hak Cipta diberikan dalam kerangka kepentingan nasional yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yakni dengan mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kesusastraan, serta bentuk-bentuk kebudayaan lainnya. Politik hukum tersebut sebagaimana terkandung dalam Konsiderans, Pasal 10 ayat (1) dan (2), 14, dan Penjelasan bagian Umum UU Hak Cipta 1982.

Dalam Konsiderans huruf a dinyatakan bahwa:

---

<sup>224</sup> Lihat: Konsiderans huruf a dan Penjelasan bagian Umum angka 1 UU No. 6 Tahun 1982.

<sup>225</sup> Lihat: Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 163.



bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan, Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa:

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan benda-benda budaya nasional lainnya.
- (2) :
  - a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara;
  - b. Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2) a terhadap luar negeri.

Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa:

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
  1. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  2. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran.
- d. Perbanyakkan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para

- tuna netra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakannya suatu ciptaan secara terbatas dengan fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
  - f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Dalam Penjelasan bagian Umum angka 1 dinyatakan bahwa:

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidupan bangsa perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta. Undang-undang tentang Hak Cipta Auteurswet 1912 Staatsblad no. 600 tahun 1912, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam UU Hak Cipta 1982 diatur pula ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengambilalihan Hak Cipta oleh negara demi kepentingan nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4), 15, 16, dan 17 UU Hak Cipta 1982.

Dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa:

- (3) Hak cipta suatu karya demi kepentingan nasional dengan sepengetahuan pemegangnya dapat dijadikan milik negara dengan Keputusan Presiden atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
- (4) Kepada pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan nasional, tiap terjemahan dari ciptaan berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ciptaan berasal dari negara lain sedikitnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah;
  - b. penterjemah telah meminta izin terjemahan dari pemegang hak cipta, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan.
- (2) Untuk penterjemahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diperlukan izin dari Menteri Kehakiman.
- (3) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang hak cipta dan dalam memberikan izin untuk penterjemahan itu mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa:

- (1) Dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 48 Sub b maka untuk kepentingan nasional ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan badan asing dapat diperbanyak untuk keperluan pemakaian dalam wilayah Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan warga negara asing tersebut, selama 2 (dua) tahun sejak diumumkan belum cukup diperbanyak di wilayah Republik Indonesia;
  - b. telah dimintakan izin untuk memperbanyak ciptaan tersebut, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan.
- (2) Perbanyakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebut di atas, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.
- (3) Untuk memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan izin dari Menteri Kehakiman.
- (4) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang hak cipta dan dalam memberi izin

perbanyakkan itu, mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa:

- (1) Pengumuman sesuatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan bahwa kepada pemegang hak cipta itu diberi ganti rugi yang layak.
- (2) Badan penyiar radio atau televisi yang berwenang untuk mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang mengabadikan ciptaan itu dengan alat-alatnya sendiri dan semata-mata untuk radio atau televisinya sendiri, dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya badan penyiar tersebut memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Diaturnya ketentuan-ketentuan mengenai pengambilalihan Hak Cipta oleh negara demi kepentingan nasional membuka kemungkinan bagi negara untuk mengambil alih ciptaan-ciptaan yang dapat mendorong perkembangan dan kemajuan nasional khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengambilalihan Hak Cipta tersebut maka dapat memepermudah pemerintah dalam melakukan penyebarluasan ciptaan-ciptaan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia guna mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan bangsa dan negara lain.

Disamping pasal-pasal tersebut, perlindungan Hak Cipta dalam kerangka kepentingan nasional juga ditegaskan dalam Pasal 48 yang menyatakan bahwa:

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua ciptaan warga negara Indonesia, badan hukum yang diumumkan pertama kali di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. semua ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan badan asing yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 48 maka perlindungan Hak Cipta diberikan kepada seluruh ciptaan Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia baik yang diumumkan di Indonesia untuk pertama kali maupun yang diumumkan di luar Indonesia. Perlindungan Hak Cipta juga diberikan kepada seluruh ciptaan warga negara asing dan badan hukum asing yang diumumkan di Indonesia untuk pertama kali (Pasal 48). Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa ciptaan warga negara asing dan badan asing yang tidak diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia tidak dilindungi Hak Cipta dan oleh karenanya pula tidak dapat di daftarkan. Politik hukum yang terkandung dalam Pasal 48 adalah suatu hal yang kontroversial dan dianggap diskriminatif bagi sebagian kalangan terutama bagi pencipta warga negara asing, hal tersebut dikarenakan perlindungan Hak Cipta diberikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia tanpa memandang

tempat di mana ciptaan tersebut diumumkan untuk pertama kalinya, namun perlindungan Hak Cipta bagi pencipta warga negara asing atau badan asing hanya diberikan kepada yang mengumumkan ciptaan untuk pertama kalinya di Indonesia. Namun demikian, dari sisi yang lain ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai politik hukum yang ditetapkan pemerintah guna melindungi kepentingan nasional dan memajukan bangsa dan negara Indonesia guna mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan bangsa dan negara lain.

*Kedua*, perlindungan Hak Cipta diberikan dengan memperhatikan keseimbangan atau harmoni antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / Kolektif) sebagai perwujudan watak sosio-kultural bangsa Indonesia. Keseimbangan antara Hak Individu dan Hak Kolektif dibutuhkan agar di satu sisi perlindungan Hak Cipta dapat menumbuhkan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta (memacu etos mencipta), namun disisi lain hendak pula dilindungi kepentingan masyarakat atas suatu ciptaan bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Adapun pasal-pasal yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif) adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan - pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal tersebut maka pemegang Hak Cipta memiliki hak khusus yang merupakan Hak Individu pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu. Hak Individu tersebut berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi pemegang Hak Cipta atas ciptaannya. Namun demikian hak tersebut bukanlah hak absolut, akan tetapi dibatasi oleh pembatasan-pembatasan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pasal 10 ayat (4), berdasarkan pasal tersebut maka keseimbangan antara Hak Individu dan Hak Kolektif terletak pada diberikannya imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh Presiden kepada pemegang Hak Cipta atas suatu karya yang demi kepentingan nasional dijadikan milik negara. Hal tersebut merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi negara terhadap pemegang Hak Cipta yang rela mengorbankan kepentingannya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- c. Pasal 14, sebagaimana telah diuraikan di muka maka berdasarkan Pasal 14 keseimbangan antara Hak Individu dan Hak Kolektif terletak pada hak masyarakat untuk

melakukan pengutipan, pengambilan, perbanyakan dari suatu ciptaan dalam batas-batas kewajaran dan tidak ditujukan untuk kegiatan yang bersifat komersial. Ketentuan Pasal 14 sebagai bentuk pembatasan Hak Cipta atau pengecualian terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam istilah asing sering disebut dengan istilah *fair dealing* atau *fair use*<sup>226</sup>.

- d. Pasal 15, sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa sekalipun pasal tersebut ditujukan untuk mengakomodasi kegiatan penerjemahan bagi kepentingan nasional namun demikian tetap dijaga keseimbangan antara Hak Individu dan Hak Kolektif melalui ditetapkannya prasyarat penerjemahan ciptaan asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah untuk melindungi hak khusus dari pemegang Hak Cipta (Pasal 15 ayat (1)), kewajiban untuk memperoleh izin Menteri Kehakiman dalam melakukan penerjemahan (Pasal 15 ayat (2)), dan ganti rugi yang diberikan negara kepada pemegang Hak Cipta (Pasal 15 ayat (3))

---

<sup>226</sup> Istilah *fair dealing* lebih banyak digunakan oleh negara-negara yang menganut tradisi hukum *Common Law system* yang berda daram *Commonwealth of Nations*, seperti Australia, Kanada, India, Inggris, Singapura, sedangkan *fair use* digunakan oleh Amerika Serikat. Secara umum *fair dealing* dan *fair dealing* dapat diartikan sebagai penggunaan suatu ciptaan oleh seorang yang tidak berhak secara tidak bertentangan dengan eksploitasi yang wajar suatu ciptaan dan juga tidak mengurangi kepentingan yang wajar dari pencipta. Lihat: Eddy Damian, *op.cit.*, hal. 192, lihat juga: Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 300.



- e. Pasal 16, pada dasarnya pokok pengaturan dalam Pasal 16 hampir sama dengan Pasal 15 yakni untuk mengakomodasi kepentingan nasional, dalam hal ini perbanyakan ciptaan, namun demikian melalui pasal 16 tetap dijaga keseimbangan antara Hak Individu dan Hak Kolektif melalui ditetapkannya prasyarat perbanyakan terhadap ciptaan WNA maupun badan asing (Pasal 16 ayat (1)), kewajiban untuk memperoleh izin Menteri Kehakiman dalam melakukan perbanyakan (Pasal 15 ayat (3)), dan ganti rugi yang diberikan negara kepada pemegang Hak Cipta (Pasal 15 ayat (4)).
- f. Pasal 17, Dalam pasal tersebut keseimbangan antara Hak Individu dan Hak Kolektif tetap dijaga melalui ditetapkannya ketentuan bahwa sekalipun pemerintah memiliki hak untuk mengumumkan suatu ciptaan melalui siaran radio atau televisi untuk kepentingan nasional tanpa izin dari pemegang Hak Cipta, namun demikian pemerintah berkewajiban untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang Hak Cipta (Pasal 17 ayat (1)). Disamping itu sekalipun radio atau televisi tersebut memiliki kewenangan untuk mengabadikan ciptaan tersebut, namun demikian untuk penyiaran selanjutnya badan penyiar

tersebut harus memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang Hak Cipta (Pasal 17 ayat (2)).

- g. Pasal 26 dan 27, dalam pasal 26 keseimbangan antara Hak Individu dan Hak Kolektif tetap dijaga melalui ditetapkannya jangka waktu perlindungan Hak Cipta, namun demikian jangka waktu perlindungan tersebut dipersingkat, jika dalam *Auteurswet* 1912 dan *Berne Convention* diberikan selama hidup pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, maka dalam UU Hak Cipta 1982 dipersingkat menjadi selama hidup pencipta ditambah 25 (dua puluh lima) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Disamping itu dalam Pasal 27 jangka waktu perlindungan Hak Cipta dalam karya fotografi dan karya sinematografi, berlaku selama 15 (lima belas) tahun sejak diumumkan untuk pertama kali. Jangka waktu perlindungan tersebut jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan *Berne Convention* yang menetapkan jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun sejak dibuat atau tersedia bagi masyarakat untuk karya sinematografi, dan selama tidak kurang 25 (dua puluh lima) tahun sejak dibuat bagi karya fotografi. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang lebih singkat dimaksudkan agar suatu ciptaan tidak terlalu lama dimonopoli oleh pemegang Hak Cipta dan segera menjadi

*public domain* agar dapat dengan mudah diakses masyarakat sehingga bermanfaat bagi perkembangan masyarakat.

*Ketiga*, perlindungan Hak Cipta yang diberikan merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia oleh karenanya perlindungan Hak Cipta dilakukan secara otomatis atau *automatic protection*. Politik hukum instrumental tersebut terkandung dalam Pasal 5 ayat (1). Namun demikian, dalam rangka mempermudah pembuktian dalam hal terjadinya sengketa Hak Cipta, dalam UU Hak Cipta 1982 diatur pula mengenai ketentuan pendaftaran ciptaan yakni dalam Bab III Pasal 29-38, tanpa mengurangi sifat *automatic protection* tersebut. Mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam penjelasan bagian umum butir ke tiga, yakni:

Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam Undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaranpun hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan.

Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran.

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta. Demikian dalam undang-undang ini dianut sistem pendaftaran negatif deklaratif, seperti juga yang dipergunakan dalam pendaftaran merek dan pendaftaran tanah. Pada umumnya dalam hal terjadi sengketa, kepada

hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan.

*Keempat*, perlindungan Hak Cipta diberikan berdasarkan prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang berbeda. Berdasarkan uraian mengenai politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 1982 sebagaimana diuraikan di muka maka dapat dipahami bahwa ketentuan-ketentuan UU Hak Cipta 1982 mencerminkan prinsip perlindungan Hak Cipta yang didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan berbeda. Politik hukum tersebut sebagaimana tercermin dalam ketentuan sebagai berikut: (1) Dalam hal subyek perlindungan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 48; (2) Pembatasan-pembatasan terhadap Hak Cipta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan diatur dalam Pasal 14-17; (3) Pengambilalihan Hak Cipta oleh negara demi kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4), Pasal 15-17; (4) Singkatnya jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut UU Hak Cipta 1982 jika dibandingkan standar perlindungan internasional dalam *Berne Convention*. Dengan pemberian perlakuan berbeda maka diharapkan bangsa dan negara Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan bangsa dan negara lain.

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa Politik Hukum Instrumental Hak Cipta sebagaimana terkandung

dalam UU Hak Cipta 1982 telah sesuai dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta. Hal tersebut dikarenakan rumusan pasal-pasal UU Hak Cipta 1982 mengandung politik hukum yang mencerminkan Politik Hukum Ideal Hak Cipta.

Dalam perjalanannya, pasca diterbitkannya UU Hak Cipta 1982 pelaksanaan perlindungan Hak Cipta tidak dapat dilaksanakan secara kondusif. Lemahnya perlindungan Hak Cipta ditunjukkan melalui berbagai pelanggaran Hak Cipta yakni dengan maraknya pembajakan ciptaan lagu atau musik, buku, sinematografi, dsb. Tingginya tingkat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia pada saat itu tentu saja tidak hanya mengundang perhatian kalangan penggiat Hak Cipta nasional akan tetapi juga mengundang perhatian Internasional.

Amerika Serikat sebagai pihak yang paling berkepentingan karena paling merasa dirugikan oleh tingginya tingkat pembajakan ciptaan di Indonesia berupaya untuk terus menekan pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan perlindungan Hak Cipta khususnya bagi ciptaan-ciptaan warga negara Amerika Serikat. Salah satu upaya pemerintah Amerika Serikat untuk menekan pemerintah Indonesia adalah melalui instrumen GSP (*Generalized Sistem of Preferences*). Pada dasarnya GSP adalah fasilitas perdagangan yang diberikan Amerika Serikat

kepada negara-negara berkembang. *Office of United States Representative* menjelaskan bahwa GSP:<sup>227</sup>

*is a program designed to promote economic growth in the developing world by providing preferential duty-free entry for up to 5,000 products when imported from one of 128 designated beneficiary countries and territories*

Indonesia memperoleh GSP pada tahun 1980 dan lima tahun kemudian memperoleh fasilitas perdagangan berupa pembebasan bea masuk untuk ekspor ke Amerika Serikat sebesar US\$ 28 juta. Melalui instrumen GSP inilah pemerintah Amerika Serikat melakukan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki perlindungan Hak Cipta dan melakukan perubahan terhadap UU Hak Cipta 1982. Apabila pemerintah Indonesia tidak melakukannya maka pemerintah Amerika Serikat yang akan mempertimbangkan kembali status GSP yang telah diperoleh Indonesia.<sup>228</sup>

Selain Amerika Serikat, tekanan kepada pemerintah Indonesia juga datang dari negara-negara Eropa. Tekanan negara-negara Eropa dilakukan melalui Peraturan Dewan Komisi Eropa No. 2614/1984. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dapat diambil tindakan-tindakan kebijakan perdagangan atau politik perdagangan terhadap negara ketiga yang

---

<sup>227</sup> [http:// www.ustr.gov / trade - topics / trade - development / preference - programs / generalized - system - preference - gsp](http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp), diakses tanggal 28 Desember 2012.

<sup>228</sup> Lihat: Candra Irawan, *op.cit.*, hal. 120, lihat juga: Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 170.

melakukan *unfair trade practices*.<sup>229</sup> Berdasarkan peraturan tersebut maka *International Federation of Phonographic Industry* mengadukan Indonesia pada Dewan Komisi Eropa karena Indonesia telah dianggap melakukan praktek dagang tidak sehat dengan melakukan banyak pembajakan terhadap produk-produk phonogram yang berasal dari negara-negara Eropa.<sup>230</sup>

Atas dasar kuatnya tekanan dari pemerintah Amerika Serikat dan Dewan Komisi Eropa, maka Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 tentang Tim Kerja Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta, Paten, dan Merek. Tim Kerja tersebut bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan UU Hak Cipta, Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dan bertugas untuk menyelesaikan penyusunan UU Paten. Dalam melaksanakan tugas, Tim Kerja memiliki fungsi untuk: (1) melaksanakan inventarisasi atas segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ataupun penyusunan undang-undang Hak Cipta, Paten, dan Merek, serta segala permasalahan yang ditemui dalam undang-undang tersebut yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan; (2) Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk

---

<sup>229</sup> Lihat: Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT. Eresco, 1995), hal. 67-68, sebagaimana dikutip Candra Irawan, *op.cit.*, hal. 120, lihat juga: Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 170.

<sup>230</sup> Lihat: Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 170-171.

mengumpulkan keterangan yang diperlukan dari pihak-pihak yang dipandang perlu; (3) Mengadakan pembicaraan dengan pihak-pihak yang baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut; (4) Menyampaikan saran yang diperlukan bagi penyelesaian permasalahan tersebut kepada Presiden.

Atas rekomendasi dari Tim Kerja tersebut maka dilakukanlah perubahan atas UU Hak Cipta 1982 yakni melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1987). Secara garis besar substansi perubahan UU Hak Cipta 1987 menyangkut hal-hal pokok seperti masalah peminanaan, masalah ruang lingkup berlakunya undang-undang, masalah jangka waktu perlindungan Hak Cipta; dan masalah hubungan antara negara dan pemegang Hak Cipta. Disamping empat hal pokok, perubahan lainnya hanya merupakan penyempurnaan redaksional untuk memperjelas rumusan undang-undang ataupun sebagai bentuk penyesuaian atas perubahan-perubahan pokok tersebut.<sup>231</sup>

Berdasarkan rumusan pasal-pasal UU Hak Cipta 1987 maka terkandung suatu politik hukum instrumental yang hendak dilaksanakan pemerintah sebagai berikut:

---

<sup>231</sup> *Ibid.*, hal. 179.



*Pertama*, hendak menjadikan perlindungan Hak Cipta sebagai pemacu etos mencipta. Dengan tingginya etos masyarakat dalam mencipta maka diharapkan dapat mendorong perkembangan dan kemajuan kebudayaan nasional yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kesusastraan, serta bentuk-bentuk kebudayaan lainnya di Indonesia. Politik hukum tersebut sebagaimana terkandung dalam:

- a. Konsiderans huruf a, dalam konsiderans tersebut dinyatakan bahwa:

bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

- b. Penjelasan bagian Umum, dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa:

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut.

- c. Pasal-pasal mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta. Pasal 26 dan 27 UU Hak Cipta 1987 mengubah

jangka waktu perlindungan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan 27 UU Hak Cipta 1982.

Tabel 3.1 Perbandingan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta dalam UU Hak Cipta 1982 dan UU Hak Cipta 1987

UU HAK CIPTA 1982	UU HAK CIPTA 1987
<p>Pasal 26</p> <p>(1) Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ia meninggal dunia.</p> <p>(2) Jika hak cipta itu dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ia meninggal dunia.</p> <p>(3) Jika pada suatu ciptaan tidak dicantumkan sama sekali nama pencipta, atau dicantumkan sedemikian rupa sehingga nama pencipta yang sebenarnya tidak diketahui, maka hak cipta itu berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya.</p> <p>(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku juga terhadap ciptaan yang hak ciptanya dimiliki oleh suatu badan hukum.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Hak Cipta atas ciptaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;</li> <li>seni tari (koreografi);</li> <li>segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;</li> <li>seni batik;</li> <li>ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan</li> <li>karya arsitektur;</li> </ol> <p>berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.</p> <p>(2) Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.</p>
<p>Pasal 27</p> <p>Hak cipta atau ciptaan karya fotografi atau karya sinematografi serta ciptaan yang dibuat menurut cara pengerjaan yang sejenis, berlaku selama 15 (lima belas) tahun dihitung mulai tanggal ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 11 ayat (3).</p>	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Hak Cipta atas ciptaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;</li> <li>ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;</li> <li>peta;</li> <li>karya sinematografi;</li> </ol>

	<p>e. karya rekaman suara atau bunyi;</p> <p>f. terjemahan, dan tafsir; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.</p> <p>(2) Hak Cipta atas ciptaan :</p> <p>a. karya fotografi;</p> <p>b. program komputer atau komputer program;</p> <p>c. saduran dan penyusunan bunga rampai; berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.</p> <p>(3) Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, kecuali Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun".</p>
--	---

Apabila dibandingkan, maka ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta 1987 jauh lebih lama daripada jangka waktu perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta 1982. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta 1987 pada dasarnya berpatokan pada ketentuan *Berne Convention*. Dengan jangka waktu perlindungan yang lebih lama maka diharapkan dapat lebih memacu etos masyarakat dalam mencipta.

- d. Pasal-pasal mengenai ancaman sanksi pidana. Pasal 44 UU Hak Cipta 1987 mengubah ancaman sanksi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta 1982.

Tabel 3.2 Perbandingan Ancaman Sanksi Pidana Hak Cipta dalam UU Hak Cipta 1982 dan UU Hak Cipta 1987

UU HAK CIPTA 1982	UU HAK CIPTA 1987
<p>Pasal 44</p> <p>(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p> <p>(3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(4) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah kejahatan.</p>	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>(4) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)".</p>

Apabila dibandingkan, maka ancaman sanksi pidana Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta 1987 jauh lebih berat daripada ancaman sanksi pidana Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta 1982. Perubahan sanksi pidana menjadi lebih berat dalam UU Hak Cipta 1987 merupakan upaya preventif negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana Hak Cipta, sekaligus merupakan upaya represif untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dengan ancaman sanksi pidana yang lebih berat secara tidak langsung akan memberikan efek psikologis nyaman dan aman bagi pencipta sehingga turut pula memacu etos masyarakat dalam mencipta.

*Kedua*, Perlindungan Hak Cipta yang diberikan harus berbasis pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur. Politik hukum tersebut sebagaimana terkandung dalam Pasal 16 UU Hak Cipta 1987 yang menyatakan bahwa:

Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.

*Ketiga*, perlindungan hak cipta yang diberikan tidak lagi berpihak kepada kepentingan nasional, akan tetapi lebih berpihak pada kepentingan asing khususnya negara-negara

maju. Hal tersebut nampak jelas dari perubahan-perubahan sebagai berikut:

a. UU Hak Cipta 1987 menghapus ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta 1982. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

- (3) Hak cipta suatu karya demi kepentingan nasional dengan sepengetahuan pemegangnya dapat dijadikan milik negara dengan Keputusan Presiden atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
- (4) Kepada pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh Presiden.

b. UU Hak Cipta 1987 menghapus dan mengganti ketentuan Pasal 15 UU Hak Cipta 1982

Tabel 3.3 Perbandingan Pasal 15 UU Hak Cipta 1982 dan  
Pasal 15 UU Hak Cipta 1987

UU HAK CIPTA 1982	UU HAK CIPTA 1987
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Untuk kepentingan nasional tiap terjemahan dari ciptaan berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ciptaan berasal dari negara lain sedikitnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah;</li> <li>b. penterjemah telah meminta izin terjemahan dari pemegang hak cipta, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak</li> </ul>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan, sesuatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dan selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia, Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan / atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;</li> </ul>

<p>permintaan diajukan.</p> <p>(2) Untuk penterjemahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diperlukan izin dari Menteri Kehakiman.</p> <p>(3) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang hak cipta dan dalam memberikan izin untuk penterjemahan itu mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.</p>	<p>b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan, dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau menyatakan ketidakseediaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>c. melaksanakan sendiri penterjemahan dan / atau memperbanyak ciptaan tersebut, dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</p> <p>(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".</p>
---	--

c. UU Hak Cipta 1987 menghapus dan mengganti ketentuan

Pasal 16 UU Hak Cipta 1982

Tabel 3.4 Perbandingan Pasal 16 UU Hak Cipta 1982 dan

Pasal 16 UU Hak Cipta 1987

UU HAK CIPTA 1982	UU HAK CIPTA 1987
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 48 Sub b maka untuk kepentingan nasional ciptaan orang bukan</p>	<p>Pasal 16</p> <p>Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan</p>

<p>warga negara Indonesia dan badan asing dapat diperbanyak untuk keperluan pemakaian dalam wilayah Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan warga negara asing tersebut, selama 2 (dua) tahun sejak diumumkan belum cukup diperbanyak di wilayah Republik Indonesia;</li> <li>b. telah dimintakan izin untuk memperbanyak ciptaan tersebut, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>(2) Perbanyakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebut di atas, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.</li> <li>(3) Untuk memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan izin dari Menteri Kehakiman.</li> <li>(4) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang hak cipta dan dalam memberi izin perbanyakannya itu, mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.</li> </ol>	<p>dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.</p>
---	---

Berdasarkan perubahan tiga pasal sebagaimana diuraikan di muka maka dapat dipahami bahwa perlindungan Hak Cipta tidak lagi berpihak kepada kepentingan nasional. Hal tersebut dikarenakan telah terjadi penghapusan dan perubahan terhadap pasal-pasal UU Hak Cipta 1982 yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan Hak Cipta



dalam kerangka melindungi kepentingan nasional. Dengan dihapuskannya dan diubahnya pasal-pasal tersebut maka Politik Hukum Instrumental Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta 1987 berpotensi menghambat upaya untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia guna mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan bangsa dan negara lain.

Disamping perubahan tiga pasal sebagaimana diuraikan dimuka, perubahan Pasal 48 UU Hak Cipta 1982 juga berpotensi merugikan kepentingan nasional dan cenderung berpihak pada kepentingan asing.

Tabel 3.5 Perbandingan Pasal 48 UU Hak Cipta 1982 dan  
Pasal 48 UU Hak Cipta 1987

UU HAK CIPTA 1982	UU HAK CIPTA 1987
<p>Pasal 48</p> <p>Undang-undang ini berlaku terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>semua ciptaan warga negara Indonesia, badan hukum yang diumumkan pertama kali di dalam negeri maupun di luar negeri;</li> <li>semua ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan badan asing yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia.</li> </ol>	<p>Pasal 48</p> <p>Undang-undang ini berlaku terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;</li> <li>Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;</li> <li>Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau</li> <li>Negaranya dan Negara</li> </ol> </li> </ol>

	Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta".
--	---

Berdasarkan rumusan Pasal 48 yang baru maka dapat dipahami bahwa dengan dilindunginya ciptaan warga negara asing, bukan penduduk Indonesia, dan badan hukum asing melalui persyaratan perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 48 huruf c UU Hak Cipta 1987 berpotensi merugikan kepentingan nasional. Hal tersebut dikarenakan apabila Indonesia mengadakan perjanjian bilateral dengan negara maju atau tergabung dalam perjanjian multilateral yang sama, maka berdasarkan UU Hak Cipta 1948 Indonesia diwajibkan untuk melindungi pula ciptaan yang dihasilkan warga negara atau badan hukum tersebut. Apabila dikaitkan dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia pada saat itu belum mampu menyejajarkan diri dan menghasilkan ciptaan-ciptaan yang sebanding dengan negara-negara maju, maka dengan adanya ketentuan Pasal 48 yang baru tentunya akan menciptakan kondisi di mana akan lebih banyak ciptaan-ciptaan negara-negara maju yang notabene diperlukan untuk kepentingan nasional akan mendapatkan perlindungan di Indonesia, jika dibandingkan dengan

ciptaan-ciptaan Indonesia yang membutuhkan perlindungan di luar negeri.

Dalam perkembangannya, kuatnya kepentingan asing khususnya kepentingan negara-negara maju dibalik lahirnya Pasal 48 nampak jelas melalui diadakannya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara maju pasca diterbitkannya UU Hak Cipta 1987 hingga bergabungnya Indonesia dalam WTO/TRIPs *Agreement* tahun 1994. Adapun perjanjian-perjanjian yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>232</sup>

- 1) Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Rekaman Suara Antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988;
- 2) Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Rekaman Suara Antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989;
- 3) Persetujuan Mengenai Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dan Australia yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1993;

---

<sup>232</sup> [www.depdagri.go.id/media/.../perpres-keppres-inpres-1947-2012.pdf](http://www.depdagri.go.id/media/.../perpres-keppres-inpres-1947-2012.pdf).

- 4) Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris serta Irlandia Utara yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1994.

*Keempat*, perlindungan Hak Cipta yang diberikan lebih menitik beratkan pada kepentingan individu (Hak Individu) dibandingkan dengan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif). Dalam rumusan pasal-pasal UU Hak Cipta 1987 telah terjadi pergeseran Politik Hukum Instrumental Hak Cipta menjadi lebih bersifat individualistis yang meminggirkan kepentingan masyarakat. Hal tersebut nampak dalam rumusan pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 26 dan 27 UU Hak Cipta 1987. Berdasarkan pasal tersebut maka jangka waktu perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta 1987 menjadi jauh lebih lama jika dibandingkan dengan UU Hak Cipta 1982. Di satu sisi ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memacu etos mencipta dalam masyarakat sehingga menjadi lebih baik. Namun demikian, di sisi lain dengan lebih lamanya jangka waktu perlindungan Hak Cipta maka akan menjadi lebih lama pula monopoli yang dilakukan oleh pemegang Hak Cipta. Monopoli pemegang Hak Cipta tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat atas suatu ciptaan.

Dengan lebih lamanya jangka waktu perlindungan Hak Cipta maka secara otomatis akan lebih lama pula suatu ciptaan menjadi *public domain*. Ketika menjadi *public domain* besar kemungkinan ciptaan tersebut telah *out of date* yang sudah tidak dapat lagi “diperas sari-sari” keuntungannya atau kehilangan nilai ekonomi (*potential profit*) oleh pemegang Hak Cipta, dan tentunya menjadi kurang bermanfaat bagi masyarakat.

- b. Pasal 15 UU Hak Cipta 1987. Dalam pasal tersebut diperkenalkan ketentuan baru yakni mengenai lisensi wajib atau *compulsory licensing* sebagaimana yang diperkenalkan dalam Revisi *Bern Convention* di Stockholm tahun 1967. Perbedaan konsep lisensi wajib dalam Pasal 15 UU Hak Cipta 1987 dengan konsep pengambilalihan Hak Cipta demi kepentingan nasional dalam Pasal 15 UU Hak Cipta 1982 adalah bahwa konsep Pasal 15 UU Hak Cipta 1982 lebih mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan masyarakat) dibandingkan dengan kepentingan individu (pemegang Hak Cipta), sedangkan konsep lisensi wajib dalam Pasal 15 UU Hak Cipta 1987 memposisikan kepentingan individu diatas kepentingan nasional. Dengan diintroduksinya ketentuan baru tersebut maka nampak jelas bahwa perlindungan Hak Cipta

berdasarkan UU Hak Cipta 1987 lebih berpihak pada kepentingan individu (Hak Individu) dibandingkan dengan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif).<sup>233</sup>

- c. Dihapusnya ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai kepentingan nasional sebagaimana telah diuraikan di muka dan hanya menyisakan Pasal 14 mengenai pembatasan Hak Cipta.

*Kelima*, Perlindungan Hak Cipta yang diberikan tidak lagi didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang berbeda, akan tetapi didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang setara. Hal tersebut dikarenakan ketentuan UU Hak Cipta 1987 telah banyak menghapus dan mengubah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan nasional yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada bangsa Indonesia agar dapat mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan negara-negara maju.

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa telah terjadi pergeseran arah Politik Hukum Instrumental Hak Cipta dalam UU Hak Cipta 1987. Hal tersebut dikarenakan rumusan UU Hak Cipta 1987 didominasi oleh pasal-pasal yang mengandung politik hukum instrumental bahwa perlindungan

---

<sup>233</sup> Candra Irawan, *op.cit.*, hal. 118.

Hak Cipta lebih berpihak pada kepentingan negara-negara maju untuk mengamankan setiap ciptaan yang bermanfaat bagi negara-negara maju -khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi- di Indonesia. Rumusan UU Hak Cipta 1987 juga menunjukkan bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan dengan lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak individu sehingga memiliki kecenderungan mengabaikan kepentingan masyarakat. Disamping itu, prinsip keadilan dalam UU Hak Cipta 1987 tidak lagi didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang berbeda, akan tetapi didasarkan pada pemberian perlakuan yang setara. Pergeseran politik hukum instrumental dalam UU Hak Cipta 1987 menunjukkan bahwa secara yuridis UU Hak Cipta 1987 tidak lagi sesuai dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta. Ketidaksesuaian antara politik hukum instrumental dalam UU Hak Cipta 1987 dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta menunjukkan pula ketidaksesuaian antara politik hukum instrumental dalam UU Hak Cipta 1987 dengan Politik Hukum Dasar Hak Cipta. Namun demikian perlu dipahami bahwa dalam rumusan UU Hak Cipta 1987 telah dicantumkan ketentuan baru yang mengandung politik hukum instrumental bahwa perlindungan Hak Cipta yang diberikan harus berbasis pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur. Adapun pergeseran arah politik hukum

instrumental demikian ini berpotensi menghambat bangsa dan negara Indonesia dalam mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan negara-negara maju.

**Tabel 3.6** Politik Hukum Instrumental Yang Terkandung Dalam UU Hak Cipta 1987

No.	Politik Hukum Instrumental UU Hak Cipta 1987	Keterangan
1.	Hendak menjadikan perlindungan Hak Cipta sebagai pemacu etos mencipta sehingga dapat mendorong perkembangan dan kemajuan kebudayaan nasional yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kesusastraan, serta bentuk-bentuk kebudayaan lainnya di Indonesia.	Sesuai dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yakni untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kesusastraan, serta bentuk-bentuk kebudayaan lainnya;</li> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam rangka memacu etos masyarakat dalam mencipta.</li> </ul>
2.	Perlindungan Hak Cipta yang diberikan harus berbasis pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur.	Sesuai dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta yang diberikan harus berbasis pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur.
3.	Perlindungan hak cipta yang diberikan tidak lagi berpihak kepada kepentingan nasional, akan tetapi lebih berpihak pada kepentingan asing khususnya negara-negara maju.	<b>Tidak sesuai</b> dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka kepentingan nasional;</li> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus diberikan tidak hanya bagi Warga Negara Indonesia akan tetapi juga kepada warga negara asing dalam batas-batas kewajaran serta tidak merugikan kepentingan nasional;</li> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus dilakukan dalam kerangka negara yang merdeka dan berdaulat.</li> </ul>
4.	Perlindungan Hak Cipta yang diberikan lebih menitik beratkan pada kepentingan individu (Hak Individu) dibandingkan dengan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif).	<b>Tidak sesuai</b> dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan dengan memperhatikan keseimbangan atau harmoni antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / Kolektif)
5.	Perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan	<b>Tidak sesuai</b> dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan



	pemberian perlakuan yang setara	Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang berbeda dalam rangka tercapainya suatu keadilan
--	---------------------------------	--

Dalam perjalanannya, pada tahun 1994, pada tingkat internasional tengah berlangsung negosiasi GATT putaran ke-8 yang dikenal dengan *Uruguay Round*. Indonesia merupakan salah satu dari ratusan negara yang turut berpartisipasi dalam *Uruguay Round*. Dalam negosiasi tersebut negara-negara maju berpandangan bahwa kurangnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hambatan terhadap perdagangan internasional. Dalam *Uruguay Round* inilah negara-negara maju mendesak agar para anggota GATT lainnya juga menyadari besarnya pengaruh Hak Kekayaan Intelektual terhadap perdagangan internasional yang oleh karenanya harus diatur di dalam seperangkat perjanjian multilateral *WTO Agreement*.<sup>234</sup> Akhirnya pada negosiasi tersebut disepakati bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam *Annex 1C* dari *WTO Agreement*.

Disepakatinya *TRIPs Agreement* dalam *WTO Agreement* tidak lepas dari sejumlah perdebatan dalam proses negosiasinya. Hal tersebut dikarenakan negara-negara berkembang yang diwakili oleh Brasil dan India menolak

---

<sup>234</sup> Bernard Nainggolan, *op.cit.*, hal. 129.

pandangan negara-negara maju dengan berpendapat bahwa tidak terdapat korelasi antara Hak Kekayaan Intelektual dengan perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat proteksionis akan merusak tercapainya sistem perdagangan bebas. Negara berkembang juga berpendapat bahwa negara berkembang sebagai pihak yang jauh tertinggal dari negara-negara maju tidak memiliki padanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang setara dengan negara maju akan dirugikan dengan masuknya Hak Kekayaan Intelektual dalam WTO *Agreement* yang berakibat pada terhambatnya pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>235</sup>

Masuknya TRIPs *Agreement* ke dalam WTO *Agreement* merupakan sebuah tanda kemenangan negara-negara maju atas negara berkembang. Banyak pihak tidak jarang berpandangan bahwa WTO/TRIPs *Agreement* tidak lebih sebagai upaya penjajahan kembali secara terselubung kepada negara-negara berkembang yang baru saja merdeka pada Abad ke-20. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Peter Drahos menyatakan bahwa sistem perdagangan bebas dalam WTO tidak lebih sebagai sebuah sistem yang dijalankan oleh kelompok dunia lama yang dulu merupakan kekuatan-kekuatan kolonial –saat ini negara-negara maju- dan oleh karenanya sistem tersebut dirancang

---

<sup>235</sup> Nandang Sutrisno, "Implementasi Persetujuan TRIPs Dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia", <http://www.iprcentre.org/doc>, sebagaimana dikutip dalam Candra Irawan, *op.cit.*, hal. 6.

untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka.<sup>236</sup> Adapun *TRIPs Agreement* merupakan salah satu instrumen penguat dan pengaman kepentingan ekonomi negara-negara maju.

Indonesia telah meratifikasi *WTO Agreement* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Dengan meratifikasi *WTO Agreement* maka Indonesia juga berkewajiban untuk mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam *WTO Agreement* tak terkecuali *TRIPs Agreement*.

Dalam *WTO/TRIPs Agreement* terkandung prinsip-prinsip dasar yang merupakan politik hukum dari sistem perdagangan bebas di bawah WTO. Dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual maka terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>237</sup>

a. Prinsip *full compliance*<sup>238</sup>

Berdasarkan prinsip *full compliance* maka negara anggota WTO berkewajiban untuk mengimplementasikan seluruh ketentuan *WTO Agreement* tak terkecuali *TRIPs Agreement* ke dalam hukum positifnya tanpa kecuali.

---

<sup>236</sup> Lihat: Peter Drahos, *An Alternative Framework for The Global Regulation of Intellectual Property Rights*, (Canberra: Centre for Governance of Knowledge and Development, 2005), hal. 9. Lihat juga: Joost Smiers dan Marieke Van Schijndel, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, (Yogyakarta: Insist Press, 2012), hal. 49.

<sup>237</sup> Bandingkan dengan pendapat Achmad Zen Umar Purba, dalam Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 29-33, serta Candra Irawan, dalam Candra Irawan, *op.cit.*, hal. 258-264.

<sup>238</sup> Prinsip *full compliance* sebagaimana terkandung dalam *Article XVI par. 4 WTO Agreement*.

b. Prinsip *no reservation*<sup>239</sup>

Sejalan dengan prinsip *full compliance*, maka setiap negara anggota tidak diperbolehkan untuk melakukan reservasi atau persyaratan terhadap ketentuan WTO *Agreement* tak terkecuali TRIPs *Agreement*.

c. Prinsip *cross retaliation*<sup>240</sup>

Berdasarkan prinsip *cross retaliation* maka negara anggota yang merasa dirugikan oleh negara anggota lain dalam kegiatan perdagangan internasional dapat melakukan tindakan balasan pada negara lain tersebut. Dalam kaitannya dengan TRIPs *Agreement*, apabila suatu negara tidak memenuhi ketentuan TRIPs *Agreement* sehingga merugikan negara anggota lainnya, maka negara anggota yang merasa dirugikan dapat melakukan tindakan balasan kepada negara tersebut.

d. Prinsip standar minimum<sup>241</sup>

Ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam TRIPs *Agreement* merupakan ketentuan minimum yang wajib dilaksanakan oleh negara-negara anggotanya. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa negara anggota dapat

---

<sup>239</sup> Prinsip *no reservation* sebagaimana terkandung dalam Article XVI par. 5 WTO *Agreement*.

<sup>240</sup> Prinsip *cross retaliation* sebagaimana terkandung dalam Article 22 par. 3 WTO DSU *Agreement*.

<sup>241</sup> Prinsip standar minimum sebagaimana terkandung dalam Article 1 par. 1 TRIPs *Agreement*.

menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas dalam memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan catatan sesuai dengan *TRIPs Agreement* dan prinsip-prinsip hukum internasional.

e. Prinsip *national treatment*<sup>242</sup>

Pada intinya prinsip *national treatment* menghendaki suatu negara anggota memberikan perlakuan yang sama dalam memberikan perlindungan Hak Cipta baik kepada warga negaranya maupun kepada warga negara lain. Namun demikian prinsip ini tidak berlaku dalam kaitannya dengan prosedur yudisial dan administratif suatu negara.<sup>243</sup>

f. Prinsip *most-favoured-nation treatment*<sup>244</sup>

Inti dari prinsip *most-favoured-nation treatment* adalah bahwa pemberian suatu keuntungan (*advantage*), keberpihakan (*favour*), hak istimewa (*privilege*), atau kekebalan (*immunity*) oleh suatu negara anggota kepada negara anggota lain, harus diberikan juga kepada warga negara anggota lainnya dengan segera dan tanpa syarat.<sup>245</sup>

---

<sup>242</sup> Prinsip *national treatment* sebagaimana terkandung dalam *Article 3 TRIPs Agreement*.

<sup>243</sup> Prinsip *most-favoured-nation treatment* sebagaimana terkandung dalam *Article 3 par. 2 TRIPs Agreement*.

<sup>244</sup> Prinsip teritorialitas sebagaimana terkandung dalam *Article 4 TRIPs Agreement*.

<sup>245</sup> Menurut Ahmad Zen Umar Purba, prinsip *national treatment* dan prinsip *most-favoured-nation treatment* merupakan prinsip pokok dalam menciptakan perdagangan internasional yang ideal. Hal tersebut dikarenakan, dengan menguti pendapat Frederick Abbot, putusan-putusan diplomatik di masa yang lalu tidak dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan dunia, oleh karenanya prinsip *most-favoured-nation*

g. Prinsip teritorialitas

Dalam *TRIPs Agreement* diatur bahwa titik tolak pelaksanaan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berinduk pada kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Hal tersebut berarti Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara, bukan pihak non-negara.<sup>246</sup>

h. Prinsip alih teknologi<sup>247</sup>

*TRIPs Agreement* membuka kemungkinan bagi dilakukannya suatu alih teknologi yang dimiliki negara maju kepada negara berkembang.

i. Prinsip kesehatan masyarakat dan kepentingan masyarakat<sup>248</sup>

*TRIPs Agreement* membuka kesempatan bagi negara-negara anggota untuk menetapkan langkah-langkah penting dalam memberikan perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk pula pengembangan kepentingan umum pada sektor-sektor vital bagi pengembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

---

*treatment* mempunyai maksud untuk mendepolitisasi sistem ekonomi internasional. Lihat: Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 31.

<sup>246</sup> *Loc.cit.*

<sup>247</sup> Prinsip alih teknologi sebagaimana terkandung dalam *Article 7 TRIPs Agreement*.

<sup>248</sup> Prinsip kesehatan masyarakat dan kepentingan masyarakat sebagaimana terkandung dalam *Article 8 par. 1 TRIPs Agreement*.

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta maka Indonesia sebagai negara anggota WTO berkewajiban untuk mengimplementasikan segala bentuk ketentuan WTO/TRIPs *Agreement* di bidang Hak Cipta ke dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, apabila ditinjau dari segi Politik Hukum Nasional maka terdapat beberapa prinsip dasar WTO/TRIPs *Agreement* yang jelas bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta, yakni sebagai berikut:

a. Prinsip *full compliance* dan prinsip *no reservation*

Dengan meratifikasi WTO *Agreement* maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan WTO *Agreement* tak terkecuali TRIPs *Agreement* dengan sepenuhnya tanpa dimungkinkan adanya reservasi atau persyaratan sedikitpun. Mengimplementasikan WTO/TRIPs *Agreement* sepenuhnya bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka kepentingan nasional. Hal tersebut dikarenakan ketundukan secara penuh pada WTO/TRIPs *Agreement* menciptakan suatu kondisi dimana Indonesia tidak dapat mengatur perlindungan Hak Cipta secara tersendiri yang sesuai Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta Nasional yang bersumber pada Pancasila dan undang-undang dasar

serta tingkat perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sebagaimana dipahami pula bahwa ketentuan-ketentuan dalam *WTO/TRIPs Agreement* lebih banyak berpihak pada kepentingan negara-negara maju, ketundukan secara penuh terhadap *WTO/TRIPs Agreement* tidak sesuai dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta karena bertentangan dengan kepentingan nasional.

b. Prinsip *cross retaliation*

Dengan meratifikasi *WTO Agreement* maka Indonesia terikat sepenuhnya dengan ketentuan *WTO Agreement*, salah satunya ketentuan mengenai *cross retaliation*. Apabila dikaitkan dengan kondisi Indonesia dimana banyak terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta, maka ketentuan mengenai *cross retaliation* sebagaimana diatur *Article 22 paragraph 3 WTO DSU Agreement* dapat membahayakan kepentingan nasional. Hal tersebut dikarenakan negara yang merasa dirugikan akibat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia dapat melakukan tindakan balasan yang tidak terbatas pada bidang Hak Cipta saja, akan tetapi dapat berupa sanksi ekonomi yang sangat merugikan Indonesia. Begitu kuatnya instrumen *cross retaliation* membuka kemungkinan bagi digunakannya instrumen ini oleh negara-negara maju untuk melakukan intervensi terhadap



pemerintah Indonesia agar lebih tunduk dan mengimplementasikan WTO/TRIPs *Agreement* sepenuhnya sesuai dengan kepentingan negara-negara maju untuk melindungi setiap ciptaan yang dapat menguntungkan negaranya serta melakukan berbagai upaya untuk menghentikan berbagai pelanggaran terhadap ciptaan tersebut.<sup>249</sup> Penggunaan mekanisme *cross retaliation* sebagai alat intervensi negara-negara maju terhadap Indonesia merupakan tindakan yang menafikan kedudukan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Berdasarkan uraian di muka maka prinsip *cross retaliation* bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa: (1) Perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka kepentingan nasional; (2) Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka negara yang merdeka dan berdaulat.

c. Prinsip standar minimum

Dengan meratifikasi WTO *Agreement* maka Indonesia wajib mengimplementasikan seluruh ketentuan WTO *Agreement* tak terkecuali TRIPs *Agreement*. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut berupa standar minimum

---

<sup>249</sup> Lihat: Joost Smiers dan Marieke Van Schijndel, *op.cit.*, hal. 19.

yang harus dilaksanakan oleh setiap negara anggota. Dikarenakan WTO/TRIPs *Agreement* lebih berpihak kepada kepentingan negara-negara maju maka standar minimum tersebut dirancang untuk memenuhi kepentingan negara-negara maju. Hal tersebut membuat negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidak memiliki kebebasan dalam memberikan perlindungan Hak Cipta karena harus memenuhi seluruh standar minimum yang disyaratkan oleh WTO/TRIPs *Agreement* meskipun standar minimum tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional dan cukup berat untuk diimplementasikan dalam sistem hukum nasional.<sup>250</sup> Disamping itu, penentuan standar minimum yang sama antara negara-negara maju dan berkembang tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan dengan perlakuan yang berbeda, karena telah memberikan perlakuan yang setara kepada negara-negara maju dan berkembang yang pada kenyataannya memiliki tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat yang berbeda. Berdasarkan uraian di muka maka prinsip standar minimum bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa: (1) Perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka kepentingan nasional; (2) Perlindungan Hak Cipta

---

<sup>250</sup> Lihat: *Ibid.*, hal. 39.

diberikan berdasarkan prinsip keadilan dengan perlakuan yang berbeda.

d. Prinsip *national treatment*

Dengan meratifikasi WTO *Agreement* maka Indonesia wajib mengimplementasikan prinsip *national treatment* dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Sebagaimana dipahami bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang tertinggal dari negara-negara maju dalam rangka mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan negara-negara maju memberikan perlakuan-perlakuan khusus kepada Warga Negara Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Cipta. Berdasarkan prinsip *national treatment* maka pemerintah Indonesia harus memberikan perlakuan khusus tersebut kepada seluruh warga negara anggota. Dengan diberikannya perlakuan khusus kepada seluruh warga negara anggota maka maksud dan tujuan pemerintah dalam memberikan perlakuan khusus kepada Warga Negara Indonesia menjadi tidak tercapai, sehingga prinsip ini bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta Nasional bahwa perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka kepentingan nasional. Disamping itu prinsip *national treatment* pada dasarnya didasarkan pada prinsip keadilan

dengan perlakuan yang setara, sehingga tentu saja bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan berdasarkan prinsip keadilan dengan perlakuan yang berbeda.

e. Prinsip *most-favoured-nation treatment*

Prinsip *most-favoured-nation treatment* yang pada dasarnya memberikan perlakuan setara kepada seluruh negara anggota perjanjian pada dasarnya bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan berdasarkan prinsip keadilan dengan perlakuan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan ditengah tata dunia saat ini yang dipenuhi ketimpangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, maka diperlukan adanya suatu perlakuan khusus yang diberikan kepada negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Perlakuan-perlakuan khusus dalam perlindungan Hak Cipta antara negara-negara berkembang sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju. Dengan meratifikasi *WTO Agreement* maka Indonesia tidak dapat memberikan perlakuan-perlakuan khusus kepada negara-negara berkembang lainnya, begitu juga sebaliknya

negara-negara berkembang lainnya tidak dapat memberikan perlakuan-perlakuan khusus kepada Indonesia.

Disamping memuat beberapa prinsip-prinsip yang jelas bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta sebagaimana diuraikan di muka, terdapat pula beberapa hal baik secara tersirat maupun tersurat dalam *WTO/TRIPs Agreement* yang tidak sesuai dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta dan berpotensi merugikan Indonesia. Hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan *TRIPs Agreement* lebih condong kearah konsep perdagangan khususnya perdagangan internasional yang berarti bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam *WTO/TRIPs Agreement* dimaksudkan untuk menunjang komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut setidaknya ditegaskan melalui dua hal yakni: pertama, pemberian nama *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang oleh Ahmad Zen Umar Purba diterjemahkan sebagai Aspek-aspek perdagangan Hak Kekayaan Intelektual;<sup>251</sup> Kedua, kedudukan *TRIPs*

---

<sup>251</sup> Lihat: Ahmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 21.

*Agreement* diatur dalam *Annex 1C*. Kedudukan *TRIPs Agreement* di antara berbagai perjanjian lainnya di dalam *WTO Agreement* sebagai suatu sistem penunjang perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan sebagai lampiran, *TRIPs Agreement* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *WTO Agreement*.

Dengan didasarkannya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai penunjang komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual maka berakibat pada perlindungan Hak Cipta yang lebih menekankan pada aspek pemanfaatan nilai ekonomi dari suatu ciptaan dibandingkan esensi dari perlindungan Hak Cipta sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang lebih menekankan pada aspek moral dari suatu ciptaan. Kondisi tersebut tentu saja memiliki konsekuensi nyata berupa pemanfaatan nilai ekonomi yang bersifat eksploitatif.

Apabila dikaitkan dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia sebagai negara berkembang yang tertinggal dan tidak memiliki padanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang setara dengan negara maju, maka sangat diperlukan adanya pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju ke Indonesia untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan secara penuh bagi perkembangan dan

kemajuan masyarakat. Namun demikian pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi dapat dilakukan secara bebas karena hal tersebut telah dilindungi -melalui suatu monopolisasi- oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual salah satunya Hak Cipta, sedangkan konsep komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual menyebabkan pengalihan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar *royalty*, sehingga sulit dipenuhi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut tentu saja menghambat upaya bangsa dan negara Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan negara-negara maju.

Kondisi komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual tak terkecuali Hak Cipta dewasa ini tentu saja sangat kontras dengan fakta sejarah bahwa pada Abad ke-19, negara-negara yang saat ini telah menjadi negara maju dapat menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersebar di seluruh dunia secara bebas dan gratis, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dengan sumber dana yang diperoleh dari negara-negara jajahan mereka yang saat ini merupakan mayoritas negara-negara berkembang.<sup>252</sup> Kondisi ini juga

---

<sup>252</sup> Lihat: Joost Smiers dan Marieke Van Schijndel, *op.cit.*, hal. 20.

semakin mempertegas pandangan bahwa WTO/TRIPs *Agreement* tidak lebih sebagai upaya penjajahan kembali secara terselubung kepada negara-negara berkembang.

- b. Hak Kekayaan Intelektual sebagai *private rights* yang dilindungi dalam jangka waktu tertentu

Sejalan dengan konsep komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual maka dalam *preamble* atau mukadimah TRIPs *Agreement* dinyatakan secara tegas bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu *private rights*. Dengan dinyatakan sebagai *private rights* maka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan berupa hak monopoli kepada pemegang Hak Cipta untuk mengambil manfaat ekonomi dari setiap Hak Cipta yang dimilikinya. Mengingat betapa besarnya peranan Hak Kekayaan Intelektual tak terkecuali Hak Cipta dalam kehidupan masyarakat maka hak monopoli yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hal tersebut dimaksudkan agar setelah jangka waktu perlindungan habis, ciptaan yang sebelumnya di monopoli oleh pemegang Hak Cipta berubah menjadi *public domain* yang dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat.

Dapat dipahami bahwa ditetapkannya jangka waktu perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual adalah dalam



rangka melindungi kepentingan publik dari monopoli pemegang hak. Namun demikian dalam kenyataannya, nuansa yang melekat bahwa *public domain* tidak lebih dari sekedar penampungan bagi kekayaan intelektual (ciptaan) yang sudah tidak dapat lagi “diperas sari-sari” keuntungannya atau kehilangan nilai ekonomi (*potential profit*) karena sudah *out of date*, sehingga yang tersisa hanyalah “ampas-ampas” kekayaan intelektual yang hanya perlu dilindungi secara moral saja. Hal tersebut dikarenakan penentuan jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tak terkecuali TRIPs *Agreement* adalah berdasarkan prinsip standar minimum yang notabene dirancang untuk kepentingan negara-negara maju sebagai mayoritas pemegang Hak Kekayaan Intelektual tak terkecuali Hak Cipta.<sup>253</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan TRIPs *Agreement* maka standar minimum jangka waktu perlindungan Hak Cipta untuk karya cipta selain karya fotografi dan karya seni terapan, adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Penetapan jangka waktu perlindungan tersebut menurut negara-negara maju

---

<sup>253</sup> Lihat: Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.* hal. 26, lihat juga: Joost Smiers dan Marieke Van Schijndel, *op.cit.*, hal. 34-35.

telah melalui pertimbangan bahwa dalam jangka waktu tersebut Hak Cipta telah dapat di eksploitasi semaksimal mungkin oleh pemegang Hak Cipta, sedangkan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang ingin menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bebas dan sesegera mungkin maka jangka waktu perlindungan tersebut dirasakan sangat lama dan dalam era globalisasi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat maka besar kemungkinan ketika jangka waktu perlindungan terhadap ciptaan tersebut habis ciptaan telah *out of date* sehingga menghambat negara-negara berkembang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan negara maju.

Secara filosofis, penyebutan Hak Kekayaan Intelektual sebagai *private rights* dalam preambule atau mukadimah TRIPs *Agreement* menunjukkan bahwa penyusunan TRIPs *Agreement* didominasi oleh negara-negara maju yang notabene merupakan bangsa barat yang memiliki watak sosio-kultural liberalis-individualis. Oleh karenanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tak terkecuali Hak Cipta berdasarkan TRIPs *Agreement* memiliki kecenderungan untuk melindungi kepentingan individu (Hak

Individu) secara berlebih-lebihan terutama berkaitan dengan pemanfaatan nilai ekonomi (eksploitasi ekonomi). Hal tersebut tentu bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta Nasional yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif) karena berangkat dari watak sosio-kultural bangsa Indonesia yang religius-kolektivis.

c. Perlindungan program komputer

Sebagaimana dipahami bahwa dalam era konvergensi digital saat ini, program komputer memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Program komputer merupakan salah satu prasyarat penting bagi manusia untuk dapat mengakses informasi, mempercepat pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan produktivitas kerja. Sebagaimana dipahami pula bahwa dalam kenyataannya mayoritas program komputer komersial yang populer dan banyak digunakan saat ini berasal dari produsen-produsen program komputer Amerika Serikat, oleh karenanya Amerika Serikat mempunyai kepentingan besar dibalik perlindungan program komputer. Hal tersebut dikarenakan program komputer yang saat ini dikomersialisasikan dalam bentuk program komputer

berbasis lisensi (*proprietary software*) merupakan salah satu andalan ekspor Amerika Serikat dan merupakan salah satu sumber devisa negara yang sangat besar sehingga dapat mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat.

Berdasarkan *Article 10 paragraph 1 TRIPs Agreement* maka program komputer dilindungi Hak Cipta layaknya *literary works* (karya sastra) berdasarkan *Berne Convention* dan berdasarkan *Article 12* standar minimum jangka waktu perlindungan Hak Cipta minimal selama 50 (lima puluh) tahun. Lamanya jangka waktu perlindungan program komputer berdasarkan standar minimum perlindungan Hak Cipta dalam *TRIPs Agreement* sangatlah menguntungkan Amerika Serikat. Sekalipun *lifecycle* software sangatlah pendek karena terus diperbarui oleh para produsen program komputer, akan tetapi pada dasarnya suatu jenis program komputer dikembangkan berdasarkan bahasa pemrograman yang sama dengan program komputer sebelumnya, bahasa pemrograman inilah yang pada dasarnya ingin dilindungi selama mungkin karena merupakan kunci untuk pengembangan program komputer selanjutnya. Oleh karenanya untuk melindungi kepentingan dagangnya, Amerika Serikat mempunyai kepentingan agar program komputer dilindungi jangka waktu yang sangat

lama sehingga dalam jangka waktu tersebut tidak dimungkinkan bagi pihak lain untuk membongkar bahasa pemrograman tersebut untuk kemudian mengembangkannya menjadi program komputer baru karena merupakan pelanggaran Hak Cipta. Di satu sisi, tentu saja hal tersebut membuat Amerika Serikat semakin mendominasi perdagangan program komputer internasional dan semakin membuat masyarakat dunia bergantung pada program-program komputer asal Amerika Serikat sehingga memberikan keuntungan ekonomi bagi Amerika Serikat dan produsen-produsen program komputernya. Di sisi yang lain, lamanya jangka waktu perlindungan membuat masyarakat tidak bisa mengembangkan program komputer tersendiri berbasis pada program komputer populer tersebut. Dalam kaitannya dengan kepentingan negara-negara berkembang dan tertinggal maka monopoli tersebut merugikan kepentingan nasional mereka karena memperlambat negara-negara tersebut untuk dapat menguasai pembuatan dan pengembangan program komputer sehingga terus menempatkan negara-negara tersebut dalam posisi sebagai konsumen program komputer yang harus tunduk pada berbagai aturan lisensi serta biaya yang tidak sedikit untuk membeli lisensi program komputer tersebut.

d. Singkatnya masa transisi

Berdasarkan *Article 65* dan *66 TRIPs Agreement* maka diberikan masa transisi bagi negara-negara berkembang selama empat tahun dan negara-negara tertinggal selama sepuluh tahun sejak berlakunya *WTO Agreement* tanggal 1 Januari 1995 untuk mempersiapkan diri sebelum pemberlakuan *TRIPs Agreement*. Apabila dikaitkan dengan ketertinggalan yang dialami negara-negara berkembang dan tertinggal dari negara-negara maju, maka waktu transisi yang ditentukan tersebut sangatlah singkat. Dalam masa transisi yang singkat tersebut musthail bagi negara-negara berkembang dan tertinggal tak terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju sehingga siap menghadapi negara-negara maju dalam sistem pasar bebas. Ketidaksiapan negara-negara berkembang dan tertinggal menghadapi sistem WTO berakibat pada semakin lemahnya posisi negara-negara berkembang dan tertinggal dalam sistem pasar bebas sehingga harus puas menerima posisinya sebagai pasar bagi industri negara-negara maju. Singkatnya masa transisi pemberlakuan *WTO/TRIPs Agreement* seakan mempertegas bahwa sistem perdagangan internasional

merupakan sistem yang dijalankan oleh segelintir negara yakni negara maju untuk terus mengamankan kepentingan ekonomi dan melanggengkan hegemoni mereka di dunia.

Terlepas dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta sehingga berpotensi besar merugikan kepentingan nasional, pada dasarnya dalam WTO/TRIPs *Agreement* terkandung pula prinsip-prinsip serta ketentuan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang dan terbelakang layaknya Indonesia. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip alih teknologi, dan prinsip kesehatan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun demikian, dalam kenyataannya kedua tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh negara-negara berkembang dan tertinggal.

Dalam kaitannya dengan alih teknologi, dalam kenyataannya tidak mudah bagi negara-negara berkembang dan tertinggal untuk melaksanakan alih teknologi. Hal tersebut dikarenakan pemilik teknologi dari negara-negara maju menetapkan persyaratan yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi dalam proses alih teknologi sehingga sulit dipenuhi oleh negara-negara berkembang. Disamping itu, dalam kenyataannya proses alih teknologi memakan waktu yang

sangat lama hingga teknologi tersebut benar-benar dapat dikuasai oleh negara-negara berkembang dan tertinggal. Lamanya proses tersebut membuat teknologi yang berhasil dialihkan sudah tertinggal atau *out of date*, karena pada saat yang sama negara-negara maju telah dapat menciptakan teknologi yang lebih mutakhir dan beberapa generasi lebih canggih dari teknologi yang dialihkan.<sup>254</sup>

Dalam kaitannya dengan prinsip kesehatan masyarakat dan kepentingan masyarakat maka, dalam kenyataannya khususnya bagi kepentingan masyarakat, negara-negara berkembang dan tertinggal tidak akan mudah untuk menyusun ketentuan-ketentuan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat mengingat keterikatan negara-negara tersebut sebagai negara anggota WTO secara *full compliance* kepada seluruh aturan *WTO Agreement*.

Berdasarkan uraian mengenai *WTO/TRIPs Agreement* di muka, maka dapat dipahami bahwa pengimplementasian *WTO/TRIPs Agreement* dalam perlindungan Hak Cipta nasional dapat merugikan kepentingan nasional. Hal tersebut dikarenakan mayoritas prinsip-prinsip dasar dan ketentuan *WTO/TRIPs Agreement* dalam kaitannya dengan Hak Cipta telah bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta. Namun

---

<sup>254</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Alih Teknologi Melalui Sarana Technical Assistance Agreement*, (Semarang: Penerbit UNDIP, 2005), hal. 61, lihat juga: Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 83 dan 88.



demikian kenyatannya Indonesia telah meratifikasi Indonesia telah meratifikasi *WTO Agreement* melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Dengan meratifikasi *WTO Agreement* maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam *WTO Agreement* tak terkecuali *TRIPs Agreement*. Implementasi tersebut ke dalam sistem hukum nasional dilakukan dengan:<sup>255</sup>

- a. Berkenaan dengan hal-hal yang pernah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada maka implementasi tersebut dilakukan dengan:
  - 1) mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan menyatakannya tidak berlaku;
  - 2) mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan menggantikannya dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan *WTO Agreement*;
  - 3) menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dipandang masih dapat disesuaikan dengan ketentuan *WTO Agreement*.

---

<sup>255</sup> Eddy Damian, *op.cit.*, hal. 79. Lihat juga: Suyud Margono, *Dampak Implementasi TRIPs*

- b. Berkenaan dengan hal-hal yang belum pernah diatur maka implementasi tersebut dilakukan dengan menyusun peraturan perundang-undangan yang baru sama sekali.

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta sebagai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual, maka untuk mempersiapkan berlakunya *WTO/TRIPs Agreement* secara penuh pada tanggal 1 Januari 2000, pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap substansi UU Hak Cipta 1987 agar sesuai dengan ketentuan *WTO/TRIPs Agreement* dengan menerbitkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 (UU Hak Cipta 1997). Secara garis besar substansi perubahan UU Hak Cipta 1997 menyangkut penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian terhadap pelanggaran Hak Cipta, jangka waktu perlindungan Hak Cipta, hak dan wewenang menggugat, ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta ruang lingkup berlakunya undang-undang. Disamping itu penyempurnaan juga dilakukan dengan menambahkan ketentuan-ketentuan mengenai

penyewaan ciptaan (*Rental Rights*), hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*), dan lisensi Hak Cipta.

Dalam kaitannya dengan politik hukum instrumental, maka pada dasarnya politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 1997 mencerminkan politik hukum Hak Cipta yang terkandung dalam *WTO/TRIPs Agreement* dan *Berne Convention*<sup>256</sup> sehingga bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta. Namun demikian, secara lebih mendalam politik hukum yang terkandung dalam UU Hak Cipta 1997 adalah sebagai berikut:

*Pertama*, hendak mensinergikan perlindungan Hak Cipta dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Politik hukum tersebut sebagaimana terkandung dalam konsiderans huruf a UU Hak Cipta 1997 yang menyatakan bahwa:

bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Hak Cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>256</sup> Lihat: *Article 9 par. 1 TRIPs Agreement*.

*Kedua*, perlindungan Hak Cipta lebih berpihak pada kepentingan asing khususnya negara-negara maju. Sama halnya dengan politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 1987, ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta 1997 semakin menegaskan keberpihakan perlindungan Hak Cipta pada kepentingan negara-negara maju daripada berpihak pada kepentingan nasional. Hal tersebut nampak jelas dalam ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam konsiderans huruf b dinyatakan:

bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundangundangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta terhadap persetujuan internasional tersebut.

Dengan mengimplementasikan dan melaksanakan WTO/TRIPs *Agreement* secara *full compliance* maka pada dasarnya perlindungan Hak Cipta menjadi lebih berpihak pada kepentingan negara-negara maju. Hal tersebut dikarenakan ketentuan WTO/TRIPs *Agreement* sebagaimana telah diuraikan di muka pada dasarnya merepresentasikan kepentingan negara-negara maju.

- b. Jangka waktu perlindungan program komputer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) yakni selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Ketentuan tersebut mengubah dan memperpanjang jangka waktu perlindungan program komputer yang sebelumnya berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Hak Cipta 1987 ditentukan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari implementasi *WTO/TRIPs Agreement* secara *full compliance* yang pada dasarnya berpihak pada kepentingan asing dibandingkan pada kepentingan nasional.
- c. Sama halnya dengan UU Hak Cipta 1987, dalam UU Hak Cipta 1997 tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta bagi kepentingan nasional.

*Ketiga*, komersialisasi Hak Cipta. Pada dasarnya pengetatan perlindungan Hak Cipta dalam UU Hak Cipta 1997 dimaksudkan untuk mendukung komersialisasi Hak Cipta sesuai dengan konsep *WTO/TRIPs Agreement*. Ditambahkannya ketentuan mengenai lisensi dalam Bab IIIA Pasal 38A-38C juga dimaksudkan bagi lancarnya komersialisasi Hak Cipta. Pada dasarnya komersialisasi Hak Cipta berpotensi besar merugikan

kepentingan nasional dikarenakan masih rendahnya tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Rendahnya tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat bangsa dan negara Indonesia akan sebatas menjadi konsumen dalam komersialisasi Hak Cipta.

*Keempat*, perlindungan Hak Cipta yang diberikan lebih menitikberatkan pada kepentingan individu (Hak Individu) dibandingkan dengan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif). Sejalan dengan perlindungan Hak Cipta sebagai pendukung komersialisasi Hak Cipta dan tidak dicantumkannya satu pasalpun yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta bagi kepentingan nasional maka perlindungan Hak Cipta pada UU Hak Cipta 1997 lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan individu sehingga sama halnya dengan UU Hak Cipta 1987, Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang terkandung dalam UU Hak Cipta 1997 bersifat individualistis.

*Kelima*, dengan sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan WTO/TRIPs *Agreement* maka perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta 1997 tidak didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan berbeda akan tetapi didasarkan pada pemberian perlakuan yang setara. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya ketentuan WTO/TRIPs *Agreement*

hendak memberikan suatu standar yang sama (perlakuan yang setara) baik kepada negara maju, negara berkembang, maupun negara tertinggal.

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa diratifikasinya WTO/TRIPs *Agreement* telah membawa pengaruh pada sistem hukum nasional tak terkecuali pada Undang-Undang Hak Cipta Nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin bergesernya arah Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang terkandung dalam UU Hak Cipta 1997. Rumusan UU Hak Cipta 1997 didominasi oleh pasal-pasal yang mengandung suatu politik hukum instrumental bahwa perlindungan Hak Cipta pemberian perlindungan Hak Cipta dilakukan untuk mendukung upaya komersialisasi Hak Cipta. Disamping itu dalam rumusan UU Hak Cipta 1997 menunjukkan pula bahwa pemberian perlindungan Hak Cipta semakin menitik beratkan pada kepentingan individu (Hak Individu) serta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang setara. Secara yuridis, politik hukum instrumental demikian tentu saja tidak sesuai dan bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta. Adapun ketidaksesuaian antara politik hukum instrumental dalam UU Hak Cipta 1997 dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta menunjukkan pula ketidaksesuaian antara politik hukum

instrumental dalam UU Hak Cipta 1997 dengan Politik Hukum Dasar Hak Cipta.

**Tabel 3.7** Politik Hukum Instrumental Yang Terkandung Dalam UU Hak Cipta 1997

No.	Politik Hukum Instrumental UU Hak Cipta 1997	Keterangan
1.	Hendak mensinergikan perlindungan Hak Cipta dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional.	Sesuai dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2.	Perlindungan Hak Cipta lebih berpihak pada kepentingan asing khususnya negara-negara maju.	<b>Tidak sesuai</b> dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka kepentingan nasional;</li> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus diberikan tidak hanya bagi Warga Negara Indonesia akan tetapi juga kepada warga negara asing dalam batas-batas kewajaran serta tidak merugikan kepentingan nasional;</li> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus dilakukan dalam kerangka negara yang merdeka dan berdaulat.</li> </ul>
3.	Komersialisasi Hak Cipta.	<b>Tidak sesuai</b> dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka kepentingan nasional;</li> <li>- Perlindungan Hak Cipta diberikan dengan memperhatikan keseimbangan atau harmoni antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / Kolektif).</li> </ul>
4.	Perlindungan Hak Cipta yang diberikan lebih menitik beratkan pada kepentingan individu (Hak Individu) dibandingkan dengan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif).	<b>Tidak sesuai</b> dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan dengan memperhatikan keseimbangan atau harmoni antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / Kolektif).
5.	Perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang setara.	<b>Tidak sesuai</b> dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang berbeda dalam rangka tercapainya



### 3. Politik Hukum Instrumental Hak Cipta Yang Terkandung Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

Lima tahun pasca pemerintah menerbitkan UU Hak Cipta 1997, pada tahun 2002 pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2002). Dengan diterbitkannya UU Hak Cipta 2002 maka UU Hak Cipta 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Hak Cipta 1987 dan terakhir diubah dengan UU Hak Cipta 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jauh sebelum UU Hak Cipta 2002 diterbitkan, naskah rancangan undang-undang Hak Cipta yang menjadi embrio UU Hak Cipta 2002 sebetulnya telah dibahas oleh Presiden bersama dengan DPR mulai akhir tahun 1999 hingga disetujui DPR pada tanggal 11 Juli 2002 dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002. Adapun yang menjadi dasar pengajuan rancangan undang-undang tersebut adalah: *pertama*, perlunya penegasan tentang kepentingan nasional sebagai payung pengaturan, termasuk penggalakan potensi daerah dalam pengembangan Hak Cipta. *Kedua*, masih terdapat beberapa aspek perlindungan dan aspek penegakan hukum dalam TRIPs *Agreement* serta yang terdapat dalam beberapa konvensi internasional terkait Hak Cipta yang belum terakomodasi dalam UU Hak Cipta 1997.

*Ketiga*, perlunya penyesuaian peraturan dengan kebutuhan baru berdasarkan pengalaman praktis. *Keempat*, diperlukan satu naskah tunggal undang-undang Hak Cipta yang utuh dan tersendiri tidak seperti UU Hak Cipta 1997 yang mengubah ketentuan UU Hak Cipta 1982 dan UU Hak Cipta 1987.<sup>257</sup>

Berdasarkan rumusan pasal-pasal UU Hak Cipta 2002 maka terkandung suatu politik hukum instrumental yang hendak dilaksanakan pemerintah sebagai berikut:

*Pertama*, perlindungan Hak Cipta yang diberikan harus berbasis pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur. Politik hukum tersebut sebagaimana terkandung dalam Pasal 17 UU Hak Cipta 2002 yang menyatakan bahwa:

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

*Kedua*, perlindungan Hak Cipta diberikan dalam rangka untuk melindungi dan mendorong pengembangan kebudayaan nasional termasuk pula kebudayaan tradisional.<sup>258</sup> Politik hukum tersebut sebagaimana terkandung dalam:

a. Konsiderans huruf a yang menyatakan bahwa:

bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan

---

<sup>257</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2011), hal. 113.

<sup>258</sup> Lihat: Konsiderans dan Penjelasan bagian Umum UU Hak Cipta 1982.

pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

b. Pasal 10 yang menyatakan bahwa:

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 tersebut maka negara berkedudukan sebagai pemegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional. Disamping itu negara juga berkedudukan sebagai pemegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat. Dengan kedudukan tersebut maka diharapkan negara akan senantiasa melindungi kebudayaan nasional dari upaya monopoli dan komersialisasi pihak tertentu. Apabila dibandingkan dengan rumusan Pasal 10 UU Hak Cipta 1982 yang kemudian diubah dengan UU Hak Cipta 1987 maka objek perlindungan dalam Pasal 10 UU Hak

Cipta 2002 jauh lebih lengkap, yaitu dengan penambahan *folklor* sebagai objek perlindungan Hak Cipta yang dipegang oleh negara.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan *folklor* maka berdasarkan Pasal 10 ayat (3) pemanfaatan *folklor* oleh warga negara asing harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi terkait. Apabila dicermati lebih lanjut maka rumusan pasal ini mengandung beberapa kekurangan, seperti Instansi apakah yang dimaksud sebagai “instansi terkait” dalam Pasal 10 ayat (3)? Lebih lanjut, bagaimanakah ketentuan mengenai pemanfaatan *folklor* oleh Warga Negara Indonesia?<sup>259</sup> Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 10 ayat (3) hanya diatur mengenai pemanfaatan *folklor* oleh warga negara asing. Disamping itu dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) hingga saat ini belum pernah diterbitkan oleh pemerintah.<sup>260</sup> Kekurangan-kekurangan inilah yang kemudian menjadi celah-celah yang

---

<sup>259</sup> Etty S. Suhardo, *Ekspresi Karya Seni Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa*, hal.3, makalah diunduh dari [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id) tanggal 19 Januari 2013.

<sup>260</sup> Dalam pasal-pasal UU Hak Cipta 2002 tidak tercantum mengenai batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah atau peraturan pelaksanaan lainnya. Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang yang lahir pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena diwajibkan mencantumkan ketentuan mengenai batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. (Pasal 39 UU No. 10 Tahun 2004 dan Pasal 74 UU No. 12 Tahun 2011).

dapat melemahkan upaya perlindungan kebudayaan nasional.

- c. Pasal 31 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan negara berdasarkan Pasal 10 ayat 2 berlaku tanpa batas waktu. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar negara dapat melindungi dan mengembangkan *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat semaksimal mungkin bagi pengembangan kebudayaan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian dalam UU Hak Cipta 2002 tidak diatur secara tegas mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dipegang negara atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

- d. Pasal 15 yang menyatakan bahwa:

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

- (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- d. perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 15 diatur mengenai pembatasan Hak Cipta atau pengecualian terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam istilah asing sering disebut dengan istilah *fair dealing* atau *fair use*. Cara pemanfaatan ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta adalah dengan menyebutkan sumbernya dengan jelas. Adapun dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan diatur dalam Pasal 15 huruf a, c, d, dan e. Dengan adanya pembatasan tersebut maka masyarakat dapat menggunakan, mengambil alih, dan memperbanyak ciptaan-ciptaan yang ada guna pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam kaitannya dengan tindakan

memperbanyak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf e, maka tindakan memperbanyak ciptaan berdasarkan UU Hak Cipta 2002 hanya terbatas pada tindakan memperbanyak yang dilakukan oleh institusi saja yakni perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial, sedangkan untuk tindakan memperbanyak ciptaan yang dilakukan oleh individu sekalipun untuk alasan pendidikan atau pengembangan ilmu pengetahuan dilarang dan tergolong sebagai pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut maka segala bentuk tindakan memperbanyak ciptaan seperti proses copying (mengopi) buku seperti yang lazim dilakukan baik oleh para siswa dan mahasiswa maupun para pendidik saat ini merupakan tindakan pelanggaran Hak Cipta. Ketentuan ini tentu saja perlu diperhatikan, mengingat tindakan serupa di negara-negara lain seperti Inggris, Australia, New Zealand, Canada, dan Amerika Serikat digolongkan sebagai *fair dealing* atau *fair use* sehingga bukan merupakan tindakan pelanggaran Hak Cipta.<sup>261</sup>

e. Pasal 16 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>261</sup> Budi Santoso, *op.cit.*, hal. 302-303.

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
  - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum



pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.

- (4) Penerjemahan atau Perbanyakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan Pasal 16 tersebut merupakan bentuk lisensi wajib atau *compulsory licensing* sebagaimana yang diperkenalkan dalam Revisi *Bern Convention* di Stockholm tahun 1967. Dalam hukum Hak Cipta nasional ketentuan lisensi wajib juga telah diperkenalkan dalam Pasal 15 UU Hak Cipta 1987, namun demikian dalam kaitannya dengan perbanyakkan melalui lisensi wajib dalam UU Hak Cipta 2002 mengalami pengetatan yakni melalui jangka waktu berjenjang sesuai dengan jenis kebudayaan dan bidang ilmu tertentu sebagaimana diatur dalam ayat (3).

*Ketiga*, komersialisasi Hak Cipta. Sebagai bentuk implementasi dari ketentuan WTO/TRIPs *Agreement* maka pada dasarnya rumusan ketentuan yang terkandung dalam UU Hak Cipta 2002 dimaksudkan untuk mendukung komersialisasi Hak

Cipta. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Konsiderans huruf c sebagai berikut:

bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Disamping itu komersialisasi Hak Cipta juga ditunjukkan misalnya dalam pasal mengenai lisensi sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 45-47 serta pasal mengenai Hak Penyewaan (*Rental Right*) atas karya sinematografi dan program komputer dalam Pasal 2 ayat (2).

Upaya komersialisasi Hak Cipta juga didukung dengan ketentuan ancaman sanksi pidana yang lebih lengkap -termasuk ancaman sanksi pidana pelanggaran *neighbouring rights*- dan denda yang lebih berat jika dibandingkan dengan rumusan undang-undang sebelumnya. Pengetatan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi tidak pembajakan atas ciptaan sehingga komersialisasi Hak Cipta oleh pemegang Hak Cipta juga dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal dan mendatangkan keuntungan finansial.

Tabel 3.8 Perbandingan Ancaman Sanksi Pidana Hak Cipta dalam UU Hak Cipta 1982, UU Hak Cipta 1987, dan UU Hak Cipta 2002

UU HAK CIPTA 1982	UU HAK CIPTA 1987	UU HAK CIPTA 2002
Pasal 44 (1) Barangsiapa dengan	Pasal 44 (1) Barangsiapa dengan	Pasal 72 (1) Barangsiapa dengan

<p>sengaja melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p> <p>(3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(4) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah kejahatan.</p>	<p>sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>(4) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)".</p>	<p>sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu</p>
---	--	---

		<p>miliar rupiah).</p> <p>(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>
--	--	--

*Keempat*, perlindungan Hak Cipta yang diberikan lebih menitik beratkan pada kepentingan individu (Hak Individu) dibandingkan dengan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif). Pada dasarnya latar belakang diterbitkannya UU Hak Cipta 2002 adalah adanya keperluan untuk melindungi kepentingan nasional. Bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional salah satunya ditunjukkan melalui diseimbangkannya pemenuhan kepentingan individu (Hak Individu) dengan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif) dalam rumusan undang-undang Hak Cipta sebagaimana yang dinyatakan dalam Konsiderans huruf c UU Hak Cipta 2002. Namun demikian, dikarenakan UU Hak Cipta 2002 diterbitkan pula untuk mengimplementasikan *WTO/TRIPs Agreement* -yang bersifat *full compliance*- serta konvensi internasional lain di bidang Hak Cipta dengan baik, maka perlindungan perlindungan Hak Cipta yang diberikan lebih menitik beratkan pada kepentingan individu (Hak Individu) sedangkan keperluan untuk melindungi kepentingan nasional dengan menyeimbangkan pemenuhan kepentingan individu (Hak Individu) dengan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif) menjadi tidak terakomodasi dengan baik dalam rumusan UU Hak Cipta 2002. Adapun politik hukum instrumental yang menunjukkan bahwa

perlindungan Hak Cipta yang diberikan lebih menitik beratkan pada kepentingan individu (Hak Individu):

a. Pasal 16 mengenai lisensi wajib atau *compulsory licensing*.

Dikarenakan Indonesia merupakan negara anggota WTO/TRIPs *Agreement* yang wajib melaksanakan ketentuan WTO/TRIPs *Agreement* secara *full compliance* maka Indonesia mau tidak mau turut pula mengadopsi konsep lisensi wajib tersebut sebagai salah satu jalan alternatif untuk dapat menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat atas pemanfaatan suatu ciptaan. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di muka dalam penjelasan politik hukum instrumental UU Hak Cipta 1987, konsep lisensi wajib memposisikan kepentingan individu diatas kepentingan nasional. Hal tersebut berarti pula bahwa konsep lisensi wajib memang ditujukan untuk lebih melindungi kepentingan individu pencipta atas pengambil alihan ciptaannya oleh pihak lain disamping dikarenakan bersumber dari konsep perlindungan Hak Cipta negara-negara barat.

b. Pengetatan jangka waktu perlindungan karya derivatif dalam Pasal 30. Untuk memenuhi standar minimum jangka waktu perlindungan Hak Cipta berdasarkan TRIPs

*Agreement*, maka jangka waktu perlindungan Hak Cipta untuk karya-karya derivatif seperti program komputer, sinematografi, fotografi, *database*, dan karya hasil pengalihwujudan dilindungi dengan jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Apabila dibandingkan dengan UU Hak Cipta 1997 maka karya fotografi hanya dilindungi Hak Cipta dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan UU Hak Cipta 1987 maka tidak hanya karya fotografi akan tetapi juga program komputer dilindungi Hak Cipta dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.

- c. Pasal-pasal yang mengatur mengenai komersialisasi Hak Cipta seperti dalam Bab V Pasal 45-47 tentang lisensi dan Pasal 2 ayat (2) tentang Hak Penyewaan (*Rental Right*) atas karya sinematografi dan program komputer menunjukkan bahwa perlindungan Hak Cipta lebih menitik beratkan pada kepentingan individu pemegang Hak Cipta untuk melakukan eksploitasi ekonomi.
- d. Pasal 27 tentang sarana kontrol teknologi. Dalam pasal tersebut diatur mengenai perlindungan sarana kontrol teknologi yang dewasa ini banyak digunakan pemegang

Hak Cipta untuk melindungi ciptaannya khususnya ciptaan-  
ciptaan dalam bentuk digital. Pasal mengenai perlindungan  
sarana kontrol teknologi tersebut merupakan upaya untuk  
memperlancar dan melindungi kepentingan individu  
pemegang Hak Cipta dalam melakukan eksploitasi ekonomi  
atas ciptaannya.

Apabila dibandingkan dengan rumusan UU Hak Cipta 1987  
dan UU Hak Cipta 1997 maka rumusan UU Hak Cipta 2002  
memang jauh lebih banyak mengakomodasikan kepentingan  
masyarakat tetapi dengan tetap memposisikan kepentingan  
individu diatas kepentingan masyarakat. Namun demikian, jika  
dibandingkan dengan rumusan UU Hak Cipta 1982, maka  
nampak jelas bahwa UU Hak Cipta 2002 sangat berpihak pada  
pemenuhan kepentingan individu dibandingkan dengan  
kepentingan masyarakat. Hal tersebut misalnya nampak dalam  
aspek jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang memiliki  
jangka waktu lebih singkat pada UU Hak Cipta 1982, konsep  
perlindungan Hak Cipta bagi kepentingan nasional  
(pengambilalihan Hak Cipta untuk kepentingan nasional) pada  
UU Hak Cipta 1982 dibandingkan dengan konsep lisensi wajib  
dan konsep *fair use* pada UU Hak Cipta 2002.

*Kelima*, perlindungan Hak Cipta lebih berpihak pada  
kepentingan asing khususnya negara-negara maju. Sama halnya



dengan politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 1987 dan UU Hak Cipta 1997, ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta 2002 semakin menegaskan keberpihakan perlindungan Hak Cipta pada kepentingan negara-negara maju daripada berpihak pada kepentingan nasional. Hal tersebut dikarenakan pada hakikatnya UU Hak Cipta 2002 diterbitkan untuk mengimplementasikan *WTO/TRIPs Agreement* -yang bersifat *full compliance*- serta konvensi internasional lain di bidang Hak Cipta dengan baik sebagaimana dinyatakan dalam Konsiderans huruf b yang menyatakan:

bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.

Dalam Penjelasan bagian Umum UU Hak Cipta 2002 juga dinyatakan bahwa:

“Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut *WCT*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas.”

*Keenam*, perlindungan Hak Cipta yang diberikan merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia oleh karenanya perlindungan Hak Cipta dilakukan secara otomatis atau *automatic protection* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1). Namun demikian, dalam rangka mempermudah pembuktian dalam hal terjadinya sengketa Hak Cipta, dalam UU Hak Cipta 2002 diatur pula mengenai ketentuan pendaftaran ciptaan yakni dalam Bab IV Pasal 35-44, tanpa mengurangi sifat *automatic protection* tersebut.

*Ketujuh*, dengan sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan WTO/TRIPs *Agreement* ke dalam UU Hak Cipta 2002 maka perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta 2002 tidak didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan berbeda akan tetapi didasarkan pada pemberian perlakuan yang setara. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya

ketentuan *WTO/TRIPs Agreement* hendak memberikan suatu standar yang sama (perlakuan yang setara) baik kepada negara maju, negara berkembang, maupun negara tertinggal.

Berdasarkan uraian mengenai politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 2002 maka dapat dipahami bahwa sebagai sebuah undang-undang yang lahir pasca diratifikasinya *WTO/TRIPs Agreement* maka politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 2002 pada dasarnya dijiwai oleh politik hukum yang terkandung dalam *WTO/TRIPs Agreement*. Sebagai sebuah undang-undang yang dijiwai oleh politik hukum yang terkandung dalam *WTO/TRIPs Agreement* maka pada dasarnya secara yuridis politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 2002 bertentangan dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta. Hal tersebut setidaknya nampak dalam rumusan ketentuan UU Hak Cipta 2002 yang didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengandung politik hukum instrumental bahwa pemberian perlindungan Hak Cipta dilakukan untuk semakin mendukung upaya komersialisasi Hak Cipta. Disamping itu dalam rumusan pasal-pasal UU Hak Cipta 2002 menunjukkan pula bahwa pemberian perlindungan Hak Cipta lebih menitik beratkan pada kepentingan individu (Hak Individu) dibandingkan dengan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif) serta didasarkan

pula pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang setara. Ketidaksesuaian antara politik hukum instrumental dalam UU Hak Cipta 2002 dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta menunjukkan pula ketidaksesuaian antara politik hukum instrumental dalam UU Hak Cipta 2002 dengan Politik Hukum Dasar Hak Cipta.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa UU Hak Cipta 2002 lebih berpihak pada kepentingan asing khususnya kepentingan negara-negara maju daripada berpihak pada kepentingan nasional. Kondisi demikian tentu saja merugikan kepentingan nasional. Di satu sisi bangsa dan negara Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan bangsa dan negara lain khususnya di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun disisi lain Undang-Undang Hak Cipta Nasional yang sangat berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut dan justru lebih berpihak pada kepentingan negara-negara maju yang pada dasarnya berkeinginan untuk memonopolisasi dan mengkomersialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu keunggulan yang mereka miliki dan tidak dimiliki oleh Indonesia. Dalam kondisi demikian tentu saja sulit bagi bangsa dan negara Indonesia ingin mengejar

keteringgalan dan menyejajarkan diri dengan bangsa dan negara lain.

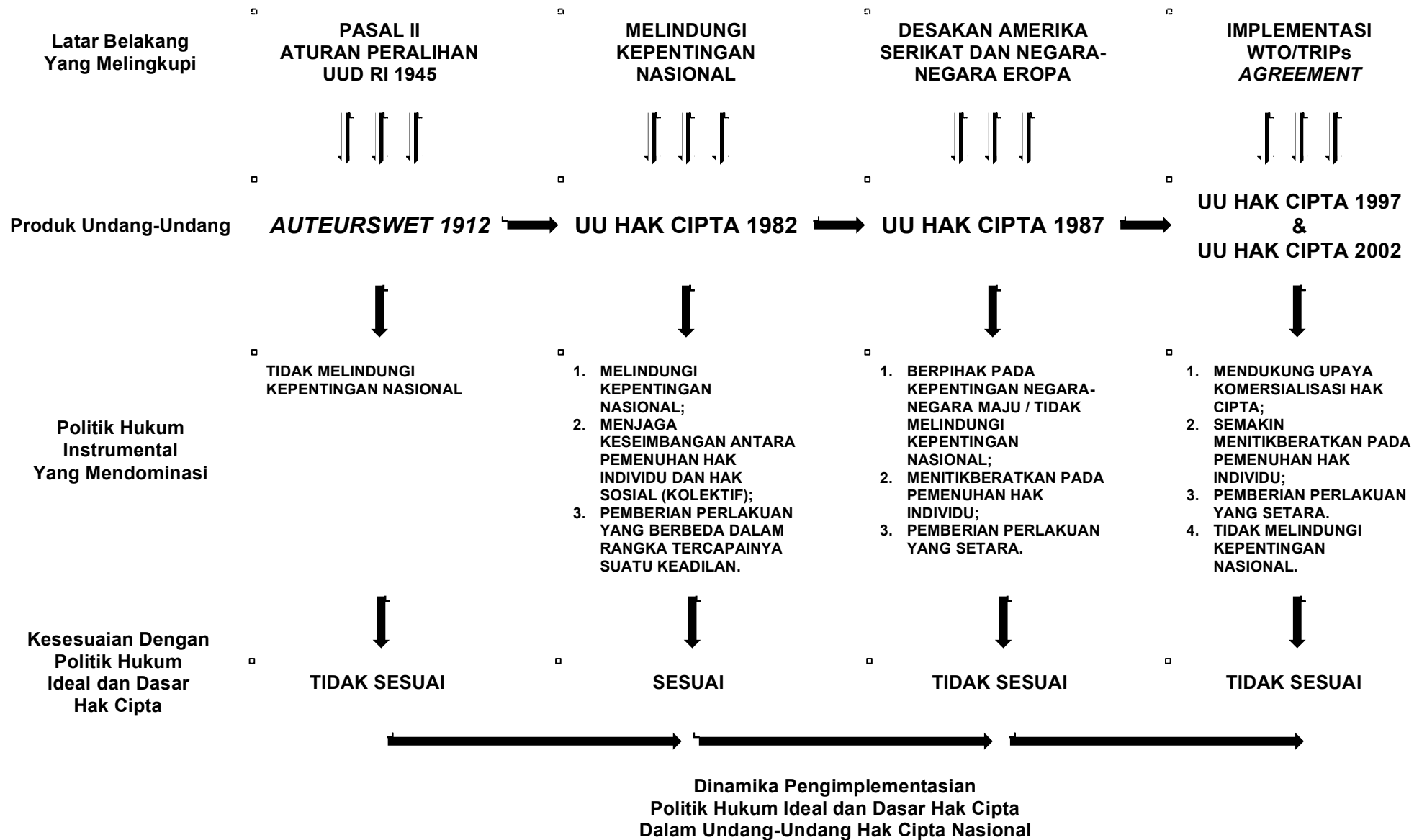
Tabel 3.9 Politik Hukum Instrumental Yang Terkandung  
Dalam UU Hak Cipta 2002

No.	Politik Hukum Instrumental UU Hak Cipta 1997	Keterangan
1.	Perlindungan Hak Cipta yang diberikan harus berbasis pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur.	Sesuai dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta yang diberikan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur.
2.	Perlindungan Hak Cipta diberikan dalam rangka untuk melindungi dan mendorong pengembangan kebudayaan nasional termasuk pula kebudayaan tradisional	Sesuai dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yakni untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kesusastraan, serta bentuk-bentuk kebudayaan lainnya
3.	Perlindungan Hak Cipta yang diberikan merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.	Sesuai dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta yang diberikan merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
3.	Perlindungan Hak Cipta lebih berpihak pada kepentingan asing khususnya negara-negara maju.	<b>Tidak sesuai</b> dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka kepentingan nasional;</li> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus diberikan tidak hanya bagi Warga Negara Indonesia akan tetapi juga kepada warga negara asing dalam batas-batas kewajaran serta tidak merugikan kepentingan nasional;</li> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus dilakukan dalam kerangka negara yang merdeka dan berdaulat.</li> </ul>
3.	Komersialisasi Hak Cipta.	<b>Tidak sesuai</b> dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Hak Cipta harus diberikan dalam kerangka kepentingan nasional;</li> <li>- Perlindungan Hak Cipta diberikan dengan memperhatikan keseimbangan atau harmoni antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / Kolektif).</li> </ul>

4.	Perlindungan Hak Cipta yang diberikan lebih menitik beratkan pada kepentingan individu (Hak Individu) dibandingkan dengan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / kolektif).	<b>Tidak sesuai</b> dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan dengan memperhatikan keseimbangan atau harmoni antara kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / Kolektif).
5.	Perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang setara.	<b>Tidak sesuai</b> dengan Politik Hukum Ideal Hak Cipta bahwa perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang berbeda dalam rangka tercapainya suatu keadilan.

Berdasarkan uraian dimuka maka dapat dipahami bahwa telah terjadi dinamika atau pasang surut pengimplementasian Politik Hukum Ideal dan Dasar dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional. Dapat dipahami pula bahwa faktor-faktor eksternal yakni berupa pengaruh asing khususnya pengaruh negara-negara maju telah membawa pengaruh terhadap Politik Hukum Instrumental Hak Cipta. Terlebih dalam era globalisasi yang ditandai dengan terlembaganya WTO/TRIPs *Agreement* telah membawa pergeseran terhadap arah Politik Hukum Instrumental Hak Cipta sehingga tidak lagi sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hukum Hak Cipta nasional tidak sinkron dan tidak taat asas dengan *legal policy* sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sistem hukum Hak Cipta yang ada tidaklah ideal bagi bangsa dan negara Indonesia serta berpotensi besar merugikan kepentingan nasional dan menghambat tercapainya tujuan negara.

Bagan 3.1. Perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta



### **C. Pembangunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional Pada Masa Yang Akan Datang**

Pembahasan mengenai pembangunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional tidak dapat dilepaskan dari Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta -sebagai paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional- dan realita Undang-Undang Hak Cipta Nasional berdasarkan UU Hak Cipta 2002. Berdasarkan uraian di muka dapat diketahui bahwa politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 2002 tidak selaras atau tidak sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Sebagaimana dipahami bahwa UU Hak Cipta 2002 sebagai suatu norma hukum merupakan salah satu bidang dalam sistem hukum nasional. Secara teoritik sistem hukum nasional tersusun secara hierarkhis, berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, dimana Pancasila menjadi norma hukum tertinggi diikuti oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum dasar. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara." Sedangkan dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa: "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Dalam Pasal 7 ayat 1 dinyatakan pula bahwa:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Uraian dimuka menunjukkan bahwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar hukum yang dijadikan pedoman atau sumber legitimasi yang oleh karenanya seluruh norma hukum atau peraturan perundang-undangan (hukum positif) harus bersumber dan berdasar, serta tidak boleh bertentangan dengannya. Hal tersebut berarti apabila dalam praktek terjadi pertentangan antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi maka secara norma hukum yang lebih rendah tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai hierarkhi sistem hukum di muka dapat dipahami bahwa idealnya Undang-Undang Hak Cipta nasional harus berpedoman, bersumber, dan berdasar pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian dalam kenyataannya telah terjadi pertentangan antara UU Hak Cipta 2002 dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pertentangan tersebut ditunjukkan melalui adanya ketidakselarasan atau ketidaksesuaian

antara Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang terkandung dalam UU Hak Cipta 2002 dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu maka secara teoritik pembangunan hukum Hak Cipta nasional ke depan harus berpedoman, bersumber, dan berdasar serta merepresentasikan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pemahaman mengenai pembangunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional berdasarkan hierarkhi sistem hukum sebagaimana telah diuraikan di muka adalah bentuk pemahaman yang didasarkan pada karakteristik hukum sebagai suatu bangunan (sistem) rasionalitas (konsep rasionalitas). Disamping sebagai suatu bangunan (sistem) rasionalitas, karakteristik hukum dapat pula dipahami sebagai suatu bangunan (sistem) ide (konsep ide). Sebagai suatu bangunan (sistem) ide maka hukum suatu bangsa mengandung pesan-pesan dan merupakan bagian integral dari kehidupan bangsa tersebut, oleh karenanya berdasarkan konsep ide, setiap bangsa memiliki hak dan wewenang untuk membangun hukumnya tersendiri.<sup>262</sup> Dalam kaitannya dengan karakteristik hukum sebagai suatu bangunan (sistem) ide, Brian Z. Tamanaha mengungkapkan sebuah teori yang dinamakan sebagai *mirror thesis*. Teori ini mengatakan bahwa hukum

---

<sup>262</sup> Satjipto Rahardjo, "Sumbangan Pemikiran Ke Arah Pengusahaan Ilmu Hukum Yang Bersifat Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Hukum Yang Berkualitas Indonesia, diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 11 Januari 1988, hal. 4., lihat juga: Arief Hidayat, *op.cit.*, hal. 23-24.

merupakan pencerminan belaka dari gagasan-gagasan, tradisi, nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ada di dalam masyarakat tersebut.<sup>263</sup>

Namun demikian dalam kenyataannya pembangunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada masa yang lalu tidak dapat dilaksanakan serta merta sesuai dengan konsep ide dan konsep rasionalitas tersebut. Kondisi demikian menimbulkan adanya *gap* antara idealisme perlindungan Hak Cipta menurut bangsa Indonesia (*das sollen*) dengan realitas Undang-Undang Hak Cipta Nasional (*das sein*). Hal tersebut disebabkan kedudukan Indonesia sebagai negara anggota WTO yang secara yuridis berkewajiban untuk mengimplementasikan WTO/TRIPs *Agreement* tak terkecuali dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam WTO/TRIPs *Agreement* bertentangan dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu pengimplementasian WTO/TRIPs *Agreement* dalam hukum Hak Cipta nasional berpotensi besar merugikan kepentingan nasional dan menghambat tercapainya tujuan negara.

Secara teoritik pengimplementasian aturan-aturan WTO/TRIPs *Agreement* ke dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional merupakan bentuk pengintegrasian hukum internasional ke dalam hukum

---

<sup>263</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal. 16-17.

nasional. Adapun untuk memahami keterkaitan atau hubungan dan kedudukan antara hukum nasional dan internasional dikenal dua pola praktik kenegaraan yakni:

*Pertama*, praktik kenegaraan yang menganut paham monisme. Paham monisme menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional terdapat dalam satu sistem hukum. Dalam sebuah negara yang menganut paham monisme maka hukum internasional (terutama perjanjian internasional) akan menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara setelah seluruh syarat *entry into force* dipenuhi, tanpa diperlukannya pembentukan legislasi nasional. Namun demikian, dalam praktik-praktik kenegaraan tetap terbuka kemungkinan bagi suatu negara penganut paham monisme untuk tetap mengimplementasikan perjanjian internasional yang telah diratifikasi ke dalam suatu undang-undang. Hal ini biasanya dilakukan atas perjanjian internasional yang tidak dapat serta merta diimplementasikan pada masyarakat suatu negara (*self executing*). Paham monisme antara lain dianut oleh Perancis, Jerman, Belanda, Polandia, Rusia, dan Swiss.<sup>264</sup>

Seiring berjalannya waktu, paham monisme berkembang menjadi dua yakni paham monisme dengan primat hukum nasional (mengutamakan hukum nasional) dan paham monisme dengan primat hukum internasional (mengutamakan hukum internasional). Paham

---

<sup>264</sup> Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hal. 84.

monisme dengan primat hukum nasional berpandangan bahwa hukum nasional ditempatkan pada posisi yang utama dibandingkan dengan hukum internasional dikarenakan hukum internasional bukanlah suatu bentuk pedoman perilaku individu. Berdasarkan paham ini maka dapat dipahami bahwa kepentingan negara lebih diutamakan dengan mengesampingkan hukum internasional. Paham monisme dengan primat hukum internasional berpandangan bahwa terdapat satu kesatuan sistem hukum dimana hukum internasional menempati posisi tertinggi diatas hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan sumber hukum internasional dipandang lebih superior secara hierarkhi daripada hukum nasional. Oleh sebab itu hukum nasional harus selalu sesuai dan mengikuti hukum internasional.<sup>265</sup>

*Kedua*, paham dualisme. Paham dualisme menganggap hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah. Dalam sebuah negara yang menganut paham monisme maka hukum internasional baru akan menjadi bagian dari hukum nasional apabila telah terdapat legislasi nasional yang mengakomodasi pemberlakuan hukum internasional tersebut terlebih dahulu. Legislasi nasional tersebut dianggap sebagai proses transformasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Paham dualisme dianut oleh Inggris.<sup>266</sup>

---

<sup>265</sup> *Ibid.*, hal. 87-88.

<sup>266</sup> *Ibid.*, hal. 85, 87-88.

Dalam konteks hukum di Indonesia, hingga saat ini tidak diketahui dan diatur secara jelas mengenai hubungan dan kedudukan antara hukum nasional dan hukum internasional. Hingga saat ini tidak ada satu ketentuanpun dalam sistem hukum nasional yang menyatakan secara tegas apakah Indonesia menganut paham monisme ataukah paham dualisme dalam mengatur hubungan dan kedudukan antara hukum nasional dan hukum internasional. Ketidakjelasan mengenai hubungan dan kedudukan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem hukum nasional (Indonesia) berakibat pada ketidakjelasan status dan implementasi hukum internasional dalam hukum nasional. Disamping itu ketidakjelasan tersebut juga berakibat pada norma hukum apakah yang akan diutamakan dan diberlakukan jika perjanjian internasional yang telah diratifikasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau dengan kata lain merugikan kepentingan nasional(?).

Kejelasan mengenai norma hukum apakah yang akan diutamakan dan diberlakukan jika perjanjian internasional yang telah diratifikasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi sangat penting dalam pembangunan sistem hukum nasional pada era global dewasa ini. Hal tersebut mengingat pada era global dewasa ini terdapat berbagai jenis perjanjian atau konvensi internasional yang diantaranya tidak sesuai Pancasila dan UUD NRI

Tahun 1945 serta kepentingan nasional, seperti halnya WTO *Agreement*.

Dengan adanya ketidakjelasan tersebut maka diperlukan usaha untuk menarik keluar (*to tease out*) politik hukum yang berkaitan dengan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dari dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsensus bangsa dan negara Indonesia yang berisi pernyataan moral bangsa Indonesia dalam mendirikan dan membangun negara Indonesia. Adapun politik hukum ideal yang terkandung dalam Pancasila dalam kaitannya dengan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dapat digali dari prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab lahir dari pandangan bangsa Indonesia yang memandang bahwa manusia sebagai suatu fenomena, ada tidak dengan sendirinya, akan tetapi memiliki suatu relasi dengan fenomena lain yang memiliki kekuatan adikodrati diatas manusia, yakni Tuhan. Disamping itu bangsa Indonesia juga memandang bahwa manusia juga memiliki relasi dengan fenomena lainnya yakni alam semesta dan manusia lainnya itu sendiri. Dalam kenyataannya umat manusia terdiri atas beranekaragam bangsa, suku bangsa, etnik, adat budaya, maupun agama. Pandangan tersebut pada akhirnya membawa bangsa Indonesia pada suatu kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan

bagian dari bangsa-bangsa di dunia, negara Indonesia merupakan bagian dari negara-negara di dunia. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Soekarno dalam pidatonya di hadapan Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, bahwa “kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*” melainkan “kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa” (internasionalisme / peri-kemanusiaan). Oleh karenanya berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab maka pembangunan Indonesia harus mencakup dua aspek yang tak terpisahkan yakni ke dalam, bangsa dan negara Indonesia harus memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak dasar/asasi manusia, dengan menjalankan fungsi “melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”; ke luar bangsa dan negara Indonesia harus menggunakan daya dan khazanah yang dimiliki untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”<sup>267</sup> Frasa “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” sebagaimana tercantum dalam Alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945 mengandung politik hukum bahwa dalam pergaulan (hubungan) negara Indonesia di tingkat internasional dengan negara-negara dunia lainnya harus dilaksanakan dalam kerangka negara

---

<sup>267</sup> Yudi Latif, *op.cit.*, hal. 126.



yang berdaulat dan ditujukan bagi terciptanya perdamaian dunia dan tata dunia yang berkeadilan (prinsip kedaulatan, kedamaian, dan keadilan).

Berdasarkan politik hukum tersebut maka dalam kaitannya dengan kegiatan dalam hubungan internasional dan diadakannya perjanjian-perjanjian internasional, maka Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kebebasan untuk ikut atau tidak ikut serta dalam kegiatan internasional atau perjanjian internasional tertentu. Namun demikian kebebasan ini dibatasi oleh suatu kewajiban bahwa Indonesia sebagai sebuah bagian dari “keluarga besar” negara dunia memiliki kewajiban untuk selalu ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan internasional atau perjanjian internasional yang dimaksudkan bagi terciptanya perdamaian serta tata dunia yang berkeadilan.

Adapun berkaitan dengan permasalahan mengenai norma hukum apakah yang akan diutamakan dan diberlakukan jika perjanjian internasional yang telah diratifikasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 maka berdasarkan prinsip kedaulatan, kedamaian, dan keadilan dalam hubungan internasional maka norma hukum internasional atau perjanjian internasional-lah yang harus dikesampingkan dan norma hukum nasional-lah dalam hal ini Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang harus diberlakukan atau

menjadi sumber dan dasar dari setiap norma hukum nasional yang ada.

Dalam kaitannya dengan *WTO/TRIPs Agreement* maka Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat tentu memiliki kebebasan untuk ikut atau tidak ikut serta dalam WTO. Sudah saatnya pemerintah sebagai representasi kedaulatan rakyat perlu meninjau kembali keikutsertaan Indonesia sebagai negara anggota WTO. Sebagaimana dipahami bahwa dalam perspektif historis, penyusunan *WTO/TRIPs Agreement* dilakukan dalam situasi yang koersif dan tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu tata dunia yang berkeadilan sehingga sangat bertentangan dengan politik hukum hubungan internasional Indonesia yang didasarkan pada prinsip kedaulatan, perdamaian, dan keadilan. Sebagaimana dipahami pula bahwa dalam perspektif realita hukum Hak Cipta nasional, bahwa pengimplementasian *WTO/TRIPs Agreement* telah menimbulkan ketidaksesuaian Undang-Undang Hak Cipta Nasional dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sehingga berdasarkan politik hukum hubungan internasional Indonesia yang didasarkan pada prinsip kedaulatan, perdamaian, dan keadilan, ketentuan *WTO/TRIPs Agreement* sudah seharusnya dikesampingkan. Disamping itu dalam perspektif realita perlindungan Hak Cipta nasional, keikutsertaan Indonesia dalam *WTO/TRIPs Agreement* pada dasarnya bertentangan dengan kepentingan nasional karena telah menghambat bangsa dan

negara Indonesia untuk mengejar ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sulit untuk menyejajarkan diri dengan negara-negara maju yang disebabkan oleh monopolisasi dan komersialisasi Hak Cipta berdasarkan *WTO/TRIPs Agreement*.

Berdasarkan kenyataan tersebut di muka dapat dipahami bahwa keanggotaan Indonesia dalam WTO yang berimbas pada diimplementasikannya seluruh ketentuan yang terdapat dalam *WTO Agreement* tak terkecuali *TRIPs Agreement* tidak didasarkan pada suatu pertimbangan yang matang dalam kerangka negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta dalam kerangka kepentingan nasional. Keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam WTO hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis yakni demi mendapatkan fasilitas perdagangan internasional, kepercayaan internasional sebagai dasar memperoleh pinjaman internasional, serta mendorong dilakukannya investasi modal asing yang dalam kenyataannya saat ini mulai mengundang tanda tanya karena tidak kunjung mewujudkan kehidupan yang sejahtera tapi justru memperlebar jurang kesenjangan ekonomi di Indonesia. Oleh karenanya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk meninjau kembali keikutsertaan Indonesia sebagai negara anggota WTO.

Dalam kaitannya dengan pembangunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional, maka mutlak pembangunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada masa yang akan datang harus disusun

berdasarkan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta sebagai paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional dan mengesampingkan WTO/TRIPs Agreement serta instrumen-instrumen hukum internasional yang bertentangan dengan paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional. Dengan berdasar pada paradigma Politik Hukum Nasional maka niscaya bidang Hak Cipta dapat menjadi salah satu komponen penting untuk dapat mendorong bangsa dan negara Indonesia mengejar ketertinggalannya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu menyejajarkan diri dengan negara-negara maju dan mempercepat tercapainya tujuan negara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Politik Hukum Ideal Hak Cipta sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar merupakan paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional. Sebagai paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional maka Politik Hukum Ideal dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta menjadi dasar pedoman dan sumber pembangunan Hukum Hak Cipta Nasional. Dengan perkataan lain bahwa Politik Hukum Ideal dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta harus diimplementasikan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional. Adapun politik hukum yang menonjol dalam Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta adalah sebagai berikut:
  - a. Perlindungan Hak Cipta didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan budi pekerti yang luhur;
  - b. Perlindungan Hak Cipta diberikan dalam kerangka kepentingan nasional;
  - c. Perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keseimbangan antara pemenuhan kepentingan individu (Hak Individu) dan kepentingan masyarakat (Hak Sosial / Kolektif);

- d. Perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang berbeda dalam rangka tercapainya suatu keadilan.
2. Perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional adalah sebagai berikut :
- a. Politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Pengarang tidak sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta dikarenakan UU Hak Pengarang merupakan bentuk pemberlakuan kembali *Auteurswet* 1912 yang merupakan undang-undang Hak Pengarang peninggalan pemerintah kolonial Belanda dimana ketentuan yang terkandung di dalamnya tidak melindungi kepentingan nasional;
  - b. Politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 1982 telah sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta dikarenakan rumusan UU Hak Cipta 1982 mencerminkan suatu politik hukum instrumental bahwa (1) perlindungan Hak Cipta diberikan dalam kerangka kepentingan nasional, (2) perlindungan Hak Cipta diberikan dengan menjaga keseimbangan antara pemenuhan Hak Individu dan Hak Sosial (Kolektif), (3) perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang berbeda dalam rangka tercapainya suatu keadilan;

- c. Politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 1987 tidak sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta dikarenakan rumusan UU Hak Cipta 1987 mencerminkan suatu politik hukum instrumental bahwa (1) pemberian perlindungan Hak Cipta lebih berpihak pada kepentingan negara-negara maju, (2) perlindungan Hak Cipta yang diberikan lebih menitikberatkan pada pemenuhan Hak Individu, (3) pemberian perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang setara. Sebagaimana diketahui bahwa penerbitan UU Hak Cipta 1987 sebagai bentuk perubahan (revisi) terhadap UU Hak Cipta 1982 dilakukan atas desakan dan tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, oleh sebab itu proses penyusunan UU Hak Cipta 1987 tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh asing yang pada akhirnya menyebabkan pergeseran arah politik hukum instrumental Hak Cipta yang terkandung dalam UU Hak Cipta 1987;
- d. Politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 1997 tidak sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta dikarenakan rumusan UU Hak Cipta 1987 mencerminkan suatu politik hukum instrumental bahwa (1) pemberian perlindungan Hak Cipta ditujukan untuk mendukung upaya komersialisasi Hak Cipta, (2) pemberian perlindungan Hak Cipta semakin menitik beratkan pada

pemenuhan Hak Individu; (3) pemberian perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang setara, (4) pemberian perlindungan Hak Cipta tidak diberikan dalam kerangka kepentingan nasional. Politik hukum instrumental demikian ini merupakan wujud pengimplementasian ketentuan WTO/TRIPs *Agreement* ke dalam hukum Hak Cipta nasional.

- e. Politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 2002 tidak sesuai dengan Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta dikarenakan rumusan UU Hak Cipta 2002 mencerminkan suatu politik hukum instrumental bahwa (1) pemberian perlindungan Hak Cipta ditujukan untuk mendukung upaya komersialisasi Hak Cipta, (2) pemberian perlindungan Hak Cipta semakin menitik beratkan pada pemenuhan Hak Individu; (3) pemberian perlindungan Hak Cipta didasarkan pada prinsip keadilan dengan pemberian perlakuan yang setara, (4) pemberian perlindungan Hak Cipta tidak diberikan dalam kerangka kepentingan nasional. Sama halnya dengan yang terjadi pada UU Hak Cipta 1997, politik hukum instrumental yang terkandung dalam UU Hak Cipta 2002 merupakan wujud pengimplementasian ketentuan WTO/TRIPs *Agreement* ke dalam hukum Hak Cipta nasional.

Perkembangan Politik Hukum Instrumental Hak Cipta yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional



menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika atau pasang surut dalam pengimplementasian Politik Hukum Ideal dan Politik Hukum Dasar Hak Cipta ke dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional.

3. Pembangunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada masa yang akan datang harus dilakukan dengan berpedoman, bersumber, dan berdasar pada Politik Hukum Ideal dan Dasar Hak Cipta sebagai paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional dan mengesampingkan ketentuan-ketentuan WTO/TRIPs *Agreement* serta instrumen-instrumen hukum internasional yang bertentangan dengan paradigma Politik Hukum Hak Cipta Nasional. Hal tersebut dikarenakan pengimplementasian WTO/TRIPs *Agreement* dalam UU Hak Cipta 2002 telah menyebabkan terjadinya gap antara idealisme perlindungan Hak Cipta menurut bangsa Indonesia (*das sollen*) dengan realitas Undang-Undang Hak Cipta Nasional (*das sein*).

## **B. Saran**

1. Pada tingkat nasional, pemerintah Indonesia diharapkan memiliki keberanian dan nasionalisme yang tinggi untuk melakukan perubahan terhadap UU Hak Cipta 2002 dengan menerbitkan sebuah Undang-Undang Hak Cipta Nasional yang seluruh ketentuannya bersumber pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

2. Pada tingkat nasional, pemerintah Indonesia diharapkan memiliki keberanian dan nasionalisme yang tinggi untuk meninjau kembali keikutsertaan Indonesia dalam WTO. Hal tersebut dikarenakan:
  - a. Dalam perspektif historis, penyusunan WTO/TRIPs Agreement dilakukan dalam situasi yang koersif dan tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu tata dunia yang berkeadilan;
  - b. Dalam perspektif yuridis, pengimplementasian WTO/TRIPs Agreement dalam sistem hukum nasional dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan produk hukum undang-undang. Hal tersebut setidaknya ditunjukkan dalam kasus pengimplementasian WTO/TRIPs *Agreement* dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional.
3. Pada tingkat global, pemerintah Indonesia diharapkan mampu menggalang dan menjadi pemimpin aliansi bersama antar negara-negara berkembang dan tertinggal sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni negara-negara maju dalam tata dunia yang tidak berkeadilan dewasa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdussalam, HR. *Politik Hukum*. Jakarta: PTIK Press, 2011.
- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi: Gerakan-Gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2006.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Draho, Peter. *An Alternative Framework for The Global Regulation of Intellectual Property Rights*. Canberra: Centre for Governance of Knowledge and Development, 2005.
- Fadjar, Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia 2005.
- Fajar ND., Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Cetakan I. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Eresco, 1995.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Goldstein, Paul, et.al. *Copyright*. Toronto: Little, Brown and Company, 1989.

- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: PT. Alumni, 1991.
- Haryanto, Ignatius. *Penghisapan Rezim HAKI: Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: debt-Watch Indonesia, 2002.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Buku 1. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Irawan, Candra. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Cetakan I. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Irianto, Sulistyowati (Ed.). *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2008.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Gatra Pustaka, 2010.
- Khairandy, Ridwan, et.al. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Kusuma, RM. A.B. *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem Presidensial "Orde Reformasi"*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2011.
- L. Tanya, Bernard. et.al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara. *Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara*. Jakarta: PT Cipta Prima Budaya, 2005.
- Lindsey, Tim, *et.al (Ed.)*. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Mahfud MD, Mohammad. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Manan, Bagir.*et.al*. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi 1. Cetakan I. Jakarta: Kencana, 2005.
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- Noerhadi, Inda Citraninda. *Sejarah Hak Cipta Lukisan*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Nugroho, Riant dan Marco P. Sumampouw. *Manajemen Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1997.

- Panjaitan, Helman dan Wetmen Sinaga. *Performing Right, Hak Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: IHC, 2010.
- Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- Priyono, Joko. *Hukum Perdagangan Barang Dalam GATT/WTO*. Semarang: Penerbit UNDIP, 2011.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*. Cetakan I. Jakarta-Bandung: PT. Alumni, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Rahardjo, Bambang dan Syamsuhadi, ed., *Garuda Emas Pancasila Sakti*. Jakarta: Yayasan Pembela Tanah Air Pusat, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Pembahasan Dari Optik Ilmu Hukum Umum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Rais, Muhammad Amien. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press, 2008.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Rusdiah, Rudi. *Diplomasi, Unilateralisme, Kompetisi Global: Studi Kasus USTR Special 301 – TRIPs Plus – WTO & Pasar HKI Software RI*. Cetakan I. Jakarta-Bandung: PT. Alumni, 2011.

Saleh, Imam Anshori. *Membenahi Hukum Dari Proklamasi ke Reformasi: Urgensi Prolegnas dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Konstitusi Press, 2009.

Santoso, Budi. *Dekonstruksi Hak Cipta Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012.

Sekretaris Jenderal MPR RI. *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Setjen MPR RI, 2003.

Sekretariat Jenderal MPR RI. *Bahan Tayangan: Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Setjen MPR RI, 2006.

Sekretariat Negara. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1998.

Sitabuana, Tundjung Herning. *Alih Teknologi Melalui Sarana Technical Assistance Agreement*. Semarang: Penerbit UNDIP, 2005.

Sjahputra, Iman. *Menggali Keadilan Hukum: Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni, 2009.

Smiers, Joost dan Marieke Van Schijndel. *Dunia Tanpa Hak Cipta*. Yogyakarta: Insist Press, 2012.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1981.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Suseno, Frans Magnis. *Berebut Jiwa Bangsa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press, 2009.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

### **Karya Ilmiah**

Adi Nugraha, Raditya. *Tarik Menarik Antara Aktor Negara dan Non Negara dalam Penerapan Rezim Internasional Tentang Lisensi Software (Studi Kasus MoU Microsoft – RI)*. Tesis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.

Nanik Trihastuti, *Tanggung Jawab Perusahaan Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Mineral Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Kesejahteraan Indonesia*. Ringkasan Disertasi dalam Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004.

Mahfud, MD. *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*. Disertasi pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1993.

Sitabuana, Tundjung Herning. *Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina: Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

### **Makalah**

Hidayat, Arief dan Airlangga Surya Nagara. *“Negara Hukum Pancasila: Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum”*. Makalah disampaikan pada acara Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2011.

Mahfud M.D., Mohammad. *“Pancasila Sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa”*. Makalah disampaikan pada Sarasehan



Nasional Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta, 2-3 Mei 2011.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. "Politik Hukum nasional", Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum, yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya, September 1995.

Rahardjo, Satjipto. "Sumbangan Pemikiran Ke Arah Pengusahaan Ilmu Hukum Yang Bersifat Indonesia". Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Hukum Yang Berkualitas Indonesia, diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 11 Januari 1988.

Sudjito. "Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila". Makalah disampaikan pada Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta, 2-3 Mei 2011.

Suhardo, Etty S. "Ekspresi Karya Seni Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa", makalah diunduh dari *eprints.undip.ac.id* tanggal 19 Januari 2013.

Suseno, Frans Magniz. "Nilai-nilai Pancasila Sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi". Makalah disampaikan pada Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta, 2-3 Mei 2011.

## **Artikel**

Ahmad Erani Yustika, "Ongkos Globalisasi", dalam Opini, Harian Kompas:Rabu, 12 September 2012.

Ekonomi Pembangunan, "Pertumbuhan Ekonomi Tak Jamin Kesejahteraan", Harian Kompas:Rabu, 5 September 2012.

## **Wawancara**

Arief Hidayat, Wawancara, Universitas Diponegoro, Semarang: 21 Agustus 2012.

Arief Hidayat, Wawancara, Universitas Diponegoro, Semarang: 27 September 2012.

Arief Hidayat, Wawancara, Universitas Diponegoro, Semarang: 21 Agustus 2012

### **Web Site**

[http://nl.wikisource.org/wiki/Auteurswet\\_-\\_Hoofdstuk\\_I](http://nl.wikisource.org/wiki/Auteurswet_-_Hoofdstuk_I), diakses pada 18 September 2012.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 18 September 2012.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 14 November 2012.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 26 November 2012.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton\\_Woods\\_system](http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system), diakses tanggal 18 November 2012.

<http://www.artikata.com/arti-32098-chauvinist.html>, diakses tanggal 27 November 2012.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 27 November 2012.

[http://www.ustr.gov / trade - topics / trade - development / preference - programs / generalized – system – preference – gsp](http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp), diakses tanggal 28 Desember 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

#### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Ketetapan MPR**

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

### **Undang-Undang**

*Auteurswet* 1912

Undang-Undang No. 6 Tahun 1982

Undang-Undang No. 7 Tahun 1987

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994

Undang-Undang No. 12 Tahun 1997

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

### **Perjanjian Internasional**

Berne Convention

Universal Copyright Convention

The Rome Convention

The Geneva Phonogram Convention

WTO/TRIPs Agreement

WIPO Copyrights Treaty

WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)